

**DEMOKRASI DELIBERATIF DI TINGKAT DESA**  
**(STUDI PRAKTIK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN**  
**INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**Laila Az Zahra Baedi**

2006016049

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

UIN walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek akademis dan administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Lailla Az Zahra Baedi

Nim : 2006016049

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : DEMOKRASI DELIBERATIF DI TINGKAT DESA

(Studi Praktik Demokrasi Deliberatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Meteseh Tahun 2020-2023)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 29 Februari 2024

Pembimbing I



Tika Ifrida Takayasa. M.A

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**DEMOKRASI DELIBERATIF DI TINGKAT DESA**

**(Studi Praktik Demokrasi Deliberatif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa  
Meteseh Tahun 2020-2023)**

Disusun Oleh:

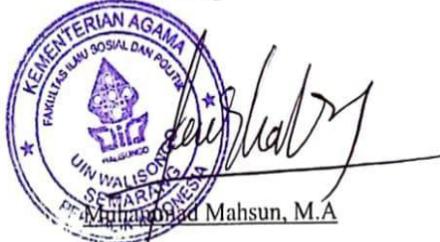
**Laila Az Zahra Baedi**

2006016049

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 25 Maret 2024 dan  
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

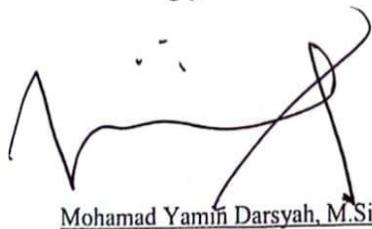
Ketua Sidang



Muhammad Mahsun, M.A

NIP. 198511182016011901

Penguji



Mohamad Yamin Darsyah, M.Si

NIP. 198409092019031007

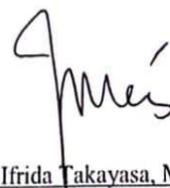
Sekretaris



Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

Pembimbing



Tika Ifrida Takayasa, M.A

NIP. 198811152019032018

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024



LAILLA AZ ZAHRA BAEDI

NIM: 2006016049

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun dalam prosesnya banyak sekali hambatan, akan tetapi penulis sadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar pertolongan Allah SWT. Tak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “DEMOKRASI DELIBERATIF DI TINGKAT DESA (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Meteseh Tahun 2020-2023)”.

Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Studi S-1 pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
5. Ibu Tika Ifrida Takayasa. M.A selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat untuk penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh Pemerintah Desa Meteseh dan Warga Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang telah memberikan ijin dan turut serta membantu dalam memberikan informasi dan pemberian data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Ayahku H. Baedi, S.T dan Ibuku Hj. Eni Sularsih yang selalu memberi semangat dan motivasi serta selalu memberikan doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adik ku yang paling lucu Muhammad Mirzan Baedi yang selalu memberikan kegembiraan disaat penulis merasa lelah dalam tahap penyelesaian tugas akhir ini.
10. Kepada BTS (Bangtan Sonyeondan) yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook. Yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis selama ini dari lagu-lagu dan karya-karya yang diciptakan dan motivasi yang diberikan untuk selalu berani menghadapi segala tantangan, selalu mengajarkan untuk tidak mudah menyerah dan selalu memberikan dorongan untuk mencintai diri sendiri.
11. Teman-teman S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang angkatan 2020 dan seluruh teman-teman yang ada dikampus serta teman-teman diluar kampus terima kasih atas doa dan dukungannya
12. Semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi, kebersamaan, dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Baedi, S.T & Ibu Hj. Eni Sularsih yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang.

## **MOTTO**

Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday me is still me. I am who I'm today with all my faults. Tomorrow I might be a tiny bit wiser and that's me too.

-BTS-

(Bangtan Sonyeondan)

## ABSTRAK

Pembangunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk merubah suatu keadaan kearah lebih baik, melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sering kali tahapan pembangunan tidak melibatkan masyarakat, sehingga kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat menyebabkan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Inilah pentingnya demokrasi deliberatif yang menitikberatkan pembentukan opini yang bebas, semua warga negara memiliki akses, pertemuan tidak dibatasi, adanya argumen dan konsensus dalam dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintahan yang kuat harus melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah guna menyalurkan aspirasi dan diskusi melalui forum ruang publik, supaya mendorong kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan agar lebih baik. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian praktik Demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Meteseh tahun 2020-2023. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh, kedua untuk mengetahui dampak demokrasi deliberatif terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini mengacu pada teori demokrasi deliberatif konsep ruang publik Jurgen Habermas. Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian, adanya praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan di Desa Meteseh sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemerintah desa memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa forum deliberatif untuk menyampaikan aspirasinya sebagai pengambilan keputusan agar terealisasinya kegiatan pembangunan. Dampak dari demokrasi deliberatif menyebabkan partisipasi aktif masyarakat desa meteseh berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan yang menghasilkan terealisasinya pembangunan yang semakin banyak dan bertahap.

**Kata Kunci: Demokrasi deliberatif, Pembangunan, Desa Meteseh**

## ABSTRACT

Development is an action taken to change a situation for the better, through infrastructure development carried out by the government can improve the welfare of the community. However, often the stages of development do not involve the community, so the lack of coordination between the government and the community causes development to not meet the needs of the community. This is the importance of deliberative democracy that emphasizes the formation of free opinions, all citizens have access, meetings are not limited, there are arguments and consensus in the decision-making process. A strong government must involve the community in the deliberation process to channel aspirations and discussions through public space forums, in order to encourage community contributions in the implementation of development for the better. This is the background for the author to conduct research on the practice of deliberative democracy in infrastructure development carried out in Meteseh Village in 2020-2023. The purpose of this research is first, to find out the practice of deliberative democracy in infrastructure development in Meteseh Village, second, to find out the impact of deliberative democracy on infrastructure development in Meteseh Village. This research uses qualitative research methods with a case study approach and field research type. This research refers to the deliberative democracy theory of Jurgen Habermas public space concept. Data sources in the study used primary data and secondary data. The research data collection used interview, observation and documentation methods. The results of the research show that the practice of deliberative democracy in development in Meteseh Village has gone well. It is proven by involving all elements of the community in the development stages from planning, implementation to evaluation. The village government provides facilities to the community in the form of a deliberative forum to convey their aspirations as decision-making for the realization of development activities. The impact of deliberative democracy has led to the active participation of the meteseh village community, which has an impact on increasing road infrastructure development, including the fields of education, economy, and health, resulting in the realization of more and more gradual development.

**Keywords: Deliberative democracy, Development, Meteseh Village**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Demokrasi Deliberatif Secara Umum .....	7
2. Demokrasi Deliberatif di Desa.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sumber Data dan Jenis Data .....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II DEMOKRASI DELIBERATIF .....</b>	<b>16</b>
A. Memahami Demokrasi .....	16
1. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	18

2.	Memahami Deliberasi .....	19
B.	Memahami Demokrasi Deliberatif.....	20
1.	Konsep Ruang Publik Jürgen Habermas.....	20
2.	Latar Belakang Demokrasi Deliberatif .....	22
3.	Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia .....	24
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA METESEH.....</b>	<b>27</b>
A.	Profil Desa Meteseh .....	27
1.	Sejarah Desa Meteseh .....	27
2.	Kondisi Topografi Desa Meteseh .....	28
B.	Kondisi Demografi Desa Meteseh .....	29
1.	Jumlah Penduduk Desa Meteseh .....	29
2.	Jumlah Dusun Desa Meteseh .....	30
3.	Tingkat Pendidikan Desa Meteseh.....	30
4.	Kondisi Keagamaan Desa Meteseh.....	31
5.	Kondisi Jenis Mata Pencaharian Desa Meteseh.....	32
6.	Kondisi Sosial Desa Meteseh.....	33
7.	Kondisi Budaya Desa Meteseh .....	34
8.	Kondisi Ekonomi Desa Meteseh.....	35
C.	Kondisi Pemerintah Desa Meteseh .....	37
1.	Visi Misi Desa Meteseh .....	37
2.	Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Meteseh .....	39
3.	Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Meteseh .....	40
4.	Potensi Desa Meteseh .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PRAKTIK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM</b>	
	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023..</b>	<b>50</b>
A.	Tahap Perencanaan.....	50
1.	Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Ruang Publik .....	51
a.	RT dan RW .....	51
b.	PKK.....	51
c.	Karang Taruna .....	52
d.	Posyandu .....	53
e.	Kelompok Tani .....	54

f.	Kelompok Buruh.....	55
g.	Pokdarwis.....	55
h.	Pendamping Lokal Desa .....	56
i.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .....	57
j.	LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa).....	57
k.	Tokoh Agama.....	58
2.	Forum Deliberatif.....	59
a.	Musdus dalam Tahap Perencanaan .....	59
b.	Musrenbang dalam Tahap Perencanaan.....	62
c.	Musdes dalam Tahap Perencanaan .....	64
d.	Musyawaharah Masyarakat Desa (MMD) dalam Tahap Perencanaan.....	66
e.	Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Tingkat RT dalam Tahap Perencanaan .....	66
3.	Anggaran Desa Meteseh Tahun 2020-2023 dalam Perencanaan.....	70
4.	Pengambilan Keputusan dalam Tahap Perencanaan.....	72
B.	Tahap Pelaksanaan .....	75
1.	Keterlibatan Masyarakat dalam Ruang Publik .....	75
a.	Sebagai Pengamat .....	75
b.	Sebagai Sumbangsi Tenaga .....	76
2.	Monitoring dalam Tahap Pelaksanaan .....	78
a.	Keterlibatan Masyarakat dalam Monitoring .....	78
b.	Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Monitoring.....	78
3.	Pelaksanaan Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2020-2023 .....	79
C.	Tahap Evaluasi .....	85
1.	Keterlibatan Aktor-Aktor dalam Ruang Publik .....	85
a.	Pemerintah Desa .....	85
b.	Masyarakat.....	86
2.	Layanan Pengaduan dan Tanggapan dalam Tahap Evaluasi .....	87
a.	Pelayanan Pengaduan.....	87
b.	Tanggapan.....	88
3.	Hambatan dan Tantangan dalam Tahap Evaluasi .....	89
a.	Hambatan dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	89

b. Tantangan yang Dihadapi .....	89
<b>BAB V DAMPAK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023 .....</b>	<b>95</b>
A. Partisipasi Aktif Masyarakat Desa Meteseh .....	95
1. Kegiatan Musyawarah .....	95
2. Partisipasi PKK.....	97
a. Program.....	97
b. Hasil Pokja.....	98
3. Partisipasi Karang Taruna.....	100
a. Program.....	100
b. Hasil Pokja.....	101
B. Pembangunan Infrastruktur.....	103
1. Pembangunan Jalan.....	103
a. Peningkatan Anggaran 2020-2023.....	104
b. Belanja Desa Meteseh.....	105
2. Pembangunan Bidang Pendidikan .....	106
a. TK Dharma Wanita.....	106
b. TK/PAUD An-Nur Meteseh .....	107
3. Pembangunan Bidang Ekonomi.....	110
a. Peternakan Kambing.....	110
b. Kampoeng Lawas.....	111
4. Pembangunan Bidang Kesehatan.....	113
a. PKD (Pos Kesehatan Desa) .....	113
b. Realisasi Anggaran Untuk Kesehatan.....	114
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan umur .....	29
Tabel 3.2 Jumlah penduduk laki dan perempuan .....	30
Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut pendidikan.....	31
Tabel 3.4 Pemeluk agama warga meteseh.....	32
Tabel 3.5 Mata pencaharian warga meteseh.....	32
Tabel 3.6 Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa meteseh .....	33
Tabel 3.7 Kategori kemiskinan.....	36
Tabel 3.8 Perangkat desa struktural kantor balai desa.....	39
Tabel 3.9 Badan permusyawaratan desa meteseh .....	41
Tabel 3.10 Daftar anggota LPMD .....	42
Tabel 3.11 Daftar anggota tim penggerak PKK .....	42
Tabel 3.12 Daftar RW desa meteseh .....	43
Tabel 3.13 Daftar RT desa meteseh.....	44
Tabel 3.14 Daftar kader posyandu.....	44
Tabel 3.15 Daftar sumber daya alam 2022.....	47
Tabel 4.1 Keuangan Desa Meteseh 2020 .....	70
Tabel 4.2 Keuangan Desa Meteseh 2021 .....	70
Tabel 4.3 Keuangan Desa Meteseh 2022 .....	71
Tabel 4.4 Keuangan Desa Meteseh 2023 .....	71
Tabel 4.5 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2020.....	79
Tabel 4.6 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2021.....	80
Tabel 4.7 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2022.....	81
Tabel 4.8 Pembangunan Desa Meteseh 2023 .....	82
Tabel 4.9 Perbandingan anggaran .....	84
Tabel 5.1 Daftar hadir tahun 2019-2023 .....	95
Tabel 5.2 Pembangunan infrastruktur tahun 2020-2023 .....	103
Tabel 5.3 Perhitungan pelaksanaan pembangunan 2020-2023 .....	105
Tabel 5.4 Anggaran belanja desa 2021.....	105
Tabel 5.5 Anggaran belanja desa 2023.....	106
Tabel 5.6 Indikator kesehatan desa meteseh .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Meteseh.....	29
Gambar 3.2 Merti desa pagelaran wayang kulit.....	34
Gambar 3.3 Pagelaran kuda lumping.....	35
Gambar 3.4 Kirab budaya.....	35
Gambar 3.5 Potensi genteng mantili.....	37
Gambar 3.6 Struktur organisasi perangkat desa 2023.....	39
Gambar 3.7 Wisata kampoeng lawas.....	49
Gambar 3.8 Wisata pasar kretan.....	49
Gambar 4.1 Musdus di Dusun Teseh dan Dusun Segrumung.....	62
Gambar 4.2 Musrenbangdes Balai Desa Meteseh.....	64
Gambar 4.3 Musdes di Balai Desa Meteseh.....	65
Gambar 4.4 FKM di rumah RT 01.....	67
Gambar 4.5 Pengecoran jalan Dusun Rowosari.....	76
Gambar 4.6 Pelayanan aduan desa meteseh.....	88
Gambar 5.1 Kegiatan pertemuan rutin bulanan PKK.....	99
Gambar 5.2 Kegiatan pembinaan dan evaluasi 10 program pokok PKK.....	99
Gambar 5.3 UMKM.....	99
Gambar 5.4 Instagram karang taruna.....	102
Gambar 5.5 Kampoeng lawas.....	102
Gambar 5.6 Pasar kretan (titik kumpul).....	102
Gambar 5.7 TK Dharma Wanita.....	107
Gambar 5.8 TK An-Nur.....	109
Gambar 5.9 Peternakan kambing Desa Meteseh.....	111
Gambar 5.10 Instagram kampoeng lawas.....	112
Gambar 5.11 Penyaluran PMT balita & kegiatan posyandu.....	116

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan usaha pertumbuhan dan rangkaian perubahan kearah yang lebih baik dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan perlu ditunjang manajemen yang baik, karena didalamnya terkandung unsur perencanaan yang telah terorganisasi. Pembangunan desa menjadi bagian penting dari pembangunan nasional karena membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Desa menjadi pusat perhatian pemerintah, adanya desa menjadi bagian integral dari NKRI (Nurcholis, 2011). Desa mempunyai posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat memastikan bahwa semua program pembangunan yang berasal dari pemerintah akan kembali ke desa. Melihat kondisi di Indonesia, lebih banyak jumlah desa dibandingkan kota. Dilihat dari data badan pusat statistik mencatat ada 83.794 desa/kelurahan di Indonesia pada 2022. Sedangkan data BPS terbaru hasil pendataan tahun 2018-2022 terdapat 98 kota di Indonesia. Kondisi tersebut sangat jelas jika desa harus menjadi perhatian khusus dalam pengembangan infrastruktur (BPS, 2022).

Dilansir dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT), pembangunan desa di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan. Menurut sumber menteri desa, terdapat 60% adanya aduan pembangunan infrastruktur belum merata mulai dari akses jalan rusak, jembatan rusak, dan belum tersedia penerangan jalan (Marwan, 2020). Menurut laporan aduan kementerian desa, banyak warga mengeluh soal pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, hal inilah yang perlu menjadi tinjauan pemerintah setempat. Salah satu contoh aduan datang dari seseorang berasal dari Desa Boyongsari, Sukabumi Jawa Barat yang mengeluh soal kondisi keadaan desa yang pembangunannya sangat tertinggal dibandingkan desa tetangganya (Kementerian desa, 2023).

Pada era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pelaksanaan pembangunan menjadi kunci utama dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan wilayah. Namun sering kali terjadi persoalan masih berkelanjutan tentang

pembangunan, salah satunya dipicu kurangnya keterlibatan masyarakat, tidak ada komunikasi dan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat. Serta tidak tersedianya forum musyawarah untuk menyampaikan aspirasi, bertukar pendapat dan diskusi. Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena di Indonesia menunjukkan masih adanya ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehubungan itu, masih banyak desa dalam proses musyawarah belum melibatkan masyarakat untuk berkontribusi baik pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sehingga kemungkinan besar proses musyawarah belum dilaksanakan sepenuhnya dan hanya sebatas formalitas. Pada tahap pembangunan yang terjadi di suatu desa jika tidak melibatkan masyarakat akibatnya pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, masih timbul pembangunan desa yang bersifat sentralis (sistem sentralistik), yang artinya pembangunan berada di tangan pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya dilakukan seragam padahal keadaan setiap desa berbeda-beda, hal inilah yang membuat suatu desa tidak dapat mengatur wilayahnya sesuai kehendak sendiri (Nurcholis, 2011).

Berkaitan dengan kondisi tersebut, demokrasi menjadi sangat penting karena merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia. Demokrasi yang terdapat di Indonesia lebih mementingkan musyawarah mufakat, hal itu dapat dilihat berdasarkan proses pengambilan keputusan baik dari desa hingga pusat. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Oleh karena itu, musyawarah dijadikan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak agar saling berdiskusi untuk mewujudkan keputusan yang baik dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Dengan adanya musyawarah telah membuktikan adanya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan saat ini sistem demokrasi menjadi sistem yang dipandang paling baik di dunia (Humaira, 2021).

Ada banyak sistem demokrasi yang dipakai di dunia ini. Salah satunya adalah demokrasi oleh Jurgen Habermas yaitu Demokrasi Deliberatif. Dalam konsep demokrasi deliberatif terkandung ruang publik yang memiliki peran penting dalam sebuah proses demokrasi di masyarakat, terutama dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Habermas, 1996). Karena demokrasi deliberatif menitikberatkan pada

musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, demokrasi deliberatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas keputusan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ruang publik menjadi syarat utama dalam demokrasi karena menjadi forum bagi warga negara untuk bisa bebas berpendapat secara terbuka dan transparan sehingga tidak ada intervensi oleh pemangku kepentingan di dalamnya (Askari, 2021). Demokrasi deliberatif memiliki konsep agar pejabat publik dan rakyat dapat bersama-sama berdeliberasi sebelum memberikan suara. Deliberasi politik dianggap sebagai suatu proses politisi yang menghasilkan jawaban dari isu dan solusi. Dengan kehadiran praktik deliberasi politik dapat memberi solusi bagi masalah sosial yang timbul dengan melibatkan semua warga.

Manifestasi demokrasi deliberatif di Indonesia setidaknya ada dua hal. Pertama, hukum di Indonesia memposisikan masyarakat secara sama, tidak ada hak istimewa bagi kalangan tertentu di depan hukum. Kedua, masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim, didalam Islam persamaan merupakan doktrin yang amat fundamental atau hal yang mendasar. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam menaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka hukum. Islam tidak mengistimewakan seseorang dalam menjalankan hak-haknya, islam tidak menjadikan kedudukan, jabatan atau keistimewaan apapun terhadap kelompok tertentu. Setiap pemimpin yang mendapat kepercayaan mengurus umat berkewajiban untuk memberikan hak umat tersebut (Asyari Muthhar, 2020). Mengenai persoalan diatas, demokrasi deliberatif menitikberatkan pada musyawarah, sementara itu musyawarah di Indonesia menjadi dasar negara yang terdapat dalam Pancasila sila ke empat berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan". Penerapan demokrasi deliberatif dalam pembangunan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Jadi, dalam proses musyawarah penyusunan peraturan desa, perlu adanya penerapan demokrasi deliberatif.

Desa Meteseh merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang menjadi desa terluas dengan luas wilayah 7,55 Km<sup>2</sup> (11,78% dari luas wilayah Kecamatan Boja) dan cukup padat penduduk terdapat 11.566 jiwa

dengan memiliki delapan dusun. Desa Meteseh termasuk desa maju dengan skala 0,7378 di tahun 2023 menurut indeks desa membangun di Kabupaten Kendal (BPS, 2023). Desa Meteseh menjadi wilayah yang mengalami perkembangan cukup meningkat pesat, karena letaknya strategis berada tidak jauh dari Kota Semarang dan kawasan industri BSB. Adanya pengaruh aktivitas perkotaan Kota Semarang menyebabkan pembangunannya menjalar hingga ke Desa Meteseh salah satunya maraknya pembangunan perumahan bersubsidi. Aktivitas pembangunan di desa Meteseh memiliki potensi yang besar, salah satunya karena tidak rawan banjir dan memiliki potensi desa wisata yaitu wisata kampoeng lawas dan pasar karetan (titik kumpul). Selain itu, Desa Meteseh memperoleh penghargaan sebagai Desa Binaan juara 2 tingkat Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebagai rumah sehat meliputi administrasi pkk dan 10 program pokok pkk dilapangan. Menurut definisinya desa binaan merupakan suatu program pembangunan masyarakat dengan target lokasi sebuah desa yang memenuhi kriteria untuk menjadi sebuah desa binaan dengan mengembangkannya menjadi pilihan tepat dan strategis untuk kepentingan pembangunan nasional (Desa Meteseh, 2023).

Berdasarkan survei pendahuluan, peneliti menemukan bahwa Desa Meteseh sering menggelar musyawarah dalam proses pembangunan dengan menyerap aspirasi, bertukar gagasan dan diskusi yang ditindaklanjuti dengan proses negosiasi dan adu pendapat. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Pak Abdullah sebagai warga meteseh beliau memberi pernyataan bahwa Desa Meteseh telah menggelar beberapa kali musyawarah desa untuk membahas pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Bu Suyatini sebagai warga meteseh, beliau menyampaikan pada proses musyawarah Desa Meteseh melibatkan hampir seluruh masyarakat seperti RT/RW, BPD, PKK, pokdarwis, karang taruna, posyandu dan kelompok tani. Sehubungan dengan itu, telah tercantum pada berita acara musbangdes terkait unsur masyarakat yang terlibat dalam musyawarah. Hal tersebut menggambarkan masih ada sebuah desa dalam penyelenggaraan musyawarah bukan hanya sekedar formalitas.

Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperluas layanan infrastruktur, terutama dalam bidang sarana transportasi masyarakat. Sarana

transportasi yang kurang memadai dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan atau peningkatan sarana infrastruktur selalu menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan atau kemajuan sebuah desa karena dapat mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur Desa Meteseh terus dilakukan di setiap tahunnya, beberapa infrastruktur di Desa Meteseh diantaranya pembangunan jalan berupa pengecoran jalan dan betonisasi, pembangunan talud dan pembangunan jembatan. Setiap tahunnya pembangunan berangsur terealisasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di sekitar Kecamatan Boja seperti Desa Trisobo, Desa Tampingan dan Desa Campurejo maka Desa Meteseh menjadi desa terluas yang memanjang dari batas wilayah barat kecamatan boja sampai dengan wilayah sebelah timur kecamatan boja. Hal tersebut menjadi perhatian karena walaupun mempunyai wilayah yang luas dan padat penduduk, namun tetap dapat menyelenggarakan proses musyawarah dengan melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat, keadaan inilah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan Desa Meteseh dipilih sebagai objek penelitian karena adanya praktik yang mengacu pada praktik deliberatif. Berdasarkan pemaparan diatas, signifikansi dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan dan melihat bagaimana dampak dari demokrasi deliberatif dalam pembangunan tersebut.

Studi mengenai demokrasi deliberatif sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya, telah dilakukan oleh Riza Safriya Hastika (2022) berjudul "Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022". Selanjutnya dilakukan oleh Nurfatiha Alkofifah Baharuddin (2021) dengan judul "Analisis Kebijakan Deliberatif terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu". Dari dua penelitian tersebut maka letak penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya, dimana hanya fokus pada praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur desa meteseh tahun 2020-2023.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh tahun 2020-2023?
2. Bagaimana dampak demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh tahun 2020-2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh tahun 2020-2023
2. Untuk mengetahui dampak demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di Desa Meteseh tahun 2020-2023

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a Pada hasil kajian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan terkait demokrasi deliberatif dalam pembangunan
- b Hasil penelitian ini peneliti berharap bisa membantu dalam memberi berbagai informasi bagaimana praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di desa meteseh
- c Memperbanyak literatur dan menambah pengetahuan untuk mahasiswa ilmu politik serta dapat menyalurkan pemahaman dan intelektual bagi mahasiswa di bidang akademis.

### **2. Manfaat Praktis**

- a Agar dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa dalam memahami praktik demokrasi deliberatif terjadi di tingkat desa
- b Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu dan menjelaskan dalam memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pemerintah terutama mengenai dampak demokrasi deliberatif dalam pembangunan desa
- c Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Demokrasi Deliberatif Secara Umum**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Sampe, Caroline Betzy Horopue, Neni Kumayas (2023). Berjudul “Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara”. Penelitian ini dilatar belakangi dari peraturan yang ada di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang hanya sebatas peraturan desa tentang Anggaran Dana Desa. Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Dimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa sangat minim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gusti Intan Sari (2021) berjudul "Proses Demokrasi Deliberatif di Forum Ruang Publik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Masa Pandemic Covid-19 di Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kota Tahun 2021". Penelitian ini berfokus pada musyawarah perencanaan pembangunan, acara forum ruang publik yang dilakukan secara online melalui moom meeting dan PPKM dan WFH di wilayah Desa dan Kelurahan. Namun, musyawarah rencana pembangunan hanya diikuti oleh beberapa perwakilan dari aparat desa. Akibatnya, kelompok marginal jarang terlibat dalam forum musyawarah terkait perencanaan dan pembangunan kecamatan dan perwakilan masyarakat desa hanya sedikit yang terlibat. Penelitian menunjukkan jika proses demokrasi deliberatif terjadi di forum musrenbang ruang publik selama pandemi COVID-19 di Desa Jawa. Tetapi proses demokrasi deliberatif masih terlaksana di forum tersebut, terlihat usulan masyarakat terangkum dalam musrenbangdes guna menyusun rencana pembangunan hingga ke musrenbang tingkat kecamatan. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,

pengumpulannya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisisnya dilakukan melalui metode Miles dan Huberman.

Penelitian yang dilakukan oleh Aidinil Zetra, Ria Ariany dan Yuyut Chandra (2018). Penelitian dengan judul "Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok)" membahas konsep demokrasi deliberatif, yang bertujuan untuk menggunakan diskusi argumentatif untuk mengubah kebijakan pemerintah. Institusi yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Solok berusaha secara aktif membantu pemerintah Kota Solok dalam pembuatan kebijakan publik melalui diskusi argumentatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana demokrasi deliberatif diterapkan dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini melihat bagaimana LKAAM Kota Solok menerapkan prinsip ini, yang merupakan keinginan masyarakat adat, yang memungkinkan pemimpin adat untuk menyelaraskan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memperoleh data dari masyarakat melalui kesepakatan bersama. LKAAM Kota Solok berperan dalam mengkritisi kebijakan dari pemerintah kota solok.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Muzaqqi (2013) yang disebut sebagai "Deliberatif Politik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Struktur dan Arti Atas PP RI No. 28/ 2008". Fokus penelitian ini untuk memeriksa dua landasan hukum dari perspektif teori dan praktik demokrasi deliberatif. Dalam penelitian itu, ditemukan bahwa Musrenbang masih memiliki sifat top-down, yang mencakup penyusunan perencanaan awal, pengendalian dan evaluasi yang semuanya masih sangat rumit. Rencana awal perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) disusun oleh Bappeda dan diawasi oleh bupati seta walikota yang didukung oleh Bappeda, sebagai pejabat dari kementerian dalam negeri. Masyarakat terlibat di setiap tahap, tetapi biasanya hanya memberikan masukan. Sementara itu, para pejabat di setiap pemerintahan mempunyai otoritas tertinggi dalam hal evaluasi. Karena standar akurasi informasi ditentukan oleh pemerintah, masyarakat tidak dapat melakukan evaluasi kecuali mereka memiliki data yang akurat. Akibatnya, masyarakat akan sulit mengevaluasi rencana yang telah dibuat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kusuma (2012). Berjudul "Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus "Forum Konstituen" di

Kabupaten Bandung" (FKKB). Untuk meningkatkan demokratisasi di daerah, FKKB memanfaatkan rekrutmen elit politik menjelang pemilihan dan membangun hubungan yang adil dan kuat antara masyarakat, politisi dan pemerintah daerah sebelum pemilihan atau setelah pemilihan. Peserta FKKB biasanya berkomunikasi secara informal kecuali dalam kasus-kasus penting politik seperti Musrenbang atau LKPJ Bupati. Fokus FKKB terutama pada masalah yang muncul sebagai hasil dari banyak percakapan dan diskusi yang mereka lakukan sebelum pemilihan kepala daerah dan selama proses rekomendasi penyusunan FKKB untuk perumusan RPJMD 2010-2015.

## **2. Demokrasi Deliberatif di Desa**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riza Safriya Hastika, dkk (2022) yang berjudul "Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022" menjelaskan pelaksanaan Musrenbang Desa Pengujan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terkait pemerintahan desa yang mengatur bahwa pelaksanaan Musrenbang harus sesuai dengan potensi desa, Desa Namun tingkat partisipasi masyarakat secara umum belum tinggi karena beberapa faktor antara lain kejenuhan masyarakat karena aspirasi sebelumnya belum terpenuhi, aktivitas nelayan yang pekerjaannya jam tidak dapat dipastikan karena perubahan kondisi laut, dan informasi diskusi di tingkat desa dan desa belum terdistribusi secara merata kepada semua orang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Rafinzar, Kismartini, dan Retno Sunu Astuti (2021). Dengan judul "Demokratik Terbuka Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)". Penelitian dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Peneliti menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Konsep deliberative democracy dihasilkan dari hasil penelitian tapi tidak diterapkan dengan baik dalam musrenbangdes. Hal ini disebabkan oleh kendala yang masih ada dalam proses pelaporan dan implementasi usulan hasil musrenbang. Selain itu, ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi democracia, yang mengutamakan keterlibatan masyarakat yang optimal dalam proses musrenbang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurfatihah Alkofifah Baharuddin (2021) dengan judul "Analisis Kebijakan Deliberatif terhadap Partisipasi Masyarakat dalam

Perencanaan Pembangunan di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu", pembangunan telah terlaksana sesuai dengan analisis kebijakan deliberatif karena masyarakat secara deliberatif berbicara dan berkolaborasi bersama pemerintah. Desa Carawali mempunyai tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dari aspek sumber daya dan sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengakui bahwa mereka sendiri yang menikmati hasil kebijakan. Pemerintah desa Carawali memiliki kemampuan untuk mewujudkan aspirasi dan usulan masyarakat sebagai sarana untuk mempertimbangkan pelaksanaan rencana pembangunan serta untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perencanaan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Rafinzar *dkk* (2018) dengan judul penelitian "Demokrasi Deliberatif in Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)," proses musyawarah desa menunjukkan apakah proses koordinasi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan daerah berhasil atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip deliberative democracy tidak diterapkan dengan baik dalam musrenbangdes. Ini karena masih ada masalah dalam melaporkan dan menerapkan usulan hasil musrenbang. Selain itu, ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi demokratis, yang mengutamakan keterlibatan masyarakat yang optimal dalam proses musrenbang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Sudana dan I Nyoman Wiratmaja (2018) berjudul "Optimalisasi Budaya Demokrasi Deliberatif dalam Upaya Mewujudkan Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa (Studi di Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar)," peneliti mengatakan bahwa pelaksanaan musrenbangdes telah berjalan baik serta dinamis karena semua warga aktif dan sering memberikan masukan dan saran pada program. Menurut Iwayan (2018), kontribusi warga yang dapat diberikan untuk mensukseskan program Desa berupa gagasan, diikuti oleh kontribusi tenaga. Di Desa Sukawati, budaya demokrasi deliberatif telah berjalan dengan baik sebagai upaya mewujudkan perencanaan partisipatif, tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas proses.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data lapangan, dimana peneliti melakukan penelitian langsung untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Peneliti mengajukan pertanyaan umum dan lugas kepada narasumber yang telah dahulu ditentukan dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, informasi dikumpulkan dalam bentuk teks dan kata-kata kemudian, kumpulan informasi ini dianalisis. Strategi yang digunakan dari analisis kualitatif yakni memperluas dan menguraikan pernyataan yang telah dijelaskan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2014), pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengamati secara menyeluruh objek melalui pengumpulan informasi melalui banyaknya metode pengumpulan data. Melalui pendekatan ini peneliti mengkaji secara menyeluruh masalah teoritis sambil menggabungkan informasi lapangan dan kesimpulan mereka dengan data lapangan yang mereka peroleh selama proses penelitian.

### **2. Sumber Data dan Jenis Data**

#### **a) Data primer**

Sumber data primer berasal dari data yang didapatkan langsung dari narasumber atau informan di lapangan disebut sebagai sumber data primer (Rahmadi, 2011). Selanjutnya, sumber data utama penelitian ini berasal dari wawancara dengan kepala desa meteseh, sekretaris desa meteseh, perangkat desa meteseh, BPD, RT/RW, masyarakat Desa Meteseh termasuk PKK, posyandu, kelompok tani dan karang taruna.

b) Data sekunder

Sumber data yang didapatkan dilengkapi dan diperoleh dari sumber yang dibuat oleh peneliti sebelumnya atau tidak berasal dari data lapangan, disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder termasuk jurnal penelitian, buku dan artikel yang mencakup topik penelitian yang relevan. Data sekunder digunakan untuk menjadi pendukung data primer dan pelengkap supaya data yang diperoleh lebih akurat. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan pada penelitian berupa dokumen RPJMdes tahun 2020-2026, notulensi musyawarah, daftar hadir kegiatan musyawarah dan RKPDes tahun 2020-2023. Data ini dikumpulkan oleh peneliti dari banyak sumber mulai dari website, foto dan dokumen.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a) Observasi

Menurut Arikunto (2013), observasi dapat dilakukan melalui pengamatan mendalam dan pencatatan yang sistematis. Peneliti langsung ke lokasi Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, untuk mengetahui objek dan subjek penelitian berulang kali. Keadaan desa, lingkungan, hubungan masyarakat desa meteseh dengan pemerintah desa meteseh, komunikasi politik kepala desa dengan perangkat desa, status tata kelola infrastruktur dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga desa, kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan proses partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa adalah topik penelitian ini. Observasi dilakukan didukung oleh data primer atau sekunder dalam melaksanakan penelitian Desa Meteseh.

b) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang terkandung pada penelitian dilakukan secara lisan dan dua orang berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung untuk mendengarkan informasi (Bungin, 2015). Untuk mendapatkan informasi, pendapat, dan fakta tentang praktik musyawarah desa dan bagaimana hal itu berdampak pada pengembangan deliberasi politik di desa Meteseh, peneliti mewawancarai narasumber secara langsung di rumah atau tempat kerja mereka. Penelitian ini mewawancarai kepala desa meteseh, perangkat desa meteseh, BPD, RT/RW dan warga

desa meteseh termasuk PKK, posyandu, pemuda karang taruna, kelompok tani dan kelompok buruh.

c) Dokumentasi

Dalam dokumentasi menggunakan data sekunder untuk mendapatkan informasi yang relevan (Arikunto, 2013). Tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk memberikan informasi dalam bentuk foto, peta, surat, buku catatan, arsip foto, hasil rapat, dan jurnal kegiatan yang dilakukan selama observasi lapangan sebagai bukti kebenaran dan keabsahan data yang ditemukan. Misalnya, studi dokumentasi, yang mencakup rencana dari kegiatan pemerintah desa dan hasil notulensi musyawarah desa Meteseh, dapat membantu peneliti menganalisis data yang didapatkan terkait dengan subjek penelitian. Data yang dihasilkan melalui dokumentasi berupa RPJMDes tahun 2020-2026, RKPDes tahun 2020-2023, foto notulensi musyawarah, daftar hadir masyarakat, foto kegiatan musyawarah, foto pembangunan infrastruktur yang teralisasi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

a) Reduksi data

Setelah data di lapangan dikumpulkan dan dianalisis, proses klasifikasi reduksi data dilakukan untuk menghasilkan gambaran lebih baik. Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal penting, fokus pada masalah, menemukan tema dan pola. Tujuan mereduksi data adalah untuk membuat data yang sudah dikumpulkan dari lapangan lebih mudah dipahami. Kemudian, data ditulis dengan rinci secara singkat, berfokus pada permasalahan agar sesuai dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2010).

b) Penyajian data

Setelah data direduksi, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya

analisis kualitatif yang valid dan handal. Pada tahap ini peneliti memaparkan kembali kepada mereka dalam wujud penyajian data untuk mengkonfirmasi data tersebut. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif yaitu menjadi penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang temuan penelitian berdasarkan pola hubungannya.

c) Penarikan kesimpulan

Setelah peneliti melakukan verifikasi lebih lanjut, proses penarikan kesimpulan dimulai. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif terjadi sepanjang proses penelitian supaya menunjukkan keinginan kuat untuk memahami atau mendapatkan gambaran secara umum mengenai penerapan praktik demokrasi deliberatif di desa meteseh serta dampaknya untuk pembangunan infrastruktur.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diisi latar belakang yang dikaji oleh peneliti terkait praktik demokrasi deliberatif dan dampaknya terhadap pembangunan desa meteseh, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sebagai sumber rujukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus, metode analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan mencakup penjelasan menyeluruh tentang topik penelitian dari bab pertama hingga bab terakhir.

### **BAB II : KERANGKA TEORI PENELITIAN**

Bab ini memberikan penjelasan kerangka teori demokrasi deliberatif mengacu pada konsep ruang publik dari Jurgen Habermas untuk menunjang penelitian, di dalam bab ini diawali dari penjelasan mengenai pemahaman demokrasi, pemahaman deliberasi, pemahaman ruang publik, pemahaman demokrasi deliberatif, pemahaman demokrasi deliberatif di Indonesia dan prinsip-prinsip demokrasi.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan gambaran umum objek yang diteliti yaitu profil Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Meliputi sejarah Desa Meteseh, jumlah

penduduk, serta kondisi geografis dan demografisnya, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi dan kondisi pemerintah desa meteseh dan potensi yang dimiliki desa Meteseh.

#### **BAB IV : PRAKTIK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023**

Bab ini menjelaskan tentang praktik demokrasi deliberatif yang dilaksanakan di desa meteseh meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan tahap evaluasi dengan melibatkan elemen masyarakat dalam setiap proses pembangunan serta menyediakan ruang publik sebagai forum untuk menyapaikan aspirasi, negosiasi dan mengelola perbedaan pendapat sebagai upaya pengambilan keputusan bersama.

#### **BAB V : DAMPAK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023**

Bab ini berisi dampak dari demokrasi deliberatif terhadap pembangunan infrastruktur di desa meteseh. Dampaknya pada pembangunan fisik meliputi pembangunan jalan, pembangunan talud, perbaikan gorong-gorong. Dan pembangunan non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, bidang pendidikan, pendidikan ekonomi.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, mencakup kesimpulan dari hasil jawaban bab 4 dan bab 5.

## **BAB II**

### **DEMOKRASI DELIBERATIF**

Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan sebuah kerangka teori untuk mempermudah penyusunan penelitian perlu adanya penyesuaian antara konsep di lapangan dengan teori yang akan di gunakan maka kerangka teori dibutuhkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil teori yang ada kaitanya dengan masalah yang akan penulis teliti. Penelitian ini mengkaji Demokrasi Deliberatif di Tingkat Desa (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif Terhadap Pembangunan Desa Meteseh) Tahun 2020-2023. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif yang mengacu pada konsep ruang publik Jurgen Habermas yang dijadikan sebagai kerangka teori dalam kajian ini dan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini.

#### **A. Memahami Demokrasi**

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (demos). Berdasarkan konsep demokrasi, kekuasaan membuktikan arti pemerintahan dan politik, sedangkan masyarakat diartikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif dan tidak rakyat secara keseluruhan, melainkan hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi maupun kesepakatan formal untuk mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan sehingga dapat mengklaim kepemilikan berdasarkan hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki kaitan dengan urusan pemerintahan (Wiranggani,2017:26). Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di beberapa negara dan termasuk Indonesia. Ciri-ciri negara yang menganut demokrasi yaitu adanya persamaan hak bagi semua warga negara, kebebasan media dan pers, serta pemilihan umum secara langsung, sehingga pemerintahan terdapat pada setiap tangan rakyat (Humaira,2021:3).

Sistem pemerintahan demokrasi terdapat dua bentuk yaitu demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi yang setiap rakyatnya memberikan pendapat secara langsung untuk menentukan keputusan serta memberikan suara, setiap rakyat mewakilkan dirinya sendiri untuk memilih

kebijakan sehingga rakyat memberikan pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi (Humaira,2021:4). Sistem demokrasi langsung telah digunakan pada awal terbentuknya demokrasi di Athena ketika terjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga seluruh rakyat harus berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sekarang ini, sistem demokrasi langsung menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi dalam suatu negara cukup besar dan untuk mengumpulkan seluruh rakyat pada suatu forum adalah salah satu hal yang sulit, pada demokrasi langsung menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk memberikan partisipasinya secara penuh (Humaira,2021:4).

Banyaknya kekurangan demokrasi langsung ini apabila dianut di masa modern saat ini, salah satunya waktu dan biaya anggaran yang cukup mahal atau tinggi, sering mengakibatkan konflik sosial horizontal yang terjadi di masyarakat dikarenakan elit politik yang tidak memperdulikan, dan sulitnya diterapkan pada negara yang memiliki warga negara cukup banyak. Demokrasi tidak langsung merupakan salah satu konsep demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan, corak pemerintahannya dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat serta memiliki tanggung jawab pada rakyat. Penerapan demokrasi tidak langsung dilaksanakan oleh suatu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak, wilayahnya luas serta permasalahan yang kompleks (Humaira,2021:5).

Demokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan sejahtera, adil, makmur yang mementingkan kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Dalam konsepnya, demokrasi memiliki tujuan untuk menjalani kehidupan negara harus meliputi kebebasan berpendapat, dapat mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan ketertiban bersama dan keamanan, serta menyadarkan masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan (Humaira,2021:6).

Konsep demokrasi yang terdapat di Indonesia adalah demokrasi pancasila dan memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara pancasila yaitu terdapat mufakat dan musyawarah. Musyawarah berlandaskan pada sila keempat pancasila, musyawarah adalah salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal oleh semua daerah di Indonesia, meskipun istilah muyawarrah berbeda-beda namun tidak salah jika

musyawarah dijadikan sebagai pondasi utama dari demokrasi pancasila (Humaira,2021:7).

Musyawarah dijadikan sebagai proses mempertemukan seluruh pihak untuk membahas rencana, adalah hal yang ideal untuk mewujudkan keputusan yang baik dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Demokrasi yang terdapat di Indonesia lebih mementingkan musyawarah mufakat, hal itu dapat dilihat berdasarkan proses pengambilan keputusan baik dari desa hingga pusat, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat bukan mayoritas. Adanya musyawarah inilah telah membuktikan adanya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintah, saat ini sistem demokrasi adalah sistem yang dipandang paling baik di dunia, hal itu disebabkan sistem demokrasi hampir sebagai asas fundamental untuk memfasilitasi peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan (Humaira, 2021:7-8).

### **1. Prinsip-Prinsip Demokrasi**

- a Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu yang bebas dan adil dengan hak pilih yang universal dan sama, terbuka untuk semua pihak, dilakukan secara rahasia, dipantau oleh otoritas pemilu yang independen, dan bebas dari penipuan dan intimidasi.
- b Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- c Hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
- d Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas.

- e Hak setiap orang atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat, termasuk untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik mereka sendiri, kelompok-kelompok sipil, serikat buruh atau organisasi lainnya dengan jaminan hukum yang diperlukan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara bebas atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.

## **2. Memahami Deliberasi**

Deliberasi adalah jantung demokrasi deliberatif. Istilah “deliberasi” berasal dari kata “*deliberatio*” (bahasa Latin), kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kata “*deliberation*”, yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah (Hardiman, 2009: 126). Bentuk deliberasi dalam demokrasi deliberatif dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dialog warga, diskusi deliberatif, dan pengambilan keputusan deliberatif (Morrell, 2005: 55). Menurut jurnal demokrasi deliberatif dalam open government studi menjabarkan Pertama, dialog warga (*civic dialogue*), bertujuan mengajak pihak-pihak terkait yang heterogen guna memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang orang-orang dari beragam latar belakang di komunitas yang sama demi mencapai *civic engagement* (keterlibatan warga). Kedua, diskusi deliberatif (*deliberative discussion*), bertujuan membangun diskusi seksama dengan informasi yang memadai di antara warga tentang isu-isu yang dianggap penting, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*), sebuah tahap di mana peserta dialog membuat keputusan, meskipun itu tidak selalu harus berupa konsensus.

Deliberasi adalah proses mempertimbangkan berbagai pilihan dengan cermat dan melibatkan semua pihak. Dianggap sebagai model demokrasi yang menghasilkan aturan hukum yang dilegitimasi oleh proses deliberasi yang baik, bukan hanya di lembaga formal negara tetapi juga seluruh masyarakat sehingga keputusan politik dapat diterima dan diikat oleh semua orang (Habermas, 1992). Keputusan politik ini dihasilkan dari proses dialog yang berjalan menuju parlemen melalui proses konstitusional dan demokratik (Habermas, 1992).

## **B. Memahami Demokrasi Deliberatif**

### **1. Konsep Ruang Publik Jürgen Habermas**

Pada mulanya, konsep ruang publik adalah suatu wilayah yang muncul pada ruang masyarakat borjuis, ruang yang memerantarai masyarakat sipil dengan negara, dimana publik mengorganisir dirinya dan dimana opini publik dapat dibangun. Kategori ruang publik semacam ini dapat ditemui dalam realitas sejarah masyarakat Inggris dan Prancis pada pertengahan abad ke-17, dimana kedai-kedai kopi menjadi pusat kritik yang di dalamnya mulai muncul kelompok baru di antara para intelektual borjuis dan masyarakat aristokrat melahirkan sebuah kelompok terdidik yang memiliki kesamaan dalam cara pola berpikir. Konsep ruang publik memasuki dimensi baru dengan mulai memudarnya kelompok borjuis dalam konteks masyarakat industri yang makin maju dan munculnya demokrasi massa (Habermas, 2010).

Ruang publik merupakan syarat penting dalam berdemokrasi, ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah warga negara dimana dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya, karena ruang publik juga merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat.

Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela), publisitas (media massa, institusi-institusi kultural), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang publik tidak hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak memiliki batasan, karena ruang publik dapat berada di mana saja. Jika ada masyarakat yang berkumpul bersama dan berdiskusi tentang topik atau tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat

dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.

Ruang publik dipahami sebagai ruang privat yang datang bersama sama dengan publik. Ruang tersebut dianggap sebagai milik publik yang tidak diatur oleh negara sebagai bentuk kewenangan publik. Maka definisi tersebut tidak hanya dalam arti politik, namun juga ekonomi, sosial, dan budaya. Ruang publik merupakan pengejawantahan rasionalitas publik dalam ruang-ruang artikulasi yang tersedia di masyarakat Habermas (2010:41).

Dalam bidang politik, ruang publik dipandang sebagai bagian dalam representasi politik. Habermas menyebut fungsi politik ruang publik bermakna menjadi arena bagi subjek-subjek politik untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya (Habermas, 2010:81). Ruang publik dapat dipahami sebagai artikulasi kepentingan politik. Dalam masyarakat otoritarian, ruang publik menjadi lokasi bagi kekuatan politik yang termajinalkan untuk menyuarakan aspirasi serta menggalang dukungan guna berkontestasi dengan kekuatan status quo.

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik telah menggantikan keberadaan media konvensional. Kehadiran media sosial menjadikan ruang privat dan publik menjadi tersamarkan. Media sosial menjadi tempat menyalurkan berbagai kepentingan termasuk dalam bidang politik. Sebagaimana konsep Habermas yang menyatakan bahwa ruang publik secara politis dikonsepsikan sebagai sebuah sistem yang merefleksikan maknanya secara spontan sebagai sebuah kemungkinan terbuka bagi siapa saja untuk terlibat didalamnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi individu untuk melahirkan kebebasan. Pengguna media sosial dapat menginformasikan berbagai kegiatan yang dia lakukan maupun yang dilakukan oleh orang lain. Pengguna juga dapat melakukan liputan secara langsung layaknya seorang jurnalis profesional. Saat ini media sosial merupakan perwujudan konsep ruang publik digital yang dimanfaatkan oleh semua orang termasuk aktor dan elit politik dalam membangun dan menjaga konstituennya.

Hampir semua elit politik memanfaatkan media sosial untuk mensosialisasikan program dan kegiatannya. Seorang elit politik bisa langsung terhubung dengan

masyarakat dan konstituennya. Masyarakat pun dapat langsung merespon apa yang diposting oleh elit tersebut. Media sosial kini menjadi ruang terbuka digital yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat. (Ernst, J Frankfurt, 1988 oleh Kompasiana)

## **2. Latar Belakang Demokrasi Deliberatif**

Demokrasi deliberatif diperkenalkan oleh Jurgen Habermas yang lahir pada 18 Juni 1927 di Dusseldorf, Mazhab Frankfurt Jerman. Demokrasi deliberatif masih menjadi tema besar yang berpotensi diaplikasikan sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, tidak ada definisi baku untuk menjelaskan demokrasi deliberatif. Demokrasi bersifat deliberatif karena proses sebuah kebijakan publik lebih dahulu diuji melalui konsultasi publik disebut diskursus publik. Demokrasi deliberatif yang ditawarkan Jurgen Habermas menjadi sumbangan pemikiran yang bisa dipertimbangkan untuk menyelesaikan persoalan demokrasi saat ini. Hal ini bahwa demokrasi deliberatif mensyaratkan adanya komunikasi antara masyarakat dan negara yang diistilahkan dengan ruang publik (*public sphere*). Demokrasi deliberatif sebagaimana sudah dipaparkan di atas, menekankan proses komunikasi dalam “ruang publik”. Menurut Habermas, secara historis ruang publik pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-18 yang sejalan dengan berkembangnya kapitalisme dan munculnya kelas borjuis. Jadi, ada proses-proses diskursif yang terbangun, sehingga ruang publik didefinisikan sebagai tempat bagi publik untuk mengekspresikan kebebasan dan otonomi mereka. Menurut Eep Saifulloh Fatah, ruang publik bisa berbentuk kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum. Adapun di sini, demokrasi deliberatif dimaknai sebagai suatu proses pengambilan keputusan publik melalui deliberasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membahas persoalan-persoalan bersama di ruang publik (Haliim, 2016).

Beberapa syarat menurut Habermas untuk sebuah ruang publik ideal, yang terdiri atas: (1) pembentukan opini yang bebas; (2) semua warga negara memiliki akses; (3) pertemuan dengan cara yang tidak dibatasi (berdasarkan atas prinsip kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat)

tentang hal-hal yang menjadi kepentingan umum, yang menyiratkan kebebasan dari kontrol ekonomi dan politik; dan (4) debat tentang aturan umum yang mengatur hubungan bersama (Habermas, 1989: 27). Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis dan secara bersama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Berbeda dengan teori demokrasi liberal yang menggunakan pemungutan suara sebagai institusi utama untuk mengidentifikasi dan menggabungkan preferensi masyarakat, demokrasi deliberatif lebih menekankan musyawarah dikalangan masyarakat sebagai sumber legitimasi pembuatan keputusan atau undang-undang (Mansbridge, 1980)

Dalam beberapa buku karya Habermas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa Habermas menempatkan demokrasi dan ruang publik sebagai model pragmatis yang mau tidak mau harus berakar pada sistem nilai rasio komunikasi dalam masyarakat karena model ini berhubungan dengan ruang publik secara komunikatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu disikusi dengan pertimbangan yang rasional. Habermas menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui berbagai macam diskursus.

Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi bagus antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Inilah yang dalam teori Jurgen Habermas disebut dengan Demokrasi Deliberatif. Teori ini berakar dalam teori tindakan komunikatif. Menurut Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia. Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik. Demokrasi Deliberatif mendekati situasi pembicaraan ideal bila berikut inklusif, bebas paksaan, terbuka dan simetris. Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara, di mana setiap individu diberi ruang

untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.

Dalam teori diskursus demokrasi deliberatif, ide ini didefinisikan sebagai diskusi praktis, pembentukan pendapat, dan tujuan politik. Teori demokrasi deliberatif tidak berfokus pada membuat daftar aturan yang memberitau bahwa warga negara yang harus melakukan, tetapi pada proses membuat aturan tersebut. Menurut model ini, diskusi publik atau konsultasi publik bersama dengan keberadaan "ruang publik", harus dilakukan sebelum pengujian kebijakan publik. Dalam proses membuat kebijakan publik, Habermas ingin memberi masyarakat lebih banyak ruang. Habermas tidak memaksudkan "ruang publik" hanya sebagai forum di mana orang dapat berbicara tentang kebijakan publik. Dia melihat ruang publik sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan konstituen untuk berbicara untuk kepentingan publik dalam pembuatan kebijakan publik.

### **3. Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia**

Kultur dan struktur hukum Indonesia masih lemah, begitu kata banyak kalangan dikala memotret fenomena pelanggaran hukum yang kian semarak di negeri ini, sehingga konstruk hukum Indonesia tidak kokoh dan legitimate. Menurut Habermas, inilah yang membuat hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah dibayangkan Habermas, adalah hukum yang sangat ambigu, karena rentan terhadap pengaruh lobby dan rekayasa tingkat tinggi oleh kekuasaan tentunya. Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana negara demokrasi lainnya, menganut sistem separation of power atau pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan sistem demikian dimungkinkan adanya checks and balances antar kekuasaan tersebut dan konsentrasi kekuasaan dapat dicegah. Tetapi yang masih sulit dijamin dalam sistem itu adalah sejauh mana interaksi politik antar lembaga tinggi itu terpengaruh oleh arus besar suara rakyat alias apakah rakyat mempunyai akses yang cukup untuk turut meramalkan dinamika diskursus yang sedang digagas oleh ketiga pemegang kekuasaan itu

Dengan menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-

diskursus. dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan atau hukum yang akan dibentuk dipengaruhi oleh diskursus-diskursus yang menerus di dalam masyarakat. Di samping kekuatan negara dan kekuatan kapital terbentuk kekuasaan komunikatif melalui jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat sipil. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil dimainkan melalui media, pers, LSM, organisasi massa dan lembaga lain dalam posisi mengepung sistem politik, sehingga negara dan perangkat kekuasaannya terpaksa responsif terhadap diskursus masyarakat sipil. Sebaliknya masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan komunikatifnya karena dalam negara hukum demokratis kebebasannya untuk menyatakan pendapat terlindungi. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak menguasai sistem politik, namun dapat mempengaruhi keputusan.

Selanjutnya, kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya delapan kondisi, yaitu: 1). kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, 2). kebebasan mengungkapkan pendapat 3). hal untuk memilih pemilihan umum, 4). hak untuk menduduki jabatan publik, 5). hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara, 6). tersedianya sumber-sumber informasi, 7). terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan 8). adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara pada pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Maka sumbangan Habermas dalam pembangunan sistem politik dan pemerintahan Indonesia pasca orde baru menemukan titik signifikansinya, khususnya dalam upaya melakukan reformasi hukum yang sangat penting untuk mengokohkan pilar-pilar demokrasi di negeri ini. Untuk selanjutnya akan dibahas bagaimana mengontrol kekuasaan melalui pembentukan ruang publik (*public sphere*), sehingga masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan diskursif dalam posisinya sebagai oposisi atas kekuasaan yang ada. Modal awal dari pengejawantahan demokrasi deliberatif di Indonesia, setidaknya ada dua hal, pertama hukum di Indonesia memposisikan masyarakat secara sama, tidak ada hak istimewa bagi kalangan tertentu di depan hukum. Kedua, masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim. Di dalam Islam, persamaan merupakan doktrin yang amat fundamental. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip bahwa

Islam tidak membedakan siapapun dalam menaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka hukum. Terdapat suatu titik temu antara demokrasi deliberatif, demokrasi Pancasila, dan konsep syura dalam Islam. Ketiganya dipertemukan oleh pemikiran dasar bahwa musyawarah untuk mufakat disyaratkan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah untuk mufakat inilah esensi dari “demokrasi Indonesia sejati”, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia harus mampu mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada warga negara untuk beraspirasi melalui organ-organ publik di ruang publik. Ruang publik yang bersifat bebas, terbuka, mudah diakses oleh semua orang, transparan, dan otonom. Tak ada pihak lain (negara/pemodal) yang mengintervensi ruang ini. Diskusi-diskusi publik harus segera mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kebijakan publik yang hadir adalah benar-benar berdasarkan keinginan masyarakat.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA METESEH**

#### **A. Profil Desa Meteseh**

##### **1. Sejarah Desa Meteseh**

Pada jaman dahulu kala ada suatu tempat dimana tempat tersebut seperti hutan atau kopen (dalam bahasa jawa). Adapun didalamnya ada banyak tumbuhan seperti Kelapa, Kopi dan lain-lain terbengkelai tak terawat tidak ada penghuninya. Dalam cerita karena pemilik kopen tersebut orang-orang yang domisilinya jauh diluar wilayah. Pada suatu saat ada seorang yang pertama datang dan berdomisili di situ (bubak yoso) dengan nama Kyai Dapi (Kyai Daliyah Dapi) lama kelamaan satu demi satu datang dan berdomisili serta menetap di sekitar lokasi dimana Kyai Dapi menetap, lama kelamaan menjadi sekelompok hunian serta menjadikan wilayah tersebut menjadi suatu desa dan wilayah pemukiman tersebut banyak tumbuh bunga Telaseh, maka daerah tersebut oleh Kyai Dapi diberi nama Desa Meteseh. Dan Kyai Dapi merupakan Lurah pertama di Desa Meteseh, beliau bermukim di Meteseh sampai akhir hayatnya. Sejak dimana desa Meteseh ada sampai sekarang (Desa Meteseh, 2023).

Pemerintahan Desa Meteseh telah dipimpin oleh Kepala Desa dari periode ke periode sebagai berikut :

- 1) Kyai Dapi (Bah Daliyah) masa pemerintahan s/d tahun 1927
- 2) Seco Dikromo masa pemerintahan dari tahun 1927 s/d tahun 1932
- 3) Dalang masa pemerintahan dari tahun 1932 s/d tahun 1940
- 4) Dimpil masa pemerintahan dari tahun 1940 s/d tahun 1946
- 5) Merto Atdmojo (Kasmir) dari tahun 1946 s/d tahun 1953
- 6) Jono masa pemerintahan dari tahun 1953 s/d tahun 1963
- 7) Sutrisno masa pemerintahan dari tahun 1964 s/d tahun 1989
- 8) Siswoyo, SH masa pemerintahan dari tahun 1989 s/d tahun 2007
- 9) Maola Bagus masa pemerintahan dari tahun 2007 s/d tahun 2013
- 10) Maola Bagus masa pemerintahan dari tahun 2013 s/d tahun 2019
- 11) Wahyu Catur Sulistyoni, S.Sos dari September 2019 s/d Juni 2020 (Penjabat Kades)

12) Sisyanto, S.Sos Kepala Desa Terpilih dalam Pilkadaes 18 Maret 2020 masa pemerintahan tahun 2020 s/d 2026

## **2. Kondisi Topografi Desa Meteseh**

Desa Meteseh merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang terletak  $\pm 3,2$  km ke arah utara dari Kecamatan Boja dan  $\pm 27$  km ke arah selatan dari Ibu Kota Kabupaten, dan dapat ditempuh dengan kendaraan  $\pm 1$  jam/menit. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara Desa Trisobo Kecamatan Boja sebelah timur Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen, sebelah selatan Desa Boja, Desa Campurejo Kecamatan Boja dan sebelah barat Desa Merbuh Kecamatan Singorojo (Desa Meteseh, 2023).

Secara topografi, Desa Meteseh berada di wilayah pegunungan dengan variasi ketinggian antara 350 m sampai dengan 500 m dari permukaan laut, dengan luas wilayah mencapai  $\pm 73,243$  km<sup>2</sup> atau  $\pm 751,293$  Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi. Iklim Desa Meteseh sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Meteseh.

Kecamatan Boja adalah satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah. Jikalau dilihat menurut luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Boja adalah Desa Meteseh dengan luas wilayah 7,55 Km<sup>2</sup> (11,78% dari luas wilayah Kecamatan Boja). Desa Meteseh merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal yang mengalami perkembangan wilayahnya yang cukup meningkat dengan pesat. Adanya pengaruh aktivitas perkotaan Kota Semarang menyebabkan pembangunannya menjalar hingga ke Desa Meteseh yang tidak rawan dengan banjir. Sehingga dampak yang terjadi adalah aktivitas pembangunan di desa Meteseh menjadi meningkat pesat (Desa Meteseh, 2023).

**Gambar 3.1 Peta Desa Meteseh**



Sumber : Kantor Desa Meteseh 2023

## **B. Kondisi Demografi Desa Meteseh**

### **1. Jumlah Penduduk Desa Meteseh**

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal berdasarkan data Profil Desa tahun 2023 sebanyak 11.566 jiwa yang terdiri dari 5.776 jiwa (49,94%) laki-laki dan perempuan 5.790 jiwa (50,06%). Terdapat lebih banyak jumlah penduduk laki-laki daripada jumlah penduduk perempuan (Desa Meteseh, 2023)

**Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan umur**

NO	UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	0 – 4	431	3,73	416	3,60	847	7,32
2	5 – 9	496	4,29	483	4,18	979	8,46
3	10 – 14	514	4,44	445	3,85	959	8,29
4	15 – 19	403	3,48	383	3,31	786	6,80
5	20 – 24	419	3,62	454	3,93	873	7,55
6	25 – 29	473	4,09	477	4,12	950	8,21
7	30 – 34	511	4,42	474	4,10	985	8,52

8	35 – 39	477	4,12	489	4,23	966	8,35
9	40 – 44	456	3,94	428	3,70	884	7,64
10	45 – 49	372	3,22	387	3,35	759	6,56
11	50 – 54	343	2,97	334	2,89	677	5,85
12	55 – 59	282	2,44	349	3,02	631	5,46
13	60 – 64	264	2,28	299	2,59	563	4,87
14	65 – 69	170	1,47	142	1,23	312	2,70
15	70 – 74	88	0,76	91	0,79	179	1,55
16	>= 75	77	0,67	139	1,20	216	1,87
<b>JUMLAH</b>		<b>5.776</b>	<b>49,94</b>	<b>5.790</b>	<b>50,06</b>	<b>11.566</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Desa Meteseh 2023

**Tabel 3.2 Jumlah penduduk laki dan perempuan**

NO	DESA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	METESEH	5.776	49,94	5.790	50,06	11.566	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.776</b>	<b>49,94</b>	<b>5.790</b>	<b>50,06</b>	<b>11.566</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Desa Meteseh 2023

## 2. Jumlah Dusun Desa Meteseh

Secara Administratif wilayah Desa Meteseh dengan luas 751,293 ha dan terdiri dari 54 RT dan 8 RW, meliputi 8 Dusun yaitu: Dusun Krajan Barat, Dusun Krajan Tengah, Dusun Krajan Timur, Dusun Teseh, Dusun Rowosari, Dusun Sasak, Dusun Segrumung dan Dusun Slamet (Desa Meteseh, 2020).

## 3. Tingkat Pendidikan Desa Meteseh

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akan tetapi kalau dilihat dari data statistik sebagian masyarakat masih berpendidikan rendah, sebanyak 29,78% belum/tidak sekolah. Dilihat dari segi pendidikan di Desa Meteseh masih menengah, dilihat dari jumlah tamatan SD sebanyak 3.279 jiwa, SMP sebanyak 1.773 jiwa, SMA sebanyak 1.888 jiwa Hingga

Diploma sebanyak 158 jiwa serta Strata I sebanyak 302 jiwa. Dengan kisaran jumlah tersebut menggambarkan jika tingkat pendidikan desa meteseh telah menyeluruh tetapi belum baik sepenuhnya, didukung oleh fasilitas pendidikan mulai dari pra sekolah (taman kanak-kanak) sampai SLTA (Desa Meteseh, 2023).

**Tabel 3.3 Jumlah penduduk menurut pendidikan**

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.716	14,84	1.728	14,94	3.444	29,78
2	Belum Tamat SD/Sederajat	368	3,18	344	2,97	712	6,16
3	Tamat SD/Sederajat	1.561	13,50	1.718	14,85	3.279	28,35
4	SLTP/Sederajat	891	7,70	882	7,63	1.773	15,33
5	SLTA/Sederajat	1.018	8,80	870	7,52	1.888	16,32
6	Diploma I/II	10	0,09	13	0,11	23	0,20
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	58	0,50	77	0,67	135	1,17
8	Diploma IV/Strata I	148	1,28	154	1,33	302	2,61
9	Strata II	6	0,05	4	0,03	10	0,09
10	Strata III	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.776</b>	<b>49,94</b>	<b>5.790</b>	<b>50,06</b>	<b>11.566</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Desa Meteseh 2023

#### 4. Kondisi Keagamaan Desa Meteseh

Dilihat dari penduduknya, Desa Meteseh mempunyai penduduk yang heterogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Agama yang dianut masyarakat desa meteseh terbagi menjadi beberapa kepercayaan diantaranya islam, kristen, katolik, hindu, budha, konghuchu. Dari berbagai kepercayaan tersebut agama islam menjadi mayoritas yang dianut masyarakat meteseh sebanyak 11.215 jiwa atau 96,97%.. Pemeluk selain islam tidak terlalu nampak didalam kegiatan karena jumlah pengikutnya yang sedikit serta tempat ibadah yang belum tersedia sehingga setiap ingin beribadah masyarakat melakukan diluar wilayah desa meteseh namun dalam kondisi keberagaman tergolong baik dan saling toleransi (Desa Meteseh, 2023).

**Tabel 3.4 Pemeluk agama warga meteseh**

1	ISLAM	5.616	48,56	5.599	48,41	11.215	96,97
2	KRISTEN	120	1,04	144	1,25	264	2,28
3	KATHOLIK	39	0,34	46	0,40	85	0,73
4	HINDU	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	BUDHA	1	0,01	1	0,01	2	0,02
6	KONGHUCHU	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	KEPERCAYAAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.776</b>	<b>49,94</b>	<b>5.790</b>	<b>50,06</b>	<b>11.566</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Desa Meteseh 2023

## 5. Kondisi Jenis Mata Pencaharian Desa Meteseh

Mata pencaharian desa meteseh juga sangat bervariasi, terdapat banyak jenis pekerjaan masyarakat desa diantaranya sebagai PNS, TNI, petani, karyawan swasta dan buruh. Namun di desa ini mata pencaharian yang mendominasi yakni petani, buruh harian lepas dan karyawan swasta. Dalam mengurus rumah tangga sejumlah 0% maka tidak ada indikasi laki-laki yang dirumah dan dalam mengurus rumah tangga didominasi oleh perempuan (Desa Meteseh, 2023).

**Tabel 3.5 Mata pencaharian warga meteseh**

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.672	14,46	1.563	13,51	3.235	
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0,00	920	7,95	920	7,95
3	PELAJAR/MAHASISWA	772	6,67	603	5,21	1.375	
4	PENSIUNAN	24	0,21	9	0,08	33	0,29
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	33	0,29	30	0,26	63	0,54
6	TNI	23	0,20	2	0,02	25	0,22
7	KEPOLISIAN RI	8	0,07	0	0,00	8	0,07
8	PERDAGANGAN	7	0,06	22	0,19	29	0,25
9	PETANI/PEKEBUN	331	2,86	505	4,37	836	7,23
10	PETERNAK	2	0,02	0	0,00	2	0,02
11	NELAYAN/PERIKANAN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	INDUSTRI	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	KONSTRUKSI	2	0,02	0	0,00	2	0,02
14	TRANSPORTASI	0	0,00	0	0,00	0	0,00

15	KARYAWAN SWASTA	1.276	11,03	800	6,92	2.076	
16	KARYAWAN HONORER	5	0,04	6	0,05	11	0,10
17	KARYAWAN BUMN	6	0,05	1	0,01	7	0,06
18	BURUH HARIAN LEPAS	358	3,10	304	2,63	662	5,72

Sumber: Desa Meteseh 2023

**Tabel 3.6 Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa meteseh**

Pekerjaan	Jumlah
Karyawan swasta	2.076
Buruh harian lepas	662
Petani	836
PNS	63

Sumber: Desa Meteseh 2023, diolah peneliti

Di desa meteseh rata-rata mata pencaharian masyarakatnya bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 2.076 jiwa, kemudian diurutan kedua bekerja sebagai petani sebanyak 836 jiwa, kemudian diurutan ketiga bermata pencaharian sebagai buruh harian sebanyak 662 jiwa dan yang terakhir bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 63 orang.

## 6. Kondisi Sosial Desa Meteseh

Kondisi sosial masyarakat Desa Meteseh ditinjau dari konsep budaya, umumnya masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan, gotong royong dan kebersamaan. Rasa solidaritas antara anggota masyarakat sangat kuat terutama antar warga RT dan RW satu dengan lainnya. Contohnya jika pada saat ada hajatan dan wisuda TPQ, mereka semua ikhlas membantu dan memeriahkan hajatan tersebut dan memeriahkan kelulusan wisuda TPQ dengan membuat acara seperti pentas seni dan lomba-lomba. Serta dalam bersih-bersih tempat ibadah semua masyarakat selalu sigap ikut serta, di Desa Meteseh juga menjunjung toleransi yang tinggi selain yang beragama Islam ada juga yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan agama lain yang mana semuanya

mendapatkan porsi yang sama dalam menyampaikan aspirasinya dan tidak membedakan antar agama satu dengan lainnya (Desa Meteseh, 2023).

## **7. Kondisi Budaya Desa Meteseh**

Desa meteseh hingga saat ini tahun 2023 masih terus melestarikan budaya daerah dan budaya jawa. Kesenian daerah tersebut digelar rutin setiap tahunnya. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan yaitu meliputi pagelaran kuda lumping atau jaranan, nyadran, pagelaran seni tari yang dilakukan setiap minggu di aula balai desa meteseh dan merti desa dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit. Menurut Sisyanto, S.Sos selaku Kepala Desa Meteseh, merti desa pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas segala karunia yang diberikannya. Karunia tersebut bisa berupa apa saja seperti limpahan rezeki, keselamatan, ketentraman dan sebagainya. “Kegiatan seperti ini juga merupakan sebuah wadah dimana para penduduk bisa membina tali silaturahmi, saling menghormati, serta saling asah, asih dan asuh. Semuanya itu merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang harus terus dijaga, agar tidak tergerus oleh derasnya perubahan zaman” ucap Sisyanto, S.Sos selaku kepala desa meteseh (Desa Meteseh, 2023).

**Gambar 3.2 Merti desa pagelaran wayang kulit**



Sumber: Dokumentasi kantor desa meteseh

**Gambar 3.3 Pagelaran kuda lumping**



**Gambar 3.4 Kirab budaya**



Sumber: Dokumentasi kantor desa meteseh

## **8. Kondisi Ekonomi Desa Meteseh**

Menilik pada zaman dulu Di desa meteseh banyak masyarakat yang berkerja sebagai pembuat genteng mantili yang asli dari desa Meteseh. Tetapi sekarang ini penduduk yang tinggal didesa meteseh lebih banyak menjadi karyawan swasta dibandingkan memproduksi genteng mentili mungkin sekarang ini dikarenakan banyaknya kompotitor genteng yang semakin banyak sehingga penghasilannya tidak terlalu banyak dan juga karena perkembangan jaman banyak pabrik yang dibangun disekitar desa Meteseh sehingga lebih memudahkan untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa meteseh bergerak dibidang pertanian dan wiraswasta. Pertanian merupakan sektor utama lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di desa meteseh, jenis yang diusahakan diantaranya padi luas areal tanam 145 ha mencapai produksi 820,97 ton, produksi jagung dengan luas areal 31 ha mencapai jumlah 213,75 ton, ubi kayu areal tanam seluas 8 ha mencapai produksi sebanyak 196 ton dan ubi jalar areal seluas 4 ha mencapai produksi 92 ton. Beberapa tanaman perkebunan yang diperdagangkan namun belum diolah berupa kelapa, kopi, kapulogo dan tanaman buah tropis. Untuk usaha peternakan yang diusahakan sebagian besar ternak unggas khususnya ayam ras pedaging dan petelur, terdapat juga peternakan perseorangan berupa kambing, sapi, kerbau. Banyaknya kegiatan ormas desa meteseh seperti remaja masjid, karang taruna, jamiyah yasin, tahlil, PKK, posyandu dan kelompok tani merupakan asset desa yang bermanfaat dijadikan media menyampaikan informasi dala setiap proses pembangunan desa (Desa Meteseh, 2023).

Desa Meteseh mempunyai harapan yang mana bisa mempunyai peta desa digital yang dapat diakses melalui aplikasi dan memudahkan orang yang akan berkunjung di Desa Meteseh. Selain itu pemerintah desa Meteseh juga berharap supaya BUMdesa ini dapat maju supaya dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada seperti genteng mentili dan desa wisata kampoeng lawas. Pemerintah desa Meteseh juga berharap supaya memiliki data potensi desa yang lengkap dan valid supaya dapat menjadi pemutakhiran data SDGs dan Penataan Profil desa. Ada juga harapan pemerintah desa Meteseh yaitu zero stunting Desa Meteseh, yang sekarang ini desa Meteseh sedang melakukan program PMT (pemberian makanan tambahan) untuk balita supaya mencegah bertambahnya stunting di Desa Meteseh (Desa Meteseh, 2023).

Desa meteseh yang luas ini membuat banyak investor tanah yang membangun perumahan di desa Meteseh sekitar tiga ribu enam ratus unit perumahan yang dibangun baru-baru ini sehingga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat di sekitar desa Meteseh seperti peningkatan infrastruktur, harga tanah yang ada di desa meteseh menjadi meningkat, dan terbukanya usaha-usaha baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Desa Meteseh, 2023).

**Tabel 3.7 Kategori kemiskinan**

KATEGORI	2020	2021	2022
Sangat miskin	925 KK	925 KK	925 KK
Hampir miskin	384 KK	384 KK	384 KK
Miskin	859 KK	859 KK	859 KK
Kaya	1.765 KK	1.778 KK	1.794 KK
Sangat kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	3.933 KK	3.946 KK	3.962 KK

Sumber: Kantor desa meteseh 2023, diolah peneliti

Menganalisis kategori kemiskinan desa meteseh dari tahun 2020-2022 yang menggambarkan jika desa meteseh termasuk desa yang masyarakatnya masih berada dalam lingkaran kemiskinan, angka kemiskinan masih cukup tinggi di setiap tahunnya yang bergerak stagnan. Masyarakat sangat miskin dari tahun 2020-2022 stagnan memiliki 925 KK, kemudian masyarakat hampir miskin atau kelas menengah dari tahun

2020-2022 memiliki 384 KK, kemudian masyarakat yang miskin memiliki 859 KK dari tahun 2020-2022, kemudian masyarakat yang kaya memiliki jumlah cukup banyak sebesar 1.765 KK di tahun 2020, 1.778 KK di tahun 2021, 1.794 KK di tahun 2022. Yang menandakan masyarakat kaya mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, kemudian masyarakat sangat kaya tidak ada. Tahun 2020 berjumlah 3.933 KK, tahun 2021 berjumlah 3.946 KK, tahun 2022 berjumlah 3.962 KK (Desa Meteseh, 2023).

Dilihat dari potensi desa Meteseh seharusnya di desa Meteseh angka penganggurannya sedikit tetapi untuk saat ini angka pengangguran masih cukup tinggi yaitu sekitar 3.235 jiwa yang mana seharusnya pemerintah desa dapat membuat sebuah program yang membantu perekonomian desa seperti memberikan pelatihan pembuatan genteng mantili asli meteseh. Sehingga mereka yang masih kebingungan mencari pekerjaan bisa membuat genteng meteseh sebagai mata pencariannya supaya yang belum memiliki pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan (Desa Meteseh, 2023).

**Gambar 3.5 Potensi genteng mantili**



Sumber: Dokumentasi oleh peneliti 2023

## **C. Kondisi Pemerintah Desa Meteseh**

### **1. Visi Misi Desa Meteseh**

#### **a Visi Desa Meteseh:**

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Makmur dan Sejahtera”

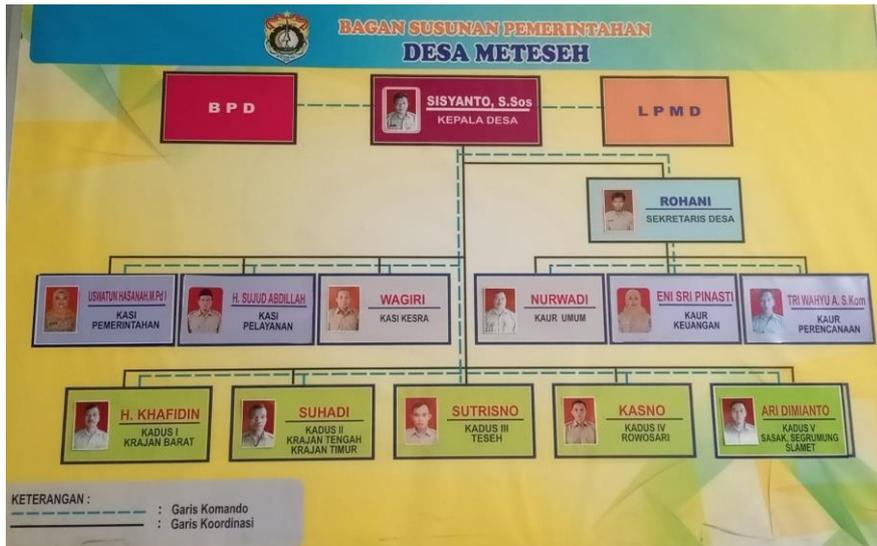
b Misi Desa Meteseh:

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- 2) Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dengan menekankan pada konsepsi DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat).
- 3) Transparansi Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa (IPPD)
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa secara berkesinambungan berdasarkan skala prioritas dan pembidangan
- 5) Meningkatkan pembangunan dibidang ilmu pengetahuan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 6) Meningkatkan pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan dalam rangka menjalin sinergitas antar kelompok / komunitas masyarakat
- 7) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, home industry, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata.
- 8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung capaian serta target pembangunan desa
- 9) Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUMDesa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada

## 2. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa Meteseh

Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkades. Tentu saja, kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh sejumlah pejabat setempat. Berikut struktur organisasi perangkat Desa Meteseh:

**Gambar 3.6 Struktur organisasi perangkat desa 2023**



Sumber: Kantor balai desa meteseh 2023

**Tabel 3.8 Perangkat desa struktural kantor balai desa**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sisyanto, S.Sos	Kepala desa
2	Rohani	Sekretaris desa
3	Tri wahyu anjarianto S.Kom	Kaur perencanaan
4	Eni sri pinasti	Kaur keuangan
5	Nurwadi	Kaur umum
6	H. sujud Abdullah	Kasi pelayanan
7	Uswatun khasanah	Kasi pemerintahan
8	Wagiri	Kasi kesejahteraan

9	H. khafidin	Kadus I dusun krajan barat
10	Suhadi	Kadus II krajan timur, krajan tengah
11	Sutrisno	Kadus III dusun teseh
12	Kasno	Kadus IV dusun rowosari
13	Ari dimiyanto	Kadus V sasak, segrumung, slamet

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 6 tahun 2014 bahwa dalam desa terdapat 3 kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintahan desa dijalankan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa meliputi sekretariat desa, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan. Sekretaris desa bertugas membantu kades dalam bidang administratif pemerintah desa dipimpin oleh carik desa terbagi menjadi 3 urusan yakni urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan tata usaha dan umum. Pelaksana teknis terdiri dari 3 seksi yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan. Dalam perangkat desa meteseh pada keterlibatan perempuan mengindikasikan bahwa masih kurang dan rendah karena hanya terdapat 2 perempuan dari keseluruhan 13 anggota perangkat desa meteseh (Desa Meteseh, 2023).

### **3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Meteseh**

Lembaga kemasyarakatan desa hakekatnya merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya mendorong, memotivasi, menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi dan mewujudkan efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah desa.

a. BPD (badan permusyawaratan desa) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kades, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDes dan

mengawasi pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Sesuai ketentuan aturan mengenai BPD yaitu Perda Kab. Kendal No 20 tahun 2018 tentang BPD. Berdasarkan kriteria desa dan persyarat jumlah keanggotaan dan struktur kepengurusan yakni:

**Tabel 3.9 Badan permusyawaratan desa meteseh**

NO	NAMA	JABATAN
1	Tumijan, Spd	Ketua BPD
2	Achmad muntohar	Wakil BPD
3	Bayu yuli arimantoko, M.Pd	Sekretaris BPD
4	Nur faizin	Anggota BPD
5	Sutrisno	Anggota BPD
6	Suparni	Anggota BPD
7	Joko hardiyanto priyosaputro	Anggota BPD
8	Aji setyamoko	Anggota BPD
9	Banu nur ahmad	Anggota BPD

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

Keterlibatan perempuan dalam anggota BPD Desa Meteseh masih rendah, karena dari 9 anggota BPD hanya terdapat 1 perempuan didalamnya. Hal ini menggambarkan dalam struktur kepengurusan ini kaum perempuan belum terlalu dilibatkan dan kendali masih dipegang oleh kaum laki-laki.

b. LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

**Tabel 3.10 Daftar anggota LPMD**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Agus supandito, SH	Krajan tengah	Ketua
2	Suparni	Krajan barat	Sekretaris
3	Markus suwarno	Krajan tengah	Bendahara
4	Solikhin	Krajan tengah	Tokoh Agama
5	Yasin	Krajan tengah	Lingkungan hidup
6	Heru muriawan	Slamet	Ekonomi & kesejahteraan
7	Warsito	Rowosari	Pemuda dan olahraga

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

Keterlibatan perempuan dalam anggota LPMD Desa Meteseh masih rendah, karena dari 7 anggota LPMD hanya terdapat 1 perempuan didalamnya. Hal ini menggambarkan dalam struktur kepengurusan ini kaum perempuan belum terlalu dilibatkan dan kendali masih dipegang oleh kaum laki-laki.

c. PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemdes dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada terlaksananya program PKK, keterlibatan kaum perempuan dalam struktur kepengurusan sudah menyeluruh, hampir seluruh kendali dijalankan oleh kaum perempuan. Susunan tim penggerak PKK desa meteseh yaitu:

**Tabel 3.11 Daftar anggota tim penggerak PKK**

NO	NAMA	JABATAN
1	Suparni sisyanto	Ketua
2	Ratna yuliasari	Wakil ketua
3	Suyatini	Sekretaris I
4	Istianah	Sekretaris I
5	Hj. Nani sumarni	Bendahara I
6	Suratiah	Ketua pokja I

7	Dwi lestari	Sekretaris
8	Kuswati	Anggota
9	Suparni	Ketua pokja II
10	Murwati	Sekretaris
11	Erna yulianti	Anggota

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

d. Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa sedangkan rukun warga adalah tindak lanjut dari rukun tetangga sebagai bagian dari wilayah kerjanya dan dipilih oleh pengurus RT ditetapkan oleh pemerintah desa. Keterlibatan kaum perempuan dalam struktur kepengurusan RT yang berjumlah 5 dan RW berjumlah 8 hampir tidak ada karena seleuruhnya dijalankan oleh kaum laki-laki.

**Tabel 3.12 Daftar RW desa meteseh**

NO	NAMA	JABATAN
1	Siswanto	Ketua rw 01
2	Suwandi	Ketua rw 02
3	Sugiyono	Ketua rw 03
4	Boesri seno K	Ketua rw 04
5	Surwanto	Ketua rw 05
6	Jamsuki	Ketua rw06
7	Langgeng	Ketua rw 07
8	Slamet	Ketua rw 08

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

**Tabel 3.13 Daftar RT desa meteseh**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sugeng	Ketua rt 01/rw 01
2	Santoso	Ketua rt 01/rw 02
3	Zamroni	Ketua rt 01/rw 03
4	Iswadi	Ketua rt 01/rw04
5	Suyamto	Ketua rt 01/rw 05

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

e. Karang Taruna Desa merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Karang taruna desa meteseh terbagi menjadi 3 bagian yakni karang taruna dusun, karang taruna desa dan karang taruna RT. Dari ketiganya jumlah total anggota karang taruna ada 60 orang, namun saat ini di tahun 2023 yang aktif sejumlah 35 orang.

f. Kader Posyandu

**Tabel 3.14 Daftar kader posyandu**

NO	DUSUN	NAMA	RT	RW
1	Krajan barat	Dewi anisya	5	1
2	Krajan tengah	Kuswati	7	2
3	Krajan timur	Suratiah	4	3
4	Teseh	Rukanah	1	4
5	Rowosari	Sri lestari	3	5
6	Sasak	Kiswarini	1	6
7	Segrumung	Sundari	3	7
8	Slamet	Pujiati	4	8

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi masyarakat yang dirasakan dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi pameran untuk sekedar memenuhi kuota adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Merujuk pada kondisi diatas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di masyarakat (Desa Meteseh, 2023).

#### **4. Potensi Desa Meteseh**

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi 2: Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non fisik berupa masyarakat dengan karakteristik corak dan interaksinya, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan organisasi sosial masyarakat desa serta aparatur pemerintah desa.

Potensi fisik dan non fisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai *hinterland* yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat kota. Untuk mengetahui secara jelas potensi-potensi apa yang dimiliki desa tentunya perlu dilakukan pendataan secara cermat dengan melibatkan segenap

stakeholder (pemangku kepentingan) yang berperan secara aktif dalam pemerintahan desa. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa sebagai berikut:

- a Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan tanggung jawab
- b Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga miskin
- c Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat miskin
- d Mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa

Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi aktif masyarakat maka pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan dan merasa ikut memiliki hasil pembangunan desa.

Berdasarkan pemetaan dan analisis data kondisi riil yang terdapat dan dimiliki oleh masyarakat pada Desa Maeteseh, dapat dijelaskan potensi-potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan khususnya sumber daya alam diantaranya:

## 1. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya lingkungan alam yang terdapat dipermukaan maupun terkandung dalam bumi di Desa Meteseh cukup menjanjikan. Potensi bahan tambang khususnya galian c berupa batu dan tanah urug sangat banyak dan terdapat di banyak lokasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan dari sisi pelestarian lingkungan mengingat semakin dibutuhkannya bahan tambang galian c dalam proses pembangunan baik oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta. Usaha pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang memperhatikan kemungkinan dampaknya bagi lingkungan sekitar dan pengaruhnya bagi kegiatan lain (pariwisata, pertanian, peternakan). Sumber daya alam yang dimiliki Desa Meteseh merupakan salah satu potensi pembangunan yang dapat dilihat berikut:

**Tabel 3.15 Daftar sumber daya alam 2022**

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Material batu kali dan kerikil	300	M3
2	Pasir urug	100	M3
3	Lahan tegalan	221,25	Ha
4	Lahan hutan	96	Ha
5	Sungai	7,5	Km
6	Persawahan	70	Ha

Sumber: RPJMDesa 2020-2026

## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk desa meteseh berdasarkan profil tahun 2022 sebanyak 11.356 jiwa yang terdiri dari 5.700 laki-laki dan 5.656 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian dan wiraswasta.

## 3. Sumber Daya Kelembagaan / Organisasi

- a Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik
- b Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan

- c. Makin tertatanya kelembagaan pemerintah desa. Kelembagaan atau organisasi yang dimiliki Desa Meteseh yaitu: BPD, LPMD, PKK, Karang taruna, RW, RT, Kelompok tani, Peternak dan UMKM.
- 4. Potensi Ekonomi
  - a. Lahan pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya
  - b. Terdapat usaha-usaha kecil (kerajinan tangan) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan
- 5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya
  - a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan asset potensial dalam pembangunan
  - b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
  - c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan
  - d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk menggerakkan ekonomi perdesaan
- 6. Potensi Pariwisata

Pola hidup masyarakat yang berkembang sesuai kondisi dan situasi lingkungan, khususnya pada minat berwisata masyarakat yang semakin tinggi sesuai perkembangan ekonomi dan pergeseran minat masyarakat yang cenderung meninggalkan objek wisata konvensional dan lebih memilih produk wisata yang menghargai kelestarian alam, budaya, ramah lingkungan. Sebagai respon pergeseran minat wisata tersebut, maka salah satu alternatifnya adalah desa wisata. Sebutan sebagai desa wisata memiliki ciri khas/karakter yang memiliki daya jual berupa kekayaan alam, budaya ataupun lingkungan yang memadai sehingga masyarakat yang berkunjung menikmati, mengenal dan mempelajari kekayaan desa.

Desa meteseh sebagai salah satu wilayah prospek desa wisata menyimpan berbagai potensi wisata yang dimiliki yaitu wisata alam, wisata seni budaya, wisata religi. Hal tersebut perlu dikembangkan lebih luas sehingga memiliki dampak ekonomi mensejahterakan masyarakat. Keindahan alam Desa Meteseh serta objek wisata lain merupakan potensi wisata yang menjadi daya tarik yang menarik bagi orang untuk berwisata. Peranan masyarakat desa meteseh dalam melestarikan alam dan menjaga budaya setempat sangat penting, hal ini dapat dilihat pada karakteristik masyarakat desa

yang menjunjung tinggi adat istiadat Jawa yang memiliki nilai-nilai leluhur seperti *nyadran* dan *merti desa*. Peranan masyarakat desa dalam menjaga tradisi menjadi modal untuk mewujudkan desa wisata yang akhirnya diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa meteseh (Desa Meteseh, 2023).

Unsur-unsur desa wisata memiliki potensi wisata, seni, budaya khas setempat, aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung potensi program desa wisata, terjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan. Yang menjadi dasar pengembangan desa wisata yaitu lingkungan alam, sosial ekonomi, budaya masyarakat, arsitektur, struktur tata ruang dan pengetahuan kemampuan lokal oleh masyarakat. Yang menjadi faktor penting dalam membentuk dan mengelola dengan menyatukan komponen SDA dan SDM sebagai kesatuan integral. Daya dukung dalam pengembangan potensi pariwisata desa meteseh adanya objek wisata “kampoeng lawas”. “pasar kretan” yang bermitra melalui pengembangan kemitraan pariwisata khususnya pengembangan program desa wisata meteseh (Desa Meteseh, 2023).

**Gambar 3.7 Wisata kampoeng lawas**



Sumber: Instagram kampoeng lawas

**Gambar 3.8 Wisata pasar kretan**



Sumber: Instagram pasar kretan

**BAB IV**  
**PRAKTIK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN**  
**INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023**

Dalam konteks desa yang relatif kecil, di Desa Meteseh masyarakat memiliki hubungan lebih erat dan kehidupan yang lebih terkait satu sama lain. Demokrasi deliberatif dapat dianggap relevan untuk konteks desa karena memberikan platform bagi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari agar memperkuat demokrasi lokal. Demokrasi deliberatif bukan hanya tentang pengambilan keputusan, tetapi juga tentang pembangunan masyarakat. Terjadi di Desa Meteseh proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami kebutuhan bersama dan membangun rasa solidaritas. Dalam konteks desa, hubungan sosial lebih dekat sehingga deliberatif dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pembangunan infrastruktur Desa Meteseh terdapat tiga tahapan dimulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

**A. Tahap Perencanaan**

Perencanaan pembangunan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adanya rencana strategis yang mencakup sasaran pembangunan dengan penetapan prioritas pembangunan bagi seluruh masyarakat desa meteseh. Tahap perencanaan sebagai tahap awal yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, perencanaan pembangunan, dan penetapan pelaksana kegiatan. Dalam tahapan perencanaan terdapat aktor-aktor yang terlibat, forum deliberatif yang didalamnya ada kegiatan musdus, musrenbang, musdes, MMD dan FKM, kemudian kebijakan keuangan meliputi alokasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2023 dan alokasi belanja desa meteseh pada tahun 2020 hingga 2023, serta adanya proses pengambilan keputusan dalam penyusunan RPJMDes 2020-2026.

## **1. Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Ruang Publik**

### **a. RT dan RW**

RT dan RW memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan lokal dengan membantu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berjumlah 54 RT dan 8 RW terkait kondisi sosial serta ekonomi. Kedua, menyampaikan informasi dan sosialisasi program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui FKM dengan memberikan penyuluhan dan edukasi dari proyek pembangunan. Ketiga, mengorganisir pertemuan-pertemuan masyarakat, seperti menyelenggarakan forum diskusi FKM (forum komunikasi masyarakat) di tingkat RT di desa meteseh yang mulai berjalan tahun 2021, yang dilakukan sebulan 2 kali untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari warga sebelum proyek pembangunan diimplementasikan. Keempat, sebagai perwakilan masyarakat tingkat bawah RT/RW dapat menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kemudian aspirasi tersebut dibahas menjadi usulan pembangunan di forum musrenbang kepada pemerintah desa meteseh.

Hal tersebut turut disampaikan RT 01 beliau menyampaikan:

“Di desa ini kalo forum buat diskusi antar pemerintah desa dan masyarakat ada 5 sebenarnya itu musdus, musrenbangdes, musdes, MMD membahas kesehatan, sama FKM membahas mulai perencanaan pembangunan hingga evaluasi dan isu-isu sosial di tingkat RT” (Tris, 2023).

Hal tersebut turut disampaikan RW 07 beliau menyampaikan:

“Dalam proses musyawarah memang masyarakat di berikan hak untuk berpendapat serta mengkritik apa yang sedang dibahas sehingga ada perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika musyawarah berlangsung” (Kasno, 2023).

### **b. PKK**

PKK di desa meteseh terdiri dari 20 anggota ibu-ibu warga meteseh yang sering mengadakan pertemuan setiap 1 bulan sekali, yang membahas program kegiatan berfokus pada kesehatan dan perencanaan sehat bagi keluarga. PKK berperan untuk mendata kebutuhan keluarga di setiap rumah warga, karena PKK menjadi perwakilan kaum perempuan dalam memberikan kontribusi perencanaan pembangunan yang

mendukung kesejahteraan keluarga. Serta menampung usulan dari perempuan desa meteseh terkait program kesehatan seperti pemenuhan gizi bagi anak, pendidikan, pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, usaha kecil (UMKM) yang kemudian disampaikan pada saat musdes dan musrenbangdes bersama pemerintah desa. Tahapannya ibu-ibu PKK dapat mengajukan proposal atau usulan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kepada aparat desa. Kemudian untuk mendorong dialog dan komunikasi antar masyarakat desa, ibu-ibu PKK dapat berperan sebagai fasilitator dalam dialog dan komunikasi antar masyarakat desa untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, peneliti turut mewawancarai di lapangan dengan Ibu Suyatini selaku kader PKK Desa Meteseh beliau menyampaikan:

“Kita sering dilibatkan kok, sering diundang ke balai desa buat rembug desa istilahnya musyawarah. Kita mengusulkan kepentingan bagi para perempuan dan anak biasanya. Karena program pkk terkait pemberdayaan. Musyawarah rutin sih biasanya 3 bulan sekali atau kalau ada hal penting itu langsung digelar proses diskusi bahas rencana pembangunan. Sebelum musyawarah kita dikasih undangan gitu yang dikirim kerumah-rumah mbak” (Suyatini, 2023)

Kemudian peneliti melanjutkan sesi wawancara kepada Bu Kadus sekaligus Ketua PKK beliau menyampaikan:

“Kita dari PKK sering dilibatkan musyawarah biasanya membahas review kegiatan tahun lalu dan tahun depan bisa dari pembangunan fisik/infrastruktur dan pembangunan non fisik/kesehatan/posyandu juga dek. Kita juga berpartisipasi menyampaikan usulan buat pelatihan sama lomba gitu, kan PKK ini sering kegiatannya dilakukan sebulan sekali di balai desa jadi kita sering saling diskusi disana” (Suparmi, 2023)

### **c. Karang Taruna**

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018, Karang Taruna berperan dalam setiap pelaksanaan serta ikut serta dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Karang taruna di desa meteseh berjumlah keseluruhan 60 anggota yang terbagi menjadi 3 yakni karang taruna tingkat desa, karang taruna tingkat RT dan karang taruna tingkat dusun. Namun pemuda yang masih aktif berpartisipasi di segala kegiatan hanya sekitar 45 orang. Karang taruna desa meteseh rutin menggelar pertemuan 1 bulan sekali untuk membahas pokja yang berfokus pada isu-isu lingkungan di desa untuk menyampaikan

aspirasi dan kebutuhan generasi muda misalnya menampung usulan para pemuda dari mulai dusun, RT, sampai desa mengenai permintaan pembangunan fasilitas olahraga, tempat berkumpul pemuda atau program-program pelatihan kepemudaan seperti pelatihan photography, videography dan pelatihan membuat konten. Kemudian usulan itu disampaikan dalam forum baik musdes atau musrenbang bersama aparat desa meteseh.

Disampaikan oleh ketua karang taruna Desa Meteseh, Mas Bara selaku Ketua Karang Taruna Dusun Rowosari, menyampaikan:

“Jumlah karang taruna ada 60 orang dari RT, dusun sama desa tapi sekarang tinggal 45 orang yang aktif kak. Kita diundang ke balai desa buat musdes. Tapi juga musdus kita pemuda diundang sama pak kadus buat menyumbangkan pendapat mbak. Kalo kita para pemuda ini juga sering usul misal ada kegiatan buat rame-rame desa ini seperti acara kirab budaya atau mertu desa itu idenya sebagian dari kita pemuda saat proses diskusi” (Bara, 2023)

#### **d. Posyandu**

Posyandu kenanga merupakan posyandu di desa meteseh yang aktif berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan bagi balita dan lansia yang sudah beroperasi sejak tahun 2020. Posyandu berperan memberikan penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat desa meteseh melalui program pembangunan yang dibentuk meliputi keluarga berencana (KB), kesehatan ibu dan anak (KIA) dan peningkatan gizi masyarakat, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, imunisasi, penyuluhan kesehatan, pembinaan kader kesehatan, pengendalian penyakit menular, pemeriksaan kesehatan rutin setiap 2 minggu sekali. Selain itu, kader posyandu desa berperan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait kesehatan dan pemberdayaan, kader posyandu membantu menyajikan data kesehatan masyarakat untuk diserahkan pada pemerintah desa, dapat membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat meteseh.

Demikian, peneliti melakukan wawancara di lapangan dengan kader posyandu Bu Kuswati beliau menyampaikan:

“Di meteseh ada musdus, musdes, musrenbangdes. Kita aktif ikut musyawarah mbak sering disuruh hadir ke balai desa. Kita sering

menyampaikan usulan sama bertukar pendapat misal terkait kesehatan balita atau lansian, kegiatan posyandu kadang ada bantuan bagi balita sama ibu hamil gitu mbak.” (Kuswati, 2023)

#### **e. Kelompok Tani**

Di meteseh terdapat GAKOTA (gabungan kelompok tani) jumlah keseluruhan petani yang ada di desa meteseh ada 836 orang sedangkan anggota aktif yang bergabung dalam gakota hanya 250 orang, sisanya 586 orang tidak tergabung karena tidak memiliki waktu luang. Gakota dibentuk tahun 2020 setelah kepemimpinan Pak Sisyanto. Melibatkan petani dalam perencanaan pembangunan dapat membantu memastikan bahwa proyek-proyek yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa meteseh yang berada di wilayah dataran rendah misalnya diskusi tentang jenis tanaman yang cocok seperti singkong, jagung, jahe, kunyit dll, teknologi pertanian, dan infrastruktur yang diperlukan seperti pembangunan jalan tani berupa talud. Selain itu, kelompok tani juga dapat berperan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian, seperti penyuluhan pertanian & pengembangan usaha tani. Dengan melibatkan kelompok tani dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan tanah, air dan tanaman yang bermanfaat bagi sumber daya alam desa meteseh.

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Sisyanto selaku Kepala Desa Meteseh, menyampaikan bahwa:

“Yang terlibat kelompok tani sama kelompok buruh mbak, karena mereka ini sering menyampaikan pendapat juga. Disini ada namanya gakota (gabungan kelompok tani). Ya kita ini bersama warga saling berbagi informasi jadi tidak ada ruang tertutup istilahnya. Pihak pemdes juga menjalankan sesuai UU No 6 tahun 2014 dengan mengikutsertakan masyarakat itu juga bentuk transparansi” (Sisyanto, 2023)

Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Sri selaku perwakilan petani, beliau menyampaikan:

“Kelompok petani iya sering terlibat diundang buat datang ke balai desa diajak diskusi buat mengusulkan sesuatu, kita menampung usulan dari petani lainnya untuk disampaikan saat musrenbangdes bersama pihak desa mbak”(Sri, 2023)

## **f. Kelompok Buruh**

Kelompok buruh di desa meteseh dibentuk tahun 2022 satu tahun setelah dibentuknya kelompok tani. Anggota kelompok buruh berasal dari kumpulan karyawan pabrik dan pegawai di sektor swasta. Jumlah buruh keseluruhan di desa meteseh ada 662 orang sedangkan anggota aktif yang bergabung dalam kelompok buruh hanya 360 orang, sisanya 302 orang tidak tergabung dalam kelompok buruh karena jarang berada dirumah, ada beberapa orang yang keluar desa untuk merantau. Pertama, kelompok buruh berperan untuk mewakili suara dan kepentingan para buruh, dengan melibatkan buruh dalam proses perencanaan, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi mereka lebih baik. Kedua, buruh dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan contohnya dapat memberikan informasi tentang lokasi infrastruktur yang paling dibutuhkan, jenis pelatihan yang bermanfaat bagi pekerja dan cara untuk meningkatkan keselamatan kerja seperti proyek infrastruktur, program pelatihan dan kebijakan ketenagakerjaan.

Hal tersebut turut diungkapkan Pak Bowo selaku perwakilan kaum buruh, beliau menyampaikan:

“Kami dikasih undangan buat datang mbak, jadi dari kami perwakilan orang ikut musyawarah buat menyampaikan bahasanya uneg-uneg kadang juga menyumbangkan gagasan gitu mbak. Dari kita bisanya perwakilan karena banyak yang kerja diwaktu itu tidak gak bisa ijin” (Bowo, 2023)

Perwakilan dari kelompok buruh desa meteseh, beliau menyampaikan:

“Dari sebelum kepemimpinan pak kades sisyanto berarti sebelum tahun 2020 itu sudah sering mengikutkan masyarakat buat rembug desa, tapi saya lihat setelah kepemimpinan pak sisyanto dari tahun 2020 sampai tahun ini (2023) tetap stagnan dek dari segi partisipasi kontribusi masyarakat buat pembangunan desa ini” (Suhadi, 2023)

## **g. Pokdarwis**

Kelompok sadar wisata di desa meteseh bernama pokdarwis abyudaya yang dibentuk setelah berdirinya kampoeng lawas pada tahun 2021. Pokdarwis sering bekerja sama dengan karang taruna desa meteseh dalam pemeliharaan wisata kampoeng lawas dan pasar kretan (titik kumpul) yang berperan memberikan masukan mengenai

infrastruktur wisata yang diperlukan, seperti aksesibilitas, akomodasi. Dalam tahap perencanaan, pokdarwis dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait program pembangunan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di desa. Selain itu, pokdarwis berperan dalam pelaksanaan program pembangunan pariwisata, seperti pengembangan objek wisata, promosi pariwisata dan pokdarwis dapat membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata, sehingga akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan untuk berkunjung ke desa meteseh. Pokdarwis dapat membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata, seperti pelatihan pemandu wisata.

Hal tersebut turut disampaikan oleh Kepala Desa Meteseh, beliau menyampaikan:

“Tujuan dari awal perencanaan kami ingin mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dan bertahap mbak” (Sisyanto, 2023)

#### **h. Pendamping Lokal Desa**

Pendamping lokal desa meteseh berasal dari Kecamatan Boja yang berperan dalam perencanaan pembangunan untuk memfasilitasi musdes untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan desa, membantu desa dalam menyusun RPJMDes dan dokumen perencanaan lainnya, melatih perangkat desa dan masyarakat tentang teknik perencanaan pembangunan, membantu desa dalam mengakses dana desa, mengadakan pertemuan dan diskusi dengan pemangku kepentingan untuk membahas pembangunan desa dan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memperjuangkan hak-hak desa meteseh yang seharusnya didapatkan. Selain itu, PLD juga berperan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, seperti membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Berkaitan pernyataan berikut turut disampaikan Pak Rohani di lapangan, beliau menyampaikan:

“Kalau partisipasi masyarakat aktif dari tahun 2019 sebelum kepemimpinan pak sis itu udah bagus ya. Lalu mulai kepemimpinan tahun 2020 sudah sering digelar. Mulai tahunnya pak sis (kades) mulai mengundang semua warga datang ke balai desa” (Rohani, 2023)

#### **i. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

BPD di desa meteseh memiliki 9 anggota dengan jumlah 8 laki-laki dan 1 perempuan, BPD dalam perencanaan pembangunan pertama, berperan dalam menyusun dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membahas dan menyepakati program pembangunan desa. Kedua, BPD menjadi penyelenggara musdes, forum musyawarah antar warga desa untuk membahas dan menyepakati berbagai hal terkait pembangunan desa, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Ketiga, BPD mengumpulkan data terkait ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang digunakan menentukan kebijakan dan proyek pembangunan yang diperlukan. Keempat, BPD membantu menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam wawancara di lapangan dengan Pak Sisyanto, S.Sos selaku Kepala Desa Meteseh beliau menyampaikan:

“Benar jika desa meteseh ini melibatkan masyarakat pada musyawarah. Mulai tahun 2020 desa meteseh memiliki misi salah satunya tertulis konsepsi DOUM (dan, oleh, untuk, masyarakat) jadinya pelaksanaan musyawarah digelar tingkat dusun sama tingkat desa mbak. Kalo yang terlibat itu PKK, LPMD, posyandu sama karang taruna sama RT/RW.” (Sisyanto, 2023)

#### **j. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)**

LPMD di desa meteseh terdiri dari 7 orang, 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. LPMD adalah lembaga yang dibentuk di tingkat desa untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan LPMD pertama, berperan untuk menyampaikan informasi tentang musdes kepada seluruh warga desa, membantu warga desa dalam menyusun usulan pembangunan, menampung dan mencatat aspirasi warga desa dan membuat berita acara musdes. Kedua, LPMD bersama dengan masyarakat menyusun rencana pembangunan desa, rencana ini mencakup prioritas pembangunan, proyek-proyek yang diperlukan. Ketiga, LPMD dapat berperan dalam penggalangan dana untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan dengan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal.

Dalam wawancara peneliti di lapangan dengan Pak Rohani selaku Sekretaris Desa Meteseh beliau menyampaikan:

“Jadi pertama itu membuat rangkaian rencana usulan-usulan warga yang perlu dilakukan pada pembangunan terus dilihat yang sangat dibutuhkan warga ini apa yang sekiranya sangat penting, melihat anggaran dari ADD atau PAD. Baru disusun disamakan visi misi yang dirancang pak kades terus dirembug bersama warga meteseh, yang paling penting didahulukan mengikuti skala prioritas contohnya pembangunan jalan” (Rohani, 2023).

#### **k. Tokoh Agama**

Mayoritas kepercayaan di desa meteseh menganut agama islam ada 11.215 orang sekitar 96,97% dan menganut agama kristen ada 264 orang sekitar 2,28% dan menganut agama katholik ada 85 orang sekitar 0,73%. Tokoh agama dalam perencanaan pembangunan pertama, berperan untuk menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik yang menjadi sumber moral dalam pembentukan aturan pembangunan, kedua tokoh agama dapat memberikan panduan moral dan nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan, ketiga tokoh agama dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan tokoh agama dapat membantu mempromosikan toleransi kerukunan antar umat beragama, yang menjadi syarat penting untuk pembangunan yang damai dan inklusif.

Berkaitan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam tahap perencanaan yakni mengacu pada keterlibatan maupun kontribusi individu dan kelompok masyarakat dapat terjadi dalam berbagai konteks yang berdampak pada pencapaian kepentingan bersama. Mengikutsertakan elemen masyarakat dalam proses musyawarah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa supaya pengambilan keputusan mencapai titik keadilan bersama. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah maka terdapat indikasi adanya praktik deliberatif sudah berlangsung di desa meteseh.

Berkaitan dengan wawancara bersama narasumber, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam keterlibatan masyarakat hampir sudah semua kalangan ikut dilibatkan pada proses musyawarah yang membahas pada aspek pembangunan keberlanjutan terutama pembangunan fisik desa meteseh dan sudah muncul indikasi keterbukaan

antara pemerintah desa dengan masyarakat dengan tersedianya forum ruang publik. Keterlibatan masyarakat membantu membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan membentuk arah pembangunan masyarakat. Keterlibatan yang kuat dapat menciptakan jaringan sosial yang lebih erat dan memperkuat ikatan antar individu dalam masyarakat. Kemudian mengacu pada kementerian desa UU No 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa perlu dilaksanakan musyawarah dari tingkat dusun hingga tingkat desa. Muncul indikasi jika desa meteseh ini telah menyediakan ruang publik terbuka bagi warganya sebagai berikut:

## **2. Forum Deliberatif**

### **a. Musdus dalam Tahap Perencanaan**

Sebuah forum atau pertemuan yang diadakan di tingkat dusun, yaitu unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa. Musdus merupakan salah satu tahapan dari rangkaian proses perencanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Meteseh, Musyawarah Dusun dilaksanakan di 8 dusun diantaranya dusun sasak, dusun segrumung, dusun slamet, dusun rowosari, dusun krajan tengah, dusun krajan timur, dusun krajan barat, dan dusun teseh yang untuk menampung usulan masyarakat dalam program kegiatan pembangunan yang berkelanjutan seperti tertera di RPJMDesa tahun 2020-2026. Kegiatan ini diadakan untuk menyerap aspirasi warga yang dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, sehingga pihak kadus dan masyarakat meteseh tinggal mengerucutkan permasalahan sesuai rangking dan sesuai urutan prioritas untuk dilaporkan saat musrenbangdes.

Dalam wawancara peneliti di lapangan bersama Bu Uswatun selaku Kasi Pemerintahan beliau menyampaikan:

“Disini itu bertahap ya mbak buat pelaksanaan pembangunan apalagi buat infrastruktur. Awalan itu dari bawah mulai musdus yang digelar antar masyarakat dengan kadus, disitu warga diberi ruang buat menyampaikan pendapat atau komplein juga boleh, terus saran juga pada pembangunan apa yang harus segera direalisasikan dan keinginan mereka kedepannya. Kalo sudah kadus mencatat dan menampung semua aspirasi warga tanpa kecuali. Kemudian saat musdes kadus melaporkan dusun mana saja yang ingin diadakan pembangunan, disini kan dusunnya lumayan banyak ada 8 jadi dipilih menggunakan skala prioritas dari

dusun paling bawah istilahnya paling memprihatinkan dulu lah” (Uswatun, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Sorib warga Dusun Segrumung, beliau menyampaikan:

“Dusun kami usul pembuatan gorong-gorong mbak, karena kalau hujan itu air bercampur tanah jadi licin berbahaya buat dilalui” (Sorib, 2024)

Pak Gunawan warga Dusun Krajan Tengah, beliau menyampaikan bahwa:

“Dusun kami usul pembuatan talud jalan tani saat musdus kemarin bulan september” (Gunawan, 2023)

Berkaitan dengan usulan-usulan yang disampaikan saat musdus di Dusun Teseh maupun Dusun Segrumung, rencana prioritas program pembangunan yang di deliberasikan secara bersama mulai dasar yakni terkait aspek diantaranya: 1). Penyelenggaraan pemerintah desa, 2). Pembangunan desa, 3). Pemberdayaan masyarakat, 4). Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak, 5). Pembinaan kemasyarakatan.

Usulan yang ditampung berasal dari PKK yang mengusulkan pembinaan pelatihan kemasyarakatan yang diharapkan dapat menjadi pelatihan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang dan usulan dari ketua RT 07, ketua RT 01 serta ketua RW 07 yang memberi usulan terkait pembangunan kios milik desa serta pembangunan jalan betonisasi di dusun krajan tengah, dusun teseh, dusun rowosari. Seluruh usulan tersebut akan disampaikan oleh setiap masing-masing kadus di forum musrenbang bersama aparat desa. Yang dilanjut dengan berdeliberasi secara bersama untuk proses pengambilan keputusan supaya mencapai konsensus hasil.

Dapat dianalisis jika keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pada perencanaan pembangunan menjadi sesuatu yang penting dengan memperhatikan skala prioritas yang sedang dibutuhkan seluruh masyarakat. Peserta musyawarah dusun terdiri Kepala dusun, Tokoh masyarakat, Kaum muda dan seluruh warga dusun. Musyawarah dusun dilaksanakan secara terbuka dan demokratis. Setiap warga dusun berhak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam musyawarah dusun. Keputusan musyawarah dusun diambil secara mufakat dan pembangunan tersebut dilaksanakan

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan proyek pembangunan berkelanjutan, setelah proses musdus akan dilanjut dalam proses musrenbangdes.

**Gambar 4.1 Musdus di Dusun Teseh dan Dusun Segrumung**



Sumber: Instagram Desa Meteseh 2023

### **b. Musrenbang dalam Tahap Perencanaan**

Di Desa Meteseh musrenbangdes sebagai forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan setiap 1 tahun 2 kali antara bulan September dan November secara partisipatif antara BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes. Yang dibahas pada perencanaan infrastruktur pembangunan melalui usulan-usulan masyarakat meteseh untuk ditampung sebagai pertimbangan dalam menjalankan proyek pembangunan.

Dalam musrenbangdes desa meteseh menerima banyak usulan-usulan masyarakat mengenai pembangunan fisik maupun non fisik. Sumber dari RKPDes daftar usulan tersebut dipilah berdasarkan tujuan SDG's Desa atau pembangunan berkelanjutan pada pembangunan infrastruktur diantaranya usulan dari warga dusun segrumung berupa jalan rabat beton, dusun sasak berupa pengaspalan jalan, dusun rowosari pengaspalan jalan dan pembangunan talud, dusun krajan tengah pembangunan jalan rabat beton, dusun krajan timur pembangunan jalan rabat beton, krajan barat pembangunan jalan tani dan dusun slamet pembangunan rabat beton, pembangunan kios desa, pembangunan saluran irigasi, peternakan kambing dan sapi dusun krajan barat pembangunan sumur bor serta usulan pembangunan non fisik diantaranya pelatihan UMKM.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Solihin warga dusun sasak, beliau menyampaikan:

“Kita usul untuk pembangunan infrastruktur dulu seperti jalan dan talud karena itu penting mbak buat akses transportasi sehari-hari” (Solihin, 2024)

Dengan wawancara beberapa narasumber diatas, peneliti masih tetap menggali keterlibatan tokoh masyarakat salah satunya dengan kelompok tani apakah mereka turut diundang dan terlibat secara langsung dalam musrenbangdes. Demikian peneliti wawancara dengan Pak Tris selaku ketua RT dan bermata pencaharian sebagai petani beliau menyampaikan:

“Kelompok petani iya masih diundang buat datang ke balai desa diajak diskusi buat usul pembuatan jalan tani gitu terkait sama diskusi harga pupuk. Waktu kemarin itu kelompok tani sama para buruh diajak rembug buat bahas talud/pondasi itu mbak, terus juga yang membuat peternakan kambing kita juga diikutkan untuk menyumbangkan usulan” (Tris, 2023)

Pandangan peneliti jika didalam musrenbangdes yang melibatkan banyak pihak secara terbuka akan berusaha bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.

**Gambar 4.2 Musrenbangdes Balai Desa Meteseh**



Sumber: Desa Meteseh 2023

Peneliti menganalisis forum musrenbangdesa Meteseh diadakan sebagai bagian dari sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa bersama masyarakat untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya, setiap elemen desa, baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat, harus dilibatkan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan sekedar keinginan elit desa. Perencanaan pembangunan membantu menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Melalui proses perencanaan yang baik, suatu daerah dapat merancang strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya.

### **c. Musdes dalam Tahap Perencanaan**

Partisipasi aktif warga desa dalam musyawarah desa diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pengelolaan desa secara berkelanjutan. Proses ini juga mencerminkan nilai-nilai kegotong-royongan dalam kehidupan masyarakat desa. Musyawarah desa adalah proses musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat. Dalam musdes yang diselenggarakan pada bulan September 2023 beberapa program yang diusulkan diantaranya dusun slamet usul pembangunan betonisasi, pembangunan kios desa, perwakilan kelompok tani usul pemeliharaan dan pembangunan saluran irigasi, RW 08 usul pengecoran jalan gang dan pembangunan

taman desa. Musdes yang dilaksanakan pada bulan September 2022 dan bulan Agustus 2023 mencatat hasil usulan-usulan tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas usulan rencana program pembangunan desa.

**Gambar 4.3 Musdes di Balai Desa Meteseh**



Sumber: Instagram Desa Meteseh 2023

Berdasarkan wawancara dengan Pak Tumijan selaku BPD, beliau menyampaikan:

“Kita akan menampung semua usulan-usulan saudara, insya Allah di semua bidang” (Tumijan, 2024)

Hal tersebut turut disampaikan oleh Bu Sulis anggota kelompok tani:

“Saling tukar ide dan gagasan contohnya beberapa bulan lalu disuruh usul pembangunan, terus dari kita memberi ide dibuatkan ternak kambing tapi dari kelompok buruh maunya dibangun ternak lele, akhirnya setelah saling diskusi (negosiasi) mendapat keputusan disetujui bersama untuk membuat peternakan kambing saja” (Sulis, 2024)

#### **d. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dalam Tahap Perencanaan**

Musyawah yang diselenggarakan untuk membahas tentang kesehatan, membahas hasil survey mawas diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD. Dalam musyawarah MMD tahun 2022-2023 membahas usulan yang diajukan setiap masyarakat yakni berupa usulan dari PKK dan posyandu berupa penyelenggaraan polindes, usulan PMT balita, PMT lansia, usulan kelas ibu hamil dan usulan penyuluhan bidang kesehatan dan usulan dari perwakilan kelompok buruh mengenai keadaan mendesak desa terkait penanggulangan bencana. Hal-hal tersebut sering dibutuhkan dalam perencanaan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang merebak di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara dengan Bu Hesti selaku kader posyandu dan Bu Tiwi selaku bidan desa meteseh, beliau menyampaikan:

“Saya usul terkait kesehatan bagi ibu hamil sama balita, terutama pencegahan stunting itu mbak sama pemberian gizi tambahan bagi ibu hamil selama 3 bulan pertama” (Tiwi, 2024)

Berkaitan dengan itu, Pak Maryadi sebagai warga, beliau menyampaikan:

“Saya pribadi dan warga dusun krajan timur usul soal penanggulangan bencana, walaupun disini jarang terjadi bencana alam tapi harus tetap waspada” (Maryadi, 2024)

MMD merupakan kegiatan yang dilaksanakan di setiap desa sebagai bagian dari kegiatan Desa Siaga. Tujuan MMD adalah untuk menentukan urutan prioritas masalah dan sebab masalah, upaya pencegahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada, dan akhirnya menyusun rencana kegiatan operasional untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan di desa

#### **e. Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) Tingkat RT dalam Tahap Perencanaan**

FKM suatu wadah yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara anggota masyarakat. Tujuan utama dari forum ini untuk memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok atau komunitas. Di Desa Meteseh forum komunikasi membahas

perencanaan pembangunan hingga evaluasi dan isu-isu sosial di tingkat RT. Usulan-usulan tersebut akan ditampung oleh setiap RT dan nantinya dilaporkan saat musrenbangdes. Berdasarkan kegiatan yang diselenggarakan di rumah RT 01 RW 07 diantaranya usulan dari PKK mengenai penyelenggaraan TK dan KB, usulan dari warga dusun segrumung rehabilitasi gorong-gorong, usulan rehab rumah tidak layak huni, usulan pengembangan pariwisata tingkat desa oleh karang taruna serta dari kader posyandu terkait penyelenggaraan desa siaga kesehatan.

**Gambar 4.4 FKM di rumah RT 01**



Sumber: Desa Meteseh 2022

Kesimpulan yang peneliti dapat bahwa perbedaan antara forum deliberatif dengan diskusi yakni berada pada tujuan akhir dari interaksi. Pelaksanaan forum di desa meteseh yang sering digelar meliputi musyawarah dusun, musyawarah perencanaan pembangunan desa, musdes, MMD (musyawarah masyarakat desa) membahas hasil survey mawas diri (SMD) dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil SMD tersebut dan FKM (forum komunikasi masyarakat) terkait perencanaan pembangunan hingga evaluasi dan isu-isu sosial di tingkat RT. Masyarakat sebagai pemeran utama sebagai sumbangsi pikiran atau ide. Forum deliberatif menciptakan ruang untuk mendengarkan pandangan beragam, memahami keragaman perspektif, dan mencapai konsensus atau keputusan bersama. Hal ini dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Berkaitan hasil wawancara diatas, tahap perencanaan terbagi tiga proses:

- 1) Focus group discussion tingkat RT/RW.
- 2) Melalui perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat kemudian dijadikan pemikiran sebagai perencanaan oleh pemerintah. Dimulai dari musdus untuk dapat menyuarakan aspirasi dari berbagai masyarakat dusun yang berlanjut para kadus menampung dan menyaring aspirasi tersebut untuk dijadikan pembahasan di dalam musrenbangdesa dan dilakukan pelaporan kepada pemerintah desa meteseh.
- 3) Melalui visi misi kepala desa seperti yang disampaikan oleh bu uswatun selaku kasi pemerintahan menyatakan syarat bagi kepala desa terpilih diwajibkan merancang RPJM yang berisi visi & misi untuk jangka 6 tahun kedepan dan harus meminta pendapat dari warga desa meteseh. Setelah RPJM tersebut dibuat lalu dilaksanakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat guna menyampaikan aspirasi dan pendapat mengenai visi dan misi tersebut, jika sudah mendapat persetujuan bersama maka akan dibuat RKP untuk jangka setahun dan akan ditindaklanjuti dalam APBDes sesuai dengan dana desa yang masuk, dengan begitu akan dianggarkan pembangunan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa forum diskusi deliberatif merupakan tempat di mana aktor-aktor yang terlibat berusaha mencapai pemahaman bersama atau konsensus melalui diskusi mendalam yang berfokus pada pertukaran argumen, analisis masalah, dan penelitian solusi yang paling memadai. Forum seperti ini biasanya dirancang untuk mendorong partisipasi aktif, pertukaran gagasan, dan proses pengambilan keputusan yang kolaboratif.

Analisis yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber, mengacu konsep ruang publik Jurgen Habermas menyatakan bahwa ruang publik merupakan wadah warga negara dimana dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, karena ruang publik juga merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif. Dari ruang publik ini dapat

terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Ruang publik tidak memiliki batasan, karena ruang publik dapat berada di mana saja. Jika ada masyarakat yang berkumpul bersama dan berdiskusi tentang topik atau tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.

Analisis yang dilakukan peneliti mengacu dengan teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas oleh Budi Hardiman bahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi bagus antara masyarakat dan pemimpin. Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi. Inilah yang dalam teori Jurgen Habermas disebut dengan Demokrasi Deliberatif. Teori ini berakar dalam teori tindakan komunikatif. Menurut Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia. Demokrasi Deliberatif mendekati situasi pembicaraan ideal bila berikut inklusif, bebas paksaan, terbuka dan simetris. Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama setara, setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggung jawabkan posisi masing-masing.

### 3. Anggaran Desa Meteseh Tahun 2020-2023 dalam Perencanaan

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan keuangan sesuai amanah yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 4.1 Keuangan Desa Meteseh 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAD	
	Hasil usaha desa	95.238.000
	Hasil asset	18.564.000
2	Dana desa	1.178.010.000
	Hasil pajak & retribusi	74.071.455
	ADD	466.105.000
	Bantuan dari provinsi	55.000.000
	Bantuan dari kabupaten	176.885.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.035.316.455</b>

Sumber: RKPDes 2020

**Tabel 4.2 Keuangan Desa Meteseh 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAD	
	Hasil usaha desa	125.680.000
2	Dana desa	1.167.203.000
	Hasil pajak & retribusi	210.534.145
	ADD	536.559.800
	Bantuan provinsi	55.000.000
	Bantuan kabupaten	100.000.000

<b>JUMLAH</b>	<b>2.194.976.945</b>
---------------	----------------------

Sumber: RKPDes 2021

**Tabel 4.3 Keuangan Desa Meteseh 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAD	
	Hasil usaha desa	117.749.000.00
2	Dana desa	1.281.132.000.00
	Hasil pajak & retribusi	208.504.131.00
	ADD	469.548.000.00
	Bantuan provinsi	41.000.000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.117.933.131.00</b>

Sumber: RKPDes 2022

**Tabel 4.4 Keuangan Desa Meteseh 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PAD	
	Hasil usaha desa	140.549.000,00
2.	Dana desa	1.340.211.000,00
	Bagian hasil pajak dan retribusi	86.642.068,00
	Alokasi dana desa	465.410.000,00
	Bantuan keuangan dari provinsi	41.000.000,00
	Bantuan keuangan dari kabupaten	590.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.663.812.068,00</b>

Sumber: RKPDesa 2023

Analisis mengenai anggaran desa yang masuk mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada penurunan juga dalam satu tahun kedepan di tahun 2022, tahun 2021 dari Rp. 2.194.976.945 miliar, tahun 2022 turun menjadi Rp. 2.117.933.131 miliar, penurunan tersebut menurun sekitar Rp. 77.043.814 juta, dikarenakan dampak pandemic covid-19. Namun angka penurunan yang terjadi tidak terlalu drastis. Dengan demikian perhitungan anggaran desa meteseh dari tahun 2020 hingga 2023 digunakan

sebagai salah satu rangkaian perencanaan dalam mendorong tahapan pembangunan yang akan direalisasikan, karena pembangunan tidak dapat berjalan jika pemasukan anggaran yang dimiliki desa tidak mencukupi.

Peningkatan PAD (pendapatan asli desa) dari tahun 2020 dan 2021 mencapai 1,3%, kemudian PAD dari tahun 2022 dan 2023 mencapai 1,2%. Selanjutnya peningkatan DD (dana desa) dari tahun 2020 dan 2021 mencapai 1,5%, kemudian tahun 2022 dan 2023 mencapai 1,04%. Dengan demikian, melihat PAD desa meteseh dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, mulai tahun 2020 memiliki PAD Rp. 95.238.000 kemudian tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 12.568.000 artinya ada peningkatan sebanyak Rp. 82.670.000 yang disebabkan karena desa meteseh mulai memiliki desa wisata berupa kampoeng lawas, kemudian dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan yang lebih banyak dari Rp. 117.749.000 menjadi Rp. 140.549.000 adanya peningkatan sebanyak Rp. 22.800.000 karena ada indikasi desa meteseh memiliki asset desa berupa desa wisata yaitu kampoeng lawas menyumbang dana ke desa selama satu tahun sebesar Rp. 75.000.000 dan (pasar karetan) titik kumpul menyumbang dana ke desa selama satu tahun sebesar Rp. 50.000.000 dan peternakan kambing yang memiliki 12 kambing menyumbang dana ke desa senilai Rp. 20.000.000 selama satu tahun.

#### **4. Pengambilan Keputusan dalam Tahap Perencanaan**

Proses deliberatif bertujuan untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan. Sehubungan dengan hal tersebut maka desa meteseh dalam mencapai kesepakatan bersama juga melewati proses negosiasi misalnya dalam forum musyawarah pada pembahasan penetapan RPJM desa tahun 2020-2026.

a. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktik pengambilan keputusan:

- 1) Pemaparan informasi, diawali memberikan sedikit penyuluhan saat musdus oleh para kadus kepada masyarakat terkait informasi pada proyek-proyek desa yang akan dilaksanakan. Misal dari prioritas pembangunan tercantum RPJMDesa 2020-2023 kemudian dilanjutkan laporan ke dalam RKPDes pertahunnya

- 2) Melakukan diskusi terbuka, pada saat musrenbangdes memberi kesempatan seluruh warga untuk menyampaikan pandangan, ide atau pendapat mereka. Dipersilahkan untuk memberi sanggahan atau menyampaikan ketidaksetujuan terhadap rancangan RPJMDes 2020-2026 dengan tetap mendorong diskusi terbuka dan inklusif dan menekankan untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain.
- 3) Analisis bersama, mengevaluasi pro dan kontra dari masing-masing pendapat dan menganalisis dampak dari keputusan yang akan diambil. Melalui negosiasi antar masyarakat dan pemerintah desa serta pendamping lokal desa
- 4) Penentuan keputusan, melakukan pemungutan suara atau konsensus untuk menentukan keputusan. Memastikan bahwa semua warga menyetujui rancangan RPJMDes 2020-2026 dan merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan akan dilanjutkan dalam proses pembuatan RKPDes di setiap tahunnya.
- 5) Keputusan musdes maupun musrenbang harus disertai dengan berita acara yang ditanda tangani oleh peserta musyawarah sebagai bukti kesepakatan bersama. Setelah musdes kepala desa dan aparat desa bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati
- 6) Kesepakatan bersama, memastikan semua masyarakat setuju dan mendukung keputusan yang diambil. Dengan, menyetujui rancangan RPJMDes tahun 2020-2026 yang didalamnya terdapat serangkaian pembangunan fisik dan non fisik supaya dapat terealisasikan untuk terwujudnya RKPDes di setiap tahunnya.

b. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan desa meteseh, strategi utama pembangunan jangka menengah dalam RPJMDesa meteseh 2020-2026 secara berkesinambungan yakni:

- 1) Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif
- 2) Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat
- 3) Terwujudnya kondisi lingkungan aman, tentram, sejahtera

Untuk memperkuat pernyataan berikut maka peneliti melakukan wawancara di lapangan dengan Pak Tumijan selaku Ketua BPD desa meteseh beliau menyampaikan:

“Mengambil keputusan memang ada tahapan mbak. Pokoknya dari diskusi bersama, pengambilan kesepakatan bersama tidak langsung tiba-tiba diputuskan apalagi cuma beberapa pihak, kalo gitu pasti banyak yang kurang setuju, sering ada yang berbeda pendapat pastinya, tapi diambil jalan tengahnya” (Tumijan, 2023)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Ari selaku Kasi Pelayanan, beliau menyampaikan bahwa:

“Partisipasi warga ini penting, sesuai kemauan mereka dan demi kebaikan bersama buat terwujudnya pembangunan di desa ini karena sama seperti konsep demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kita sama cuma kita di tingkat desa. Hasil akhirnya untuk mencapai mufakat aja mbak”( Ari, 2023)

Analisis yang diambil setelah proses pengambilan keputusan diatas maka selanjutnya, dilakukan pelaksanaan yang mana keputusan diambil untuk mulai diimplementasikan. Setelah implementasi, hasil dari keputusan dievaluasi. Ini melibatkan penilaian apakah keputusan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau apakah ada perubahan yang diperlukan demi kepentingan bersama. Musyawarah mufakat salah satu bentuk upaya dalam pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan kaum elit, golongan atau pribadi.

## **B. Tahap Pelaksanaan**

### **1. Keterlibatan Masyarakat dalam Ruang Publik**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap eksekusi atau implementasi dari rencana pembangunan yang telah disusun. Ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan proyek-proyek infrastruktur, program atau inisiatif pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam tahap ini dapat menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat Desa Meteseh di dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan yang memiliki beberapa peran sebagai berikut:

#### **a. Sebagai Pengamat**

Pemerintah desa meteseh memberikan ruang kepada masyarakat desa dalam tahap pelaksanaan untuk terlibat agar dapat mengamati berlangsungnya proyek pembangunan di bidang infrastruktur dan mengawasi jalannya pembangunan jika terjadi penyimpangan. Pemerintah desa memberikan informasi terkait proyek pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yaitu:

- 1) Masyarakat dapat menyaksikan melalui Youtube Desa Meteseh Kecamatan Boja yang disiarkan secara live oleh sekretaris desa pada dusun yang sedang dilakukan proses pembangunan seperti saat sedang betonisasi jalan dan pengaspalan jalan. Keadaan tersebut akan disiarkan melalui youtube seperti saat perbaikan jalan di Dusun Rowosari tahun 2022
- 2) Masyarakat dapat melihat melalui baliho yang dipasang di depan kantor balai desa meteseh yang berisi publikasi rencana, anggaran dan laporan kemajuan secara teratur sehingga membantu masyarakat memahami proses dan kemajuan proyek.
- 3) Masyarakat dapat memantau secara langsung, pemerintah desa membuka ketersediaan bagi masyarakat untuk mengawasi proses pembangunan di lokasi, masyarakat dapat datang untuk memastikan bahwa konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana, sesuai standar teknis, dan pengawasan langsung oleh masyarakat dapat meminimalkan risiko terjadinya kekurangan atau cacat dalam proyek pembangunan. Dengan masyarakat memantau langsung kondisi di lokasi maka dapat mengurangi risiko penyelewengan dana yang dilakukan oleh

oknum-oknum tertentu dalam upaya tindak korupsi, sehingga dengan terlibatnya unsur masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

**Gambar 4.5 Pengecoran jalan Dusun Rowosari**



Sumber: Youtube Dusun Rowosari 2022

#### **b. Sebagai Sumbangsi Tenaga**

Unsur masyarakat turut terlibat dalam tahap pelaksanaan pembangunan melalui sumbangan tenaga dan kerja sama bersifat sukarela artinya tidak memaksa dapat menjadi aspek yang sangat berharga. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga dapat mencakup berbagai aktivitas, mulai dari kontribusi fisik hingga kegiatan berorientasi sosial. Kontribusi fisik yang dilakukan di desa meteseh:

- 1) Pekerjaan kasar dilakukan oleh kaum laki-laki dusun tersebut dan pemuda dusun yang dilakukan secara sukarela menyumbangkan tenaganya atas kesadaran sendiri. Berupa gotong royong dan kerja bakti seperti membantu dalam mengangkut material misalnya semen, kayu, pasir dan batu bata dan membersihkan lokasi pembangunan dari genangan air, lumpur dan lumut
- 2) Kontribusi dasar dilakukan oleh masyarakat laki-laki yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pandai besi, tukang bangunan atau tukang las dan memiliki pengalaman dalam pengecoran dan pengaspalan jalan. Keadaan itu masyarakat dapat menyumbangkan keahlian yang dimiliki terkait pertukangan, pengelasan, pembetonan untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
- 3) Pemeliharaan dilakukan oleh semua kalangan mulai laki-laki, perempuan, anak muda hingga orang tua, dapat membantu dalam merawat fasilitas atau infrastruktur yang telah dibangun, seperti membersihkan sampah yang ada

diselokan jalan, memelihara aspal agar tidak cepat retak dan air dapat meresap, dan melakukan perbaikan ringan.

Menurut pemaparan bu uswatun yang memberi penjelasan terkait tahapan pelaksanaan, beliau menyampaikan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertama sebagai pengamat atau tugasnya memantau berjalannya proyek itu, misal lagi dilakukan pembangunan talud di dusun krajan tengah nah nanti warga krajan mempunyai tugas mengamati dari awal sampai pembangunan selesai terus saat musdes nanti dilaporkan bagaimana proyek itu dilakukan, dan sumbangsi tenaga pada hari minggu” (Uswatun, 2023)

Terkait penjelasan dari bu uswatun tentang prioritas pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peneliti juga wawancara Pak Tumijan selaku ketua BPD Meteseh beliau menyampaikan:

“Masih ada yang belum terealisasi karena desa meteseh ini termasuk desa paling luas di kecamatan boja jadi buat pembangunan dilaksanakan di titik yang bisa melayani masyarakat secara umum dulu” (Tumijan, 2023)

Dengan demikian wawancara bersama Pak Solihin sebagai warga, beliau menyampaikan:

“Saya kerja di pabrik ban mbak, kalo minggu shift malam ya ikut gotong royong, tapi kalo shift pagi tidak ikut mbak” (Solihin, 2023)

Dalam pelaksanaan pembangunan keterlibatan masyarakat di desa meteseh meliputi dua macam: 1). Sebagai pengamat, untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek dan melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi penyimpangan. 2). Sumbangsi tenaga berupa gotong royong secara sukarela untuk mengikutsertakan warga dalam kegiatan gotong royong untuk mempersiapkan lokasi proyek dan melakukan pemeliharaan infrastruktur. Berdasarkan pemaparan dapat dicermati bahwa penting untuk memahami bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keseluruhan proses ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk memastikan keberhasilan dan berkelanjutan dari upaya pembangunan tersebut. Dilihat wilayah desa meteseh termasuk cukup luas di kecamatan boja maka pembangunan dilakukan menggunakan skala prioritas.

## **2. Monitoring dalam Tahap Pelaksanaan**

### **a. Keterlibatan Masyarakat dalam Monitoring**

- 1) Masyarakat memberikan masukan-masukan di lokasi secara langsung kepada Tim Pengawas Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa apabila kurang puas dengan hasil akhir pembangunan maupun adanya terjadi kekurangan pada proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan di setiap dusun untuk meningkatkan kualitas pembangunan agar sesuai standar dan sesuai keinginan.
- 2) Jika ada masalah masyarakat desa meteseh dapat melakukan mekanisme pengaduan publik dengan melaporkan ketidaksesuaian atau masalah yang terjadi melalui Hotline Hubungi.Kami.Meteseh yang didalamnya tercantum nomor telepon dari sekretaris desa meteseh.
- 3) Monitoring partisipatif dengan melibatkan masyarakat meteseh dalam monitoring pelaksanaan pembangunan melalui musyawarah desa. Pemerintah desa menyelenggarakan pertemuan rutin di balai desa dengan mengundang masyarakat setiap 2 kali dalam sebulan selama pelaksanaan proyek pembangunan berlangsung, untuk memberikan informasi terbaru terkait material yang digunakan dan alokasi anggaran yang digunakan, memberikan klarifikasi progres kemajuan dari proyek pembangunan dalam tingkatan persen sesuai kondisi terkini, dan mendiskusikan laporan kemajuan proyek. Serta masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka terhadap proyek. Karena monitoring bertujuan sebagai pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan mencapai tujuan yang diinginkan

### **b. Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Monitoring**

- 1) Pembentukan tim khusus monitoring, pemerintah desa meteseh membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek pembangunan. Di desa meteseh tahapan monitoring dilakukan bersama antara Pemerintah Desa dengan Tim Pengawas Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa. Adanya tim pengawas dari kecamatan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pendamping desa dari kecamatan bertugas untuk mengamati dan memberi arahan pada jalannya pembangunan dan memantau

penggunaan bahan material yang setiap hari minggu terjun ke lapangan untuk memantau secara detail lokasi kegiatan pembangunan.

- 2) Pemantauan langsung, pemerintah desa meteseh dapat secara langsung memantau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan melakukan kunjungan di lokasi secara berkala. Hal ini untuk menilai kemajuan pekerjaan, dan mengidentifikasi terjadinya masalah. Selanjutnya pemerintah desa memeriksa laporan dari perangkat desa tentang pelaksanaan pembangunan yang telah terealisasi menunjukkan data yang dikumpulkan dari PLD dan tim pengawas kecamatan sudah akurat.

Menurut hasil wawancara dengan Pak Rohani selaku Sekretaris Desa Meteseh, beliau menyampaikan:

“Warga desa meteseh ini jika tidak dilibatkan selama proses kegiatan nanti ada yang melapor ke dinas, jadi kami pihak desa didatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah. Karena adanya aduan masyarakat yang masuk di jaman sekarang ini sudah sangat modern sudah serba media sosial jadi ada laporan langsung dapat tersampaikan”(Rohani, 2023)

Pernyataan diatas diperkuat oleh Bu Suparmi selaku Bu Kadus, beliau menyampaikan:

“Disini yang mengamati (monitoring) pembangunan itu dari masyarakat, tim pengawas dan tim pendamping desa. Kalo tim pengawas sama tim pendamping desa itu dari kecamatan boja semua mbak. Tugasnya mengawasi keliling saat pembangunan berlangsung” (Suparmi, 2023)

### 3. Pelaksanaan Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2020-2023

**Tabel 4.5 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2020**

NO	KEGIATAN	NOMINAL (RP)	REALISASI	
			YA	TDK
1	Pembangunan talud dusun krajan barat I	53.950.000	Y	
2	Pembangunan talud dusun krajan barat II	10.000.000	Y	
3	Pembangunan talud dusun	20.550.000	Y	

	krajan barat III			
4	Pembangunan talud	75.000.000	Y	
5	Pembangunan talud perempatan bp. Tunis	28.900.000		X
6	Pembangunan talud sebelah utara	21.850.000		X
7	Pembangunan talud sebelah timur bp.tunis	31.400.000		X
8	Pembangunan talud sebelah utara	13.400.000		X
9	Pengecoran jalan dusun segrumung	178.994.000	Y	
10	Pengecoran jalan	98.250.000	Y	
11	Pengecoran jalan gang	80.000.000	Y	
12	Pengecoran jalan gang samping balai desa	36.874.000	Y	
13	Pengecoran jalan gang lapangan timur	51.700.000		X
14	Pengecoran jalan	414.100.000		X
15	Renovasi balai desa	45.000.000	Y	
16	Pengecoran jalan dusun rowosari	216.450.000		X
17	Pengecoran jalan desa	171.450.000	Y	
18	Renovasi TK	4.000.000	Y	
19	Pengecoran jalan gang	80.000.000		X
<b>JUMLAH</b>		<b>1.477.563.000</b>		

Sumber: RKPDes 2020, diolah peneliti

**Tabel 4.6 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2021**

NO	KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI	
			YA	TDK
1	Penyuluhan & pelatihan pendidikan masyarakat	9.400.000	Y	
2	Penyelenggaraan posyandu	36.948.000	Y	
3	Pelatihan kesehatan	6.600.000	Y	

4	Bina keluarga balita (BKB)	4.800.000	Y	
5	Pembangunan jalan krajan timur	155.000.000	Y	
6	Pembangunan jalan krajan tengah	155.000.000	Y	
7	Pembangunan jalan tani krajan tengah	207.989.000	Y	
8	Pembangunan jalan tani teseh	182.700.000	Y	
9	Rehab RTLH	36.000.000	Y	
10	Pembinaan karang taruna	2.050.000		X
11	Operasional PKK	20.550.000	Y	
12	Pelatihan & penyuluhan perempuan	9.600.000	Y	
13	Normalisasi saluran irigasi	85.700.000		X
14	Peralatan posyandu	4.160.000	Y	
15	Penyertaan modal Bumdes	140.659.000	Y	
16	Operasional LINMAS	4.800.000	Y	
17	Operasional LPMD	2.650.000	Y	
18	Oprasional KPMD	5.000.000	Y	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.467.088.099</b>		

Sumber: RKPDes 2021, diolah peneliti

**Tabel 4.7 Pembangunan Desa Meteseh Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	NOMINAL (RP)	REALISASI	
			YA	TDK
1	Penyelenggaraan posyandu (PMT, kls bumil, lansia)	46.741.000	Y	
2	Penyuluhan & pelatihan kesehatan	10.575.000	Y	
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	5.425.000	Y	
4	Pembinaan PMR	3.766.000	Y	
5	Pembangunan jalan rowosari	165.650.000	Y	
6	Pembangunan jalan krajan barat	100.000.000	Y	
7	Pembangunan jalan tani	290.375.000	Y	

	krajan tengah			
8	Pembangunan jalan tani slamet	200.000.000	Y	
9	Pembangunan talud jalan slamet-segrumung	141.475.000	Y	
10	Rehab RTLH	36.000.000	Y	
11	Operasional LPMD	1.150.000	Y	
12	Operasional PKK	16.535.000	Y	
13	Pembinaan karang taruna	4.390.000	Y	
14	Peternakan kambing	172.408.000	Y	
15	Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan	9.460.000	Y	
16	Pembangunan kios desa	199.620.000	Y	
17	Penanggulangan bencana	1.724.000		X
18	Pemeliharaan gedung serba guna	4.227.645	Y	
19	Operasional LINMAS	4.800.000	Y	
20	Operasional KPMD	5.000.000		X
21	Musyawarah Bumdes & Evaluasi Bumdes	57.660.000	Y	
<b>JUMLAH</b>		<b>2.799.516.495</b>		

Sumber: RKPDes 2022, diolah peneliti

**Tabel 4.8 Pembangunan Desa Meteseh 2023**

NO	KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI	
			YA	TDK
1	Pelatihan jurnalistik	3.245.000	Y	
2	Pembangunan senderan krajan tengah	200.000.000	Y	
3	Penyelenggaraan TK dan KB	4.200.000	Y	
4	Penyelenggaraan posyandu lansia, balita, bumil	55.657.000	Y	
5	Pelatihan kesehatan	7.875.000	Y	
6	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	5.750.000	Y	
7	Pembangunan betonisasi jalan dusun rowosari	200.000.000	Y	

8	Pembangunan jalan dusun teseh	100.000.000	Y	
9	Pengaspalan jalan dusun segrumung	100.000.000	Y	
10	Rehabilitasi gorong2 dusun segrumung	18.669.885	Y	
12	Pembangunan talud dusun sasak	68.975.000	Y	
13	Rehab rumah tidak layak huni	100.000.000	Y	
12	Pembangunan taman desa	45.826.000	Y	
13	Kegiatan karang taruna	4.360.000	Y	
14	Operasional PKK	30.125.000	Y	
15	Peternakan kambing	262.750.000	Y	
16	Pemeliharaan saluran irigasi	10.350.000	Y	
17	Pembangunan kios desa	267.225.600	Y	
18	Pengadaan bibit sayur & buah	255.190.669	Y	
19	Pembangunan jalan krajan timur	100.000.000		X
20	Pembangunan jalan teseh	100.000.000		X
21	Pembangunan jalan sasak-segrumung	100.000.000		X
22	Pembangunan jalan slamet	100.000.000		X
23	Operasional LPMD	1.225.000	Y	
24	Pelatihan bukidamber	19.020.000	Y	
25	Penyuluhan kadarkum	4.050.000	Y	
<b>JUMLAH</b>		<b>3.945.802.944</b>		

Sumber: RKPDes 2023, diolah peneliti

Melihat pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi menunjukkan bahwa pembangunan dari tahun 2020 hingga 2023 adanya peningkatan namun dilakukan secara bertahap. Anggaran tahun 2020 ke tahun 2021 naik 1.6%, kemudian anggaran tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 1.1%, kemudian tahun 2022 ke tahun 2023 mencapai 1.4%.

Dalam tahap perencanaan tahun 2020 rencana alokasi anggaran Rp. 2.035.316.455, tahun 2021 rencana alokasi anggaran Rp. 2.194.976.945, tahun 2022 rencana alokasi anggaran Rp. 2.117.933.131.00, tahun 2023 rencana alokasi anggaran Rp. 2.663.812.068,00. Dalam tahap pelaksanaan tahun 2020 alokasi anggaran Rp. 1.477.563.000, tahun 2021 alokasi anggaran Rp. 2.467.088.099, tahun 2022 alokasi anggaran Rp. 2.799.516.495, tahun 2023 alokasi anggaran Rp. 3.945.802.944

**Tabel 4.9 Perbandingan anggaran**

Tahun	Tahap Perencanaan (Rencana alokasi anggaran)	Tahap Pelaksanaan (Realisasi alokasi anggaran)
2020	2.035.316.455	1.477.563.000
2021	2.194.976.945	2.467.088.099
2022	2.117.933.131	2.799.516.495
2023	2.663.812.068	3.945.802.944

Sumber: Rkpdes, diolah peneliti

Menurut analisis peneliti, pembangunan diatas merupakan pembangunan yang terealisasi baik infrastruktur maupun non fisik. Yang dilakukan melalui skala prioritas dan SDGs desa atau pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pembangunan yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang mencakup keseluruhan. Namun masih ada beberapa pembangunan baik infrastruktur maupun non fisik yang belum terealisasi dikarenakan salah satu penyebabnya tidak masuk kriteria tujuan desa meteseh yang tercantum dalam visi & misi.

Setidaknya beberapa usulan-usulan warga meteseh yang ditampung dalam forum musyawarah telah direalisasikan oleh pihak pemerintah desa yang telah mewujudkan pemberdayaan bagi masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari proses deliberatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dalam menyampaikan aspirasi dan menyumbangkan ide gagasan demi kemajuan desa yang berkelanjutan untuk menyongsong kesejahteraan bersama. Dalam kegiatan pembangunan tahun 2020-2023 tidak hanya bidang infrastruktur namun berbagai di

bidang lain turut terealisasi diantaranya aspek pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta mencakup aspek penanggulangan bencana.

### **C. Tahap Evaluasi**

Pada tahap ini evaluasi berguna untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap dampak sosial dari pembangunan tersebut apakah berhasil, bermanfaat, ada kemajuan atau tidak. Jika pembangunan sudah sesuai prosedur dan berhasil akan menciptakan suatu perubahan sosial khususnya pembangunan infrastruktur bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi dalam pembangunan adalah alat penting untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari kegiatan pembangunan.

#### **1. Keterlibatan Aktor-Aktor dalam Ruang Publik**

##### **a. Pemerintah Desa**

- 1) Pemerintah desa membentuk tim bersama Pendamping Lokal Desa yang bertugas untuk mengevaluasi dampak, kinerja dan keberlanjutan proyek pembangunan. Menurut pemaparan Bu Elok Ilma sebagai pendamping lokal desa Meteseh berasal dari Kecamatan Boja, beliau menyampaikan dalam sistem evaluasinya berjalan ketika pendamping lokal desa membagikan hasil evaluasi dari program kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan termasuk pembangunan fisik maupun non fisik, kemudian disampaikan kepada pemerintah desa lalu pihak aparat desa meninjau ke lokasi pembangunan, kemudian aparat desa melakukan konsultasi dengan masyarakat untuk mengetahui pandangan unsur masyarakat terhadap terealisasinya kegiatan pembangunan. Karena ini melibatkan penilaian dan dukungan masyarakat mengenai pemeliharaan infrastruktur.
- 2) Aparatur desa meteseh mengumpulkan data yang relevan terkait pelaksanaan proyek, seperti data sosial berupa opini dan komentar masyarakat dalam forum musyawarah desa. Selain itu, pengumpulan data lebih mudah saat melakukan observasi langsung ke lokasi akan bertemu masyarakat secara langsung sehingga lebih mudah memperoleh umpan balik dan tanggapan dari masyarakat.
- 3) Pemerintah desa meteseh mengukur kinerja proyek dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk melihat pembangunan yang direalisasikan sudah relevan dengan visi misi yang

tercantum dalam RPJMDesa 2020-2026 serta pembangunan tersebut sudah mencakup usulan semua masyarakat meteseh dan pembangunan tersebut berkesinambungan dengan tujuan SDGs desa meteseh yang berupaya melaksanakan pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.

## **b. Masyarakat**

- 1) Unsur masyarakat ikut terlibat dalam forum diskusi untuk menyampaikan pertanyaan maupun pendapat dari masyarakat tentang hasil akhir pembangunan dan pihak aparat desa meteseh juga mengadakan kegiatan “dengar pendapat” di balai desa meteseh untuk mendapatkan masukan tentang program pembangunan yang akan dilakukan dimasa depan. Hal ini dilakukan agar terciptanya transparansi antara pemerintah desa meteseh dengan masyarakat.
- 2) Masyarakat meteseh memberikan umpan balik untuk membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan program pembangunan yang terealisasi mencakup pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia sebagai pandangan dalam menyusun program pembangunan yang lebih baik di masa depan.
- 3) Masyarakat dapat melakukan pelaporan dampak dari segi positif maupun negatif kepada pendamping lokal desa yaitu Bu Elok Ilma yang secara rutin melakukan observasi ke lapangan setelah selesainya proses pembangunan. Karena ini melibatkan penilaian dan dukungan masyarakat mengenai pemeliharaan infrastruktur.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Uswatun selaku Kasi Pemerintahan, beliau menyampaikan:

“Desa meteseh saat tahap evaluasi yang terlibat pasti ada masyarakat, pemerintah desa termasuk perangkat desa sama pendamping lokal desa mbak. Tugasnya mereka saling mencermati berjalannya proyek pembangunan dan memberi umpan balik” (Uswatun, 2023)

Dengan demikian, peneliti mewawancarai salah satu warga bernama Pak Roni, beliau menyampaikan:

“Hasil akhirnya dari warga kebanyakan menerima, warga merasa apa yang sudah dibangun itu dapat bermanfaat kedepannya mbak” (Roni, 2023)

Prioritas pembangunan infrastruktur sejak tahun 2020-2023 salah satunya meliputi pembangunan dan perbaikan jalan dusun, pembangunan talud, pembangunan jalan tani, pemeliharaan saluran irigasi, yang lainnya ada membangun kios desa dan membangun peternakan kambing. Dalam pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan yang sudah terlaksana memiliki dampak positif dan pembangunan bersifat keberlanjutan akan bermanfaat untuk menunjang kehidupan.

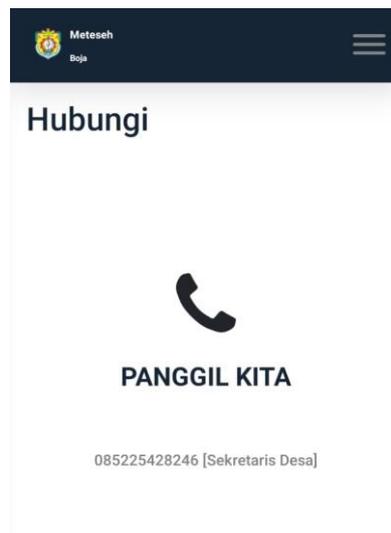
## **2. Layanan Pengaduan dan Tanggapan dalam Tahap Evaluasi**

### **a. Pelayanan Pengaduan**

- 1) Melalui layanan aduan/hotline (hubungi kami meteseh) tercantum nomor telepon Pak Rohani selaku Sekretaris Desa Meteseh
- 2) Melalui WhatsApp grup sedulur meteseh, yang masuk ke dalam grup sedulur meteseh yaitu perwakilan dari anggota masyarakat setiap dusun, aparat desa, kadus dan RT/RW. Karena batas maksimal anggota WhatsApp hanya 1.000 orang

Dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan pengaduan (hotline) di desa meteseh ada 2 pilihan yakni melalui hubungi kami desa meteseh didalamnya tercantum nomor telepon Pak Rohani selaku Skretaris Desa Meteseh, melalui Aplikasi WhatsApp dipilih karena mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua orang serta dapat melalui musyawarah disampaikan secara lisan. Akan tetapi dari ketiga cara tersebut yang dianggap paling efektif dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat yaitu melalui layanan pengaduan atau *hotline* Hubungi.Kami.Meteseh yang sudah tercantum nomor telepon dari sekretaris desa. Sedangkan layanan pengaduan melalui WA Grup kurang efektif karena hanya dapat memuat 1000 dalam 1 grup.

**Gambar 4.6 Pelayanan aduan desa meteseh**



Sumber: Website Desa Meteseh 2023

Menurut pernyataan Pak Roni sebagai masyarakat, beliau menyampaikan:

“Warga meteseh kalau mengadu lewat WhatsApp yang ada di website desa atau di WA punya grup namanya Sedulur Meteseh anggotanya masyarakat sama perangkat desa, RT/RW, BPD. Ya pokoknya bahas apa aja disitu mbak jadi semua bisa melihat” (Roni, 2023)

Sehubungan dengan itu peneliti turut wawancara kepada Pak Rohani selaku Sekretaris desa meteseh:

“Pengaduan seringnya lewat WA karena sekarang ini era sosial media jadi perangkat desa meteseh membuat grup WA itu. Tapi juga disediakan layanan pengaduan di hubungi kami di website desa meteseh disitu tercantum nomor saya. Boleh komplein terkait apapun tapi harus sesuai aturan dan disampaikan dengan kata yang sopan. Pasti nanti kita proses melihat tingkat kepentingannya” (Rohani, 2023)

## **b. Tanggapan**

Pemerintah desa dalam menanggapi pengaduan dengan mengklasifikasikan pengaduan berdasarkan prioritas atau tingkat kepentingannya. Jika aduan tersebut masalah yang cukup penting maka akan ditindak segera, sementara aduan lain akan dijadwalkan penanganan selanjutnya. Setelah itu pihak perangkat desa akan melakukan komunikasi kepada masyarakat yang melakukan komplein. Selanjutnya memberi informasi terbuka kepada masyarakat tentang hasil penanganan pengaduan, hal ini dapat

dilaporkan saat kegiatan pertemuan warga atau media komunikasi seperti WhatsApp dan website desa. Mekanisme pengaduan dan tanggapan pemerintah desa yang efektif merupakan bagian penting dari pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah desa.

### **3. Hambatan dan Tantangan dalam Tahap Evaluasi**

#### **a. Hambatan dalam Proses Pengambilan Keputusan**

- 1) Ketidakadilan, dalam proses musyawarah terkadang timbul rasa tidak adil bagi masyarakat meteseh ketika pengambilan keputusan. misalnya, saat pendapat kaum minoritas diabaikan dan tidak mendapat respon dari aparat desa maka musyawarah tidak mencerminkan keadilan.
- 2) Kurangnya keterampilan komunikasi, terjadi saat musyawarah berlangsung, masyarakat meteseh tidak mampu menyampaikan gagasan dan keinginan mereka dengan jelas kepada pemerintah desa maka proses musyawarah berjalan kurang efektif
- 3) Ketidakmampuan mencapai konsensus, terjadi saat berlangsungnya musyawarah baik dalam musdus, musrenbang, MMD, dan FKM antara masyarakat desa meteseh dengan pemerintah desa tidak menemui titik temu dalam pengambilan keputusan maka musyawarah dapat terhambat.
- 4) Dominasi pihak tertentu, terkadang dalam proses deliberasi akan muncul beberapa pihak (x) yang lebih mendominasi pada kegiatan dan melakukan intervensi yang mengakibatkan kelompok minoritas (y) menjadi kalah dalam menyampaikan keinginannya cenderung terabaikan

#### **b. Tantangan yang Dihadapi**

- 1) Mengelola perbedaan pendapat, saat musdus, musrenbang, musdes, MMD dan FKM sering muncul perbedaan pandangan dan pendapat terkait persoalan yang sedang dibahas dalam musrenbang saat perdebatan pada pembangunan ternak kambing atau ternak lele antara kelompok buruh dan kelompok tani. Tantangan ini muncul ketika sulit untuk mencapai kesamaan persepsi atau pandangan.
- 2) Desa meteseh padat penduduk, karena menjadi salah satu desa paling luas di kecamatan boja dengan wilayah 7,55 Km<sup>2</sup> dan memiliki 8 dusun menjadi

tantangan bagi pemerintah desa untuk mengumpulkan masyarakat dalam forum dan menjangkau bahwa seluruh masyarakat dapat berkontribusi aktif pada setiap kegiatan pembangunan dan menjaga terciptanya kerukunan antar sesama.

Berdasarkan pemaparan oleh Bu Uswatun selaku Kasi Pemerintahan terkait hambatan yang dihadapi, beliau menyampaikan bahwa:

“Memang dalam proses ini ga mudah ya mbak, harus bener-bener memperhatikan semua aspek dari masyarakat dan dari pihak pemdes juga perlu intropeksi sama kinerja kita selama ini. Melibatkan warga itu bisa dibbilang mudah tapi juga susah kan ada beberapa yang mungkin tidak berkenan atau ada warga yang sibuk bekerja” (Uswatun, 2023)

Hal serupa disampaikan oleh Pak Sisyanto selaku Kepala Desa Meteseh:

“Hambatan itu akan kita cari terus jalan keluarnya, kita tetap mengusahakan yang terbaik bagi kemajuan desa meteseh ini. Tantangannya kita semaksimal mungkin selalu berlaku adil dan tetap memprioritaskan aspirasi dan kepentingan masyarakat” (Sisyanto, 2023)

Oleh karena itu, peneliti mengambil sudut pandang salah satu warga bernama Bu Suyatini, bagaimana hambatan yang sering terjadi di desa meteseh, beliau menyampaikan:

“Ada beberapa masyarakat dusun (x) yang datang musyawarah jika ada uangnya saja, prinsipnya desa ini mau diapain aja terserah gitu mungkin tidak terlalu peduli. Terus juga hambatan lain kan orang meteseh sedikit yang menganggur jadi banyak yang kerja sebab itu saat diundang musdes saat siang tidak banyak yang hadir dan saat malam kadang beberapa orang sudah capek atau masih ada yang lembur kerja” (Suyatini, 2023)

Menurut analisis peneliti cara mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kesadaran, keterbukaan, dan kemauan untuk bekerja sama. Kontribusi semua pihak, pelatihan keterampilan komunikasi dan negosiasi serta upaya untuk mengatasi konflik dapat membantu meningkatkan efektivitas musyawarah. Karena dalam suatu desa pasti ada beberapa individu yang sulit untuk berkontribusi guna membangun kemajuan desa sendiri misalnya tidak berkenan datang saat musyawarah, hal itulah dikatakan sebagai partisipasi pasif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk mengedepankan keterbukaan dan komunikasi yang efektif dalam proses musyawarah. Memastikan

bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan menyediakan forum yang aman untuk mengekspresikan pendapat dapat membantu meningkatkan kualitas musyawarah. Selain itu, pengelolaan perbedaan pendapat sebagai upaya untuk mencapai kesamaan pendapat menjadi faktor dalam menghadapi tantangan.

## Analisis

Hal menarik yang peneliti analisis yaitu Desa Meteseh menyelenggarakan praktik deliberatif dalam proses pembangunan dengan melibatkan elemen masyarakat di segala aspek dari mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Pemerintah desa memfasilitasi masyarakat desa berupa forum deliberatif untuk digunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi, menyalurkan pendapat untuk negosiasi dan diskusi sebagai upaya mencapai *konsensus* atau pengambilan keputusan bersama. Disini masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek yang membangun artinya semua kebijakan pembangunan harus melalui ide-ide dari masyarakat. Terlihat keterlibatan elemen masyarakat mulai tahap perencanaan diberikan forum deliberatif untuk menyampaikan berbagai usulan program pembangunan, dalam perencanaan terdapat perencanaan alokasi anggaran yang akan digunakan pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembangunan ini dilakukan mengikuti skala prioritas dan SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan). Kemudian dalam tahap pelaksanaan masyarakat dilibatkan sebagai pengamat & sebagai sumbangsi tenaga, kemudian dalam monitoring masyarakat diberikan fasilitas agar dengan mudah mengkases berjalannya kegiatan pembangunan melalui Youtube dan dapat melakukan layanan pengaduan melalui [hubungi.kami.meteseh](mailto:hubungi.kami.meteseh), kemudian pada tahap evaluasi keterlibatan masyarakat ikut meninjau dan memberi umpan balik kepada pemerintah desa dan pendamping lokal desa serta pihak pemerintah desa menyediakan fasilitas layanan pengaduan untuk menampung laporan dari masyarakat.

Melihat keadaan diatas artinya sejalan dengan demokrasi deliberatif menjadi sebuah pendekatan demokrasi dimana keputusan publik dihasilkan melalui diskusi, negosiasi dan perdebatan terbuka antara masyarakat. Selanjutnya bahwa proses demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam proses politik digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pembangunan desa meteseh serta menggambarkan adanya ruang publik sebagai komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, menggambarkan adanya keselarasan yang tertulis dalam misi RPJMDesa Meteseh tahun 2020-2023 tersebut pada poin nomor 2,3,4 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Meteseh berusaha untuk meningkatkan sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

dengan menekankan konsepsi DOUM (dari, oleh dan untuk masyarakat) dan berusaha melakukan transparansi informasi penyelenggaraan pembangunan desa serta berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa secara berkesinambungan berdasarkan skala prioritas. Dengan dilakukannya tahapan pembangunan guna mendorong partisipasi masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai skala prioritas maka agar dapat terlaksananya pembangunan secara keseluruhan perlu adanya sinergitas antara RKPDDes dengan RPJMDes.

Praktik deliberatif di desa meteseh sesuai dengan teori Demokrasi Deliberatif oleh Jurgen Habermas, adanya ruang publik pluralis yang mencakup kelompok informal & organisasi sukarela yang diwujudkan melalui tahap perencanaan dengan melibatkan aktor-aktor diantaranya RT/RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, Kelompok Tani, Kelompok Buruh, BPD, LPMD, Pendamping Lokal Desa dan Tokoh Agama, kemudian adanya forum deliberatif mengikuti syarat ruang publik ideal menurut Habermas diwujudkan melalui musdus, musdes, musrenbangdes, musyawarah masyarakat desa dan forum komunikasi masyarakat, dalam forum tersebut termuat pembentukan opini yang bebas, dapat diakses semua warga, pertemuan tidak dibatasi, terjadi perdebatan maupun negosiasi pada saat kegiatan musyawarah, kemudian pengambilan keputusan diambil dengan melibatkan elemen masyarakat agar tercapainya konsensus/kesepakatan bersama.

Dalam tahap pelaksanaan adanya ruang publik publisitas di desa meteseh, menurut Habermas dengan menggunakan media massa dan media sosial sebagai ruang publik. Desa meteseh melibatkan masyarakat sebagai pengamat yaitu dapat mengakses live youtube yang diakomodir pihak pemerintah desa untuk mengamati pelaksanaan pembangunan dan masyarakat dapat memantau melalui media massa berupa baliho yang dipasang didepan balai desa meteseh terkait rangkaian kegiatan pembangunan, kemudian dalam monitoring sesuai pemaknaan Habermas, adanya (civic dialog) atau dialog warga dengan pemerintah terlibat langsung dalam monitoring pelaksanaan pembangunan untuk memberikan masukan dan pendapat saat digelarnya monitoring partisipatif melalui musyawarah bersama pemerintah desa meteseh.

Di desa meteseh adanya ruang publik bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi dari pihak lain, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan

menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif atau secara logis, diwujudkan dalam tahap evaluasi dimana unsur masyarakat ikut terlibat dalam forum diskusi untuk menyampaikan pertanyaan tentang hasil akhir pembangunan dan pihak aparat desa meteseh juga mengadakan kegiatan “dengar pendapat” di balai desa meteseh untuk mendapatkan masukan tentang program pembangunan yang dilakukan dimasa depan. Hal ini dilakukan agar terciptanya transparansi antara pemerintah desa meteseh dengan masyarakat. Dan masyarakat meteseh memberikan umpan balik untuk membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan program pembangunan. Serta masyarakat dapat melakukan pelaporan ke layanan pengaduan desa meteseh untuk menyampaikan berbagai keluhan jika terjadi kekurangan dalam kegiatan pembangunan dapat disampaikan di hotline hubungi.kami.meteseh.

Dampaknya demokrasi deliberatif di desa meteseh menjadikan masyarakat menjadi aktif berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah seperti konsep Habermas yang menekankan adanya partisipasi publik di dalam demokrasi deliberatif. Selain itu, demokrasi deliberatif Habermas menitikberatkan pada musyawarah dalam proses pengambilan keputusan, maka desa meteseh setiap pengambilan keputusan deliberatif diambil melalui hasil konsensus dari masyarakat. Demokrasi deliberatif memiliki konsep agar pejabat publik dan rakyat dapat bersama-sama berdeliberasi sebelum memberikan suara, berkaitan dengan itu yang terwujud di desa meteseh pihak pemerintah desa meteseh memberikan fasilitas kepada unsur masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, menyalurkan pendapat dan berdeliberasi dalam ruang publik terbuka termasuk melalui media sosial. Dengan begitu, menunjukkan bahwa terjadi ruang publik terbuka di desa meteseh dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.

**BAB V**  
**DAMPAK DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBANGUNAN**  
**INFRASTRUKTUR DESA METESEH TAHUN 2020-2023**

Sementara musyawarah dapat meningkatkan partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, sedangkan kurangnya musyawarah dapat menghasilkan keputusan yang kurang beragam dan mungkin kurang diterima oleh sebagian besar pihak yang terlibat. Adanya musyawarah dan tidak adanya musyawarah di Desa Meteseh dapat menciptakan perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Praktik demokrasi deliberatif dapat memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur desa Meteseh. Dampaknya berupa peningkatan alokasi anggaran pertahun, pembangunan sumber daya manusia yang lebih maksimal dan pembangunan infrastruktur demi tercapainya kesejahteraan masyarakat meteseh. Sehingga melalui praktik demokrasi deliberatif, masyarakat desa Meteseh dapat terlibat secara aktif disetiap proses pembangunan, yang dapat menghasilkan proyek kegiatan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

**A. Partisipasi Aktif Masyarakat Desa Meteseh**

**1. Kegiatan Musyawarah**

Partisipasi aktif berarti keterlibatan langsung dari anggota masyarakat dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi perubahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan keadaan dimana kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan. Partisipasi pada dasarnya adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela.

**Tabel 5.1 Daftar hadir tahun 2019-2023**

NO	Musyawarah	Tanggal Kegiatan	Jumlah Kehadiran
1	Musrenbangdesa tahun 2019	13 januari 2019	64 orang
	Musrenbangpenyusunan	20 april 2019	65 orang

2	RKPDesa 2019		
3	Musrenbang RPJMDesa 2020	2 agustus 2020	70 orang
4	Musyawaharah pembentukan tim penyusun RKPDes 2023	27 juni 2023	75 orang
5	Musrenbang penyusunan RKPDes 2023	12 september 2023	75 orang
6	Musdes tahun 2023	28 agustus 2023	45 orang
7	Musyawaharah BPD membahas RKPDes 2023	25 september 2023	75 orang
8	Musdes tahun 2022	2 november 2022	50 orang
9	Musdes tahun 2020	28 september 2020	80 orang
10	Musrenbangdes 2021	5 september 2021	60 orang
11	Musdes 2022	21 januari 2022	41 orang

Sumber: Kantor Balai Desa Meteseh 2023, diolah peneliti

Dengan melihat dinamika partisipasi masyarakat Desa Meteseh telah aktif semenjak tahun 2019 masa kepemimpinan Pak Maola Bagus, sebelum kepemimpinan tahun 2020 Pak Sisyanto. Dalam kegiatan musyawarah, berdasarkan sumber arsip daftar kehadiran kegiatan musyawarah menggambarkan bukti daftar hadir Musrenbangdes tahun 2019 sudah mencapai 64 orang yang hadir. Lalu saat musrenbang tahun 2020 mencapai 70 orang kemudian saat tahun 2020 sudah mencapai 80 orang dan tahun 2022 hanya 50 orang, kemudian musrenbang tahun 2021 mencapai 60 orang dan musdes 2022 hanya 41 orang, kemudian dalam musrenbang tahun 2023 telah mencapai 75 orang.

Hal tersebut dapat dianalisis bahwa angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah ada peningkatan dan penurunan jumlah di setiap tahunnya namun angka peningkatan masih belum signifikan. Serta peningkatan bukan dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi, namun lebih kepada aktor yang terlibat lebih beragam dari yang

sebelumnya homogen menjadi heterogen atau menjadi beragam. Tahun 2019 yang berpartisipasi dalam musyawarah diantaranya: Aparatur Desa, PKK, Posyandu, LPMD dan RT & RW. Kemudian, semenjak tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi perbedaan diferensiasi dari masyarakat lebih beragam yang berpartisipasi diantaranya: Kelompok Tani, Kelompok Buruh, Pokdarwis, Karang Taruna, Pendamping Lokal Desa dan Tokoh Agama. Ditahun 2020 partisipasi kehadiran masyarakat dalam musyawarah sudah mencapai 80 orang yang menandakan tingkat kesadaran partisipasi masyarakat meteseh sudah baik walaupun masyarakat yang terlibat belum beragam. Hal tersebut menggambarkan partisipasi masyarakat desa meteseh kehadirannya cukup aktif, walaupun jumlah masyarakat yang hadir belum mencapai peningkatan yang signifikan.

## **2. Partisipasi PKK**

### **a. Program**

PKK sebagai organisasi kemasyarakatan desa juga memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan kegiatan pertumbuhan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah PKK di desa dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa serta merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. PKK di desa meteseh terdiri dari 20 anggota ibu-ibu warga meteseh yang sering mengadakan pertemuan setiap 1 bulan sekali. Beberapa program kerja PKK desa meteseh diantaranya:

- 1) Pemberdayaan ekonomi, menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan wirausaha bagi perempuan di desa, membantu pendirian kelompok usaha mikro atau koperasi perempuan.
- 2) Pembinaan keluarga berencana dengan mendorong partisipasi dalam program KB yang diselenggarakan pemerintah.
- 3) Pelatihan keahlian dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan dalam bidang kerajinan atau industri kecil rumahan

## **b. Hasil Pokja**

Kegiatan yang sering dilakukan PKK Desa Meteseh yakni melakukan forum terbuka yang membahas usulan-usulan dan saling diskusi terkait isu dan kebijakan berkaitan dengan program pembangunan desa meteseh. PKK desa meteseh berkolaborasi dengan 78 pelaku UMKM yang bergerak di sektor olahan makanan. Oleh karena itu, pada 26 november 2022 produk pangan UMKM berhasil lolos mendapatkan sertifikasi halal terkait belasan produk UMKM yang ada di Desa Meteseh. Jenis produk yang mendapat sertifikasi halal diantaranya olahan singkong keju, gemblong cotot, abon pedo, kue kering, roti gabin, lauk siap saji, serbuk jahe, jahe kunyit rempah serbuk, madu, minuman telang siap minum dan kripik talas kriuk. Kemudian mendapatkan penghargaan juara 2 lomba sebagai rumah sehat di tingkat kabupaten meliputi administrasi pkk dan 10 program pokok pkk dilapangan. Berdasarkan kondisi diatas, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota PKK Bu Sari, beliau memberi pernyataan berikut:

“Kami memberi usulan kepada pihak desa mengenai pemberdayaan perempuan dan pelatihan umkm mbak, karena itu penting di jaman sekarang ini, biar kaum perempuan bisa berinovasi juga memiliki keterampilan” (Sari, 2024)

Hal tersebut turut disampaikan oleh Bu Warni kader PKK:

“Perkumpulan PKK biasanya digelar setiap 1 bulan sekali, agendanya itu mbak bahas program dan lomba-lomba selain itu kita menyampaikan usulan” (Warni, 2024)

Pada tahun 2022 mengadakan pengembangan UMKM masyarakat desa. Pihak pemerintah desa berharap upaya ini sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM agar naik kelas, selain itu harapannya dapat menambah nilai jual produk sehingga distribusi semakin luas. Menurut penuturan Pak Sisyanto di desa meteseh terdapat 78 pelaku UMKM yang bergerak di sektor olahan makanan. Serta pada tahun 2023 mendapat anggaran operasional PKK sebesar Rp. 30.125.000 yang digunakan untuk lomba rumah sehat tingkat kabupaten meliputi administrasi pkk dan 10 program pokok pkk dilapangan dan untuk pemeliharaan posyandu guna penyaluran PMT balita dan lansia.

**Gambar 5.1 Kegiatan pertemuan rutin bulanan PKK**



Sumber: Instagram Desa Meteseh 2022-2023

**Gambar 5.2 Kegiatan pembinaan dan evaluasi 10 program pokok PKK**



Sumber: Instagram Desa Meteseh 2023

**Gambar 5.3 UMKM**



Sumber: Dokumentasi oleh peneliti

### **3. Partisipasi Karang Taruna**

#### **a. Program**

Di Desa Meteseh karang taruna diberi nama Padmanaba Drusilla yang secara rutin mengadakan pertemuan 1 bulan sekali untuk membahas pokja atau program kerja. Partisipasi aktif karang taruna dalam pembangunan desa meteseh bertujuan untuk mendukung pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Karang taruna di desa meteseh berjumlah keseluruhan 60 anggota yang terbagi menjadi 3 yakni karang taruna tingkat desa, karang taruna tingkat RT dan karang taruna tingkat dusun. Namun pemuda yang masih aktif berpartisipasi di segala kegiatan hanya sekitar 45 orang. Setiap pembagian kelompok memiliki program kegiatan sendiri-sendiri dari serangkaian rencana tersebut telah dideliberasikan saat perkumpulan seluruh anggota karang taruna di tingkat desa. Karang taruna mendapatkan anggaran dari dana desa terkait pengembangan wisata lokal sejumlah Rp. 13.163.000. Beberapa program kerja karang taruna desa meteseh sebagai berikut:

- 1) Program kerja terkait pemberdayaan pemuda desa meteseh mencakup pelatihan kepemudaan seperti pelatihan photography, videography dan pelatihan membuat konten.
- 2) Program workshop jurnalistik supaya pemuda desa meteseh dapat menjadi agen social of change
- 3) Program pengembangan desa wisata yang bekerja sama dengan pokdarwis desa meteseh untuk mengelola wisata kampoeng lawas dan pasar kretan (titik kumpul café)

Berdasarkan pemaparan wawancara dengan Mas Bara sebagai ketua karang taruan beliau menyampaikan:

“Kita rutin hadir saat ada musyawarah baik tingkat dusun maupun tingkat desa, disana kita menyumbangkan usulan terkait penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa dan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan. Dan usulan kita ada yang direalisasikan satu yaitu pembinaan klub kepemudaan pada tahun 2023” (Bara, 2023)

## **b. Hasil Pokja**

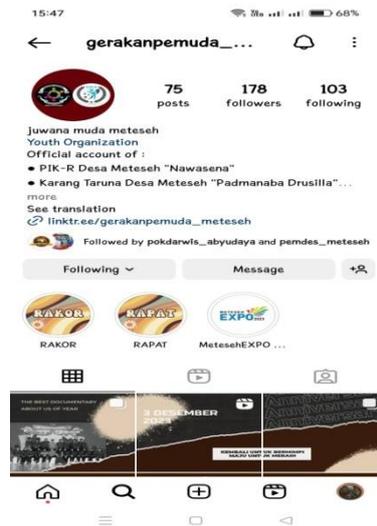
- 1) Karang taruna desa meteseh berkontribusi dalam pengembangan desa wisata lokal, sehingga memiliki dua objek wisata yakni Kampong Lawas dan Pasar Karetan (Titik kumpul café). Dua tempat tersebut merupakan tempat makan yang mengusung konsep tradisional dan modern. Sejak 8 agustus 2021 karang taruna Dusun Rowosari mendirikan dan mengelola sebuah tempat wisata berkonsep tempat makan mengusung tema tradisional bernama Kampong Lawas. Pendirian tempat tersebut menjadi satu-satunya yang berhasil menarik kunjungan para wisatawan dari luar masyarakat meteseh sehingga nama Desa Meteseh menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat luar. Serta pada tahun 2023 melanjutkan Pasar Karetan yang berganti nama menjadi Titik Kumpul Café terletak di Dusun Segrumung, yang mengganti konsep menjadi tempat makan bernuansa modern yang menyediakan suasana alam untuk wisata kuliner. Kondisi tersebut yang menjadi pendorong keterlibatan aktif karang taruna desa meteseh dalam mengembangkan objek wisata yang berguna untuk memajukan kegiatan pembangunan desa.
- 2) Karang Taruna Padmanaba Drussilla dan PIK-R Nawa Sena Desa Meteseh merealisasikan program kerja tahun anggaran 2023. Workshop Jurnalistik menjadi agenda utama yang direalisasikan dengan tujuan agar anggota PIK-R, Karang Taruna Desa Meteseh serta Pemuda di Desa Meteseh menjadi agen of social change bagi Desa Meteseh. Tumijan selaku ketua BPD Desa Meteseh sangat mengapresiasi dan akan selalu mensupport kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna dan PIK-R semata-mata demi kemajuan Desa Meteseh.

"Harapan kami, anggota PIK-R dan Karang Taruna Desa dapat menjadi role mode bagi pemuda-pemuda lain, menjadi sebuah komunitas positif dan menjadi penyedia informasi setiap kegiatan atau kejadian yang terjadi di wilayahnya masing-masing" (Sisyanto, 2023)

Usulan dari karang taruna terkait alokasi anggaran untuk operasional kegiatan dan pengembangan wisata lokal yang sudah terealisasi mulai tahun 2020 terkait anggaran operasional karang taruna dan mulai tahun 2023 alokasi anggaran terkait pengembangan wisata lokal. Di Karang taruna sering menyelenggarakan acara dengan

berkolaborasi bersama posyandu, pokdarwis serta PKK mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, workshop pelatihan serta lomba-lomba hiburan. Hal tersebut dapat dilihat di instagram resmi karang taruna yang sudah memiliki 178 pengikut dan telah mengunggah 75 postingan berbagai acara yang diselenggarakan.

**Gambar 5.4 Instagram karang taruna**



**Gambar 5.5 Kampoeng lawas**



**Gambar 5.6 Pasar kretan (titik kumpul)**



Sumber: Instagram kampoeng lawas & pasar kretan

## B. Pembangunan Infrastruktur

### 1. Pembangunan Jalan

Tabel 5.2 Pembangunan infrastruktur tahun 2020-2023

Pembangunan infrastruktur tahun 2020	Pembangunan infrastruktur tahun 2021	Pembangunan infrastruktur tahun 2022	Pembangunan infrastruktur tahun 2023
1. pembangunan talud dusun krajan barat I	1. pembangunan gedung lembaga desa meteseh	1. pembangunan jalan rowosari	1. pembangunan betonisasi jln dusun slamet-segrumung
2. pembangunan talud dusun krajan barat II	2. pembangunan jalan dusun krajan timur	2. pembangunan jalan krajan barat	2. pembangunan betonisasi jln dusun rowosari
3. pembangunan talud dusun krajan barat III	3. pembangunan jalan dusun krajan tengah	3. pembangunan jalan rowosari	3. pembangunan jalan dusun krajan tengah
4. pembangunan talud I	4. pembangunan jalan tani krajan tengah-slamet	4. pembangunan jalan tani krajan tengah	4. pembangunan jalan dusun rowosari
5. pembangunan talud II	5. pembangunan jalan tani dusun teseh	5. pembangunan jalan tani slamet	5. pembangunan jalan dusun segrumung
6. pembangunan talud	6. normalisasi saluran irigasi desa meteseh	6. pembangunan talud jalan dusun slamet-segrumung	6. pembangunan senderan dusun krajan tengah
7. pengecoran jalan	7. normalisasi saluran irigasi dusun krajan barat	7. renovasi rumah tidak layak huni	7. pembangunan gorong-gorong dusun segrumung
8. pengecoran jalan gang		8. peternakan kambing	8. pembangunan talud dusun sasak
9. pengecoran jalan gang samping kantor balai desa		9. pembangunan kios desa	9. peternakan kambing
10. pengecoran jalan gang lapangan ke timur			10. pembangunan kios desa

Sumber: RKPDes tahun 2020-2023

Rata-rata pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi yaitu pembangunan jalan seperti pengecoran, pengaspalan maupun betonisasi. Serta seperti pembangunan jalan tani, talud dan gorong-gorong. Karena Desa Meteseh memiliki panjang jalan total 35 km yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Sebagian kondisi infrastruktur jalan yang sudah dibenahi dari tahun 2020 hingga 2023 telah mencapai kondisi baik sekitar 60%, dengan kondisi jalan yang rusak 18%, rusak berat 10 %, cukup baik 42%, rusak sedang 30%. Namun pembangunan jalan berupa pengaspalan, pengecoran dan betonisasi setiap tahunnya terus dilakukan secara bertahap di 8 dusun. Selanjutnya, kondisi infrastruktur jalan di Desa Meteseh terbagi dalam beberapa klasifikasi jenis permukaan jalan yaitu rabat beton yang mendominasi 47% dari total panjang jalan dan sebagian besar jalan lingkungan berupa aspal 14%, makadam/krikil 9%, berupa jalan tanah 23%, berupa paving 7%. Melihat data yang berasal dari RKPDes menggambarkan banyak kegiatan pembangunan jalan yang sudah terealisasi mulai tahun 2020 telah terealisasi 4 pengecoran jalan, tahun 2021 telah terealisasi 4 pembangunan jalan tani, tahun 2022 telah terealisasi 6 pembangunan jalan pada 5 dusun dan tahun 2023 terlaksana 5 pembangunan jalan betonisasi pada 3 dusun. Sedangkan bidang infrastruktur selain jalan yang sudah terealisasi pada tahun 2020 berupa pembangunan 6 talud, tahun 2021 telah terealisasi pembangunan gedung lembaga dan normalisasi saluran irigasi di 2 tempat, tahun 2022 terealisasi pembangunan peternakan kambing dan pembangunan kios desa, tahun 2023 terealisasi pembangunan senderan & pembangunan gorong-gorong.

#### **a. Peningkatan Anggaran 2020-2023**

Berdasarkan data perbandingan anggaran melalui dokumen RKPDes 2020 hingga tahun 2023, anggaran yang didapatkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.092.872.455 miliar, kemudian pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.194.976.945 miliar, kemudian 2022 sebesar Rp. 2.117.933.131 miliar, kemudian tahun 2023 sebanyak Rp.2.663.812.068. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dana desa dalam kurun waktu 4 tahun sehingga terwujudnya beberapa pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Perhitungan pelaksanaan pembangunan 2020-2023**

Tahun	Jumlah Keseluruhan Usulan Masyarakat	Jumlah Usulan Dipilih	Pembangunan Terealisasi	Tidak Terealisasi
2020	38 usulan	19 usulan	11	8
2021	35 usulan	18 usulan	16	2
2022	37 usulan	21 usulan	19	2
2023	39 usulan	25 usulan	21	4

Sumber: RKPDes tahun 2020-2023

**b. Belanja Desa Meteseh**

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a Penyelenggaraan pemerintah desa
- b Pelaksanaan pembangunan desa
- c Pembinaan kemasyarakatan desa
- d Pemberdayaan masyarakat desa
- e Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

**Tabel 5.4 Anggaran belanja desa 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bid. Penyelenggaraan Pemdes	818.186.945,00
2	Bid. Pelaksanaan pembangunan	1.310.710.000,00
3	Bid. Pembinaan kemasyarakatan	33.180.000,00
4	Bid. Pemberdayaan masyarakat	28.000,000,00
5	Belanja tak terduga	5.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.194.976.945,00</b>

Sumber: RKPDes 2021

**Tabel 5.5 Anggaran belanja desa 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bid. Penyelenggaraan Pemdes	606.263.294,00
2	Bid. Pelaksanaan pembangunan desa	1.682.239.774,00
3	Bid. Pembinaan kemasyarakatan desa	52.000.000,00
4	Bid. Pemberdayaan masyarakat desa	423.359.000,00
5	Bid. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	556.400.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.320.262.068,00</b>

Sumber: RKPDes 2023

Kenaikan anggaran belanja dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa meningkat dari tahun 2021 hingga 2023 sebanyak 15%, kemudian kenaikan anggaran tahun 2021 hingga 2023 dalam bidang pembinaan masyarakat meningkat sebanyak 1,6%, kemudian kenaikan anggaran tahun 2021 hingga 2023 dalam bidang pelaksanaan pembangunan meningkat sebanyak 1,28%. Pembinaan masyarakat tersebut didalamnya meliputi pembangunan dalam aspek penunjang operasional PKK, operasional karang taruna maupun operasional posyandu. Pemberdayaan masyarakat yang terealisasi diantaranya penyuluhan & pelatihan pemberdayaan perempuan, pembangunan peternakan kambing, pembangunan kios desa dan penyertaan modal bumdes.

## **2. Pembangunan Bidang Pendidikan**

### **a. TK Dharma Wanita**

Gedung TK Dharma Wanita dibangun pada tahun 2021 yang merupakan sekolahan pra-sekolah untuk anak usia dini. TK dharma wanita berlokasi di Dusun Krajan Tengah tempatnya berada di sebelah kiri Balai Desa Meteseh. Serta memiliki 26 murid dan 5 guru honorarium yang mengajar di TK dharma wanita. Pembangunan ini terealisasi dengan menggunakan anggaran dana desa sebanyak Rp. 200.000.000. Taman kanak-kanak dibangun oleh Pemerintah Desa Meteseh yang diberi nama TK Dharma

Wanita karena setelah dibangun, semua fasilitas dikelola organisasi dharma wanita desa meteseh. Fasilitas yang tersedia di dalam TK seperti toilet untuk guru dan murid, ruang guru, ruang belajar dan taman bermain. TK dharma wanita memberikan dukungan kepada siswa berprestasi dengan kriteria sering mengikuti lomba tingkat kecamatan maupun kabupaten dan untuk siswa kurang mampu dengan nominal Rp. 20.000.000 untuk 20 murid, yang diberikan dari pihak pemerintah desa langsung kepada orang tua murid.

Sehubungan pemaparan tersebut disampaikan oleh Bu Parni orang tua dari anak yang bersekolah di TK dharma wanita meteseh:

“Cuma baru TK yang dibangun pada tahun 2020. Kalau alasan saya sekolahin anak saya disini karena dekat sama rumah jadi kalau jemput anak tidak terlalu jauh” (Parni, 2023)

Hal tersebut turut disampaikan oleh Bu Eva selaku wali murid, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau buat fasilitas mengajar masih ada yang belum lengkap, tapi sudah bagus fasilitasnya tempatnya nyaman dan bersih” (Eva, 2023)

**Gambar 5.7 TK Dharma Wanita**



Sumber: Dokumentasi peneliti desember 2023

#### **b. TK/PAUD An-Nur Meteseh**

Gedung TK/PAUD An-Nur dibangun pada tahun 2020, dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 200.000.000. TK/PAUD adalah jenjang pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia dini, umumnya dari usia 3 hingga 6 tahun. TK An-Nur

berlokasi di Dusun Teseh, yang memiliki 20 murid dan 5 guru honorarium. Fasilitas yang tersedia di TK/PAUD An-Nur TK seperti ruang guru, ruang belajar dibagi menjadi 2 yaitu ruang belajar TK dan ruang bermain PAUD, kemudian terdapat toilet. TK ini dibangun karena pada anak usia 0-6 tahun merupakan masa emas bagi perkembangan anak. Pada masa ini, otak anak berkembang pesat dan mereka belajar dengan sangat cepat. TK menyediakan lingkungan yang kondusif untuk membantu anak-anak belajar dan berkembang secara optimal, selain itu membantu anak-anak agar siap memasuki sekolah dasar. Di TK, anak-anak belajar berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan bersosialisasi.

**Gambar 5.8 TK An-Nur**



Sumber: Dokumentasi peneliti 2023

Berkaitan dengan adanya TK/PAUD di Dusun Teseh maka peneliti melakukan wawancara dengan Bu Denok selaku wali murid, beliau menyampaikan:

“Anak saya paud disini karena anaknya aktif masih umur 3 tahun jadi saya masuk saja ke PAUD biar belajar ketemu banyak teman sama bermain” (Denok, 2023)

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bu Hikmah, beliau menyampaikan:

“Di TK sini kegiatan di dalam ruangan ada bernyanyi, menggambar, berhitung terus kalau kegiatan diluar ruangan ada yang mengagendakan piknik ke kebun binatang atau ke wahana bermain mbak” (Hikmah, 2023)

Menurut pernyataan Sekretaris Desa Meteseh beliau menyampaikan alasan hanya satu gedung sekolah yang terealisasikan:

“Baru gedung TK yang bisa dibangun karena disini SD Negeri dibangun oleh dinas pendidikan dan SMK Swasta dibangun juga oleh pihak swasta mbak. Jadi buat gedung SD sama SMK pihak pemdes tidak berkontribusi” (Rohani, 2023)

Namun pembangunan yang terealisasi di desa meteseh ini hanya gedung TK/PAUD karena menurut penuturan Pak Rohani selaku Sekretaris Desa Meteseh bahwa jika di desa meteseh untuk jenjang dasar SD Negeri dan jenjang menengah SMK Swasta pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas pendidikan, yang berarti bukan milik desa sehingga pemerintah desa meteseh tidak berkontribusi dalam pembangunan. Menurut peneliti beberapa pembangunan di bidang pendidikan sudah baik namun masih

belum menyeluruh, akan tetapi dengan terealisasinya gedung sekolah TK hal tersebut sangat membantu mendorong kemajuan pendidikan di desa meteseh. Karena pada dasarnya tujuan pembangunan bidang pendidikan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan relevansi pendidikan. Dengan demikian, dampak demokrasi deliberatif pada bidang pendidikan sudah terlaksana namun lebih banyak terealisasi pada rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah ada dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan.

### **3. Pembangunan Bidang Ekonomi**

#### **a. Peternakan Kambing**

Peternakan kambing telah direalisasikan pada tahun 2022 dan memiliki 12 ekor kambing yang dipelihara oleh 4 orang asli masyarakat desa meteseh. Peternakan kambing dibangun menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp. 172.408.000. Hasil dari pemeliharaan dan penjualan kambing masuk ke dalam PAD (penghasilan asli desa) selama 1 tahun sebanyak Rp. 20.000.000. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran dana desa untuk pemeliharaan kambing mencapai Rp. 262.750.000. Untuk penjualan kambing diberikan sebagian ke masyarakat yang sudah mengurus kambing tersebut sebagai upah balas jasa senilai Rp. 2.500.000 untuk satu orang dan pendapatan lainnya masuk ke desa. Sehingga keadaan tersebut setidaknya meningkatkan perekonomian masyarakat walaupun tidak keseluruhan, pihak pemerintah desa memberi kepercayaan kepada perorangan yang dianggap paham dalam menangani ternak hewan supaya peternakan yang telah didirikan dapat berkembang. Dan pendapatan selebihnya dapat meningkatkan pendapatan hasil usaha desa serta dapat meningkatkan PAD meteseh.

Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara bersama Bu Yati sebagai istri yang suaminya ditugaskan untuk memelihara kambing tersebut, beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah dek, suami saya mendapat kepercayaan buat mengurus kambing jadi setiap pagi dan sore ke ternak buat memberi makan rumput. Hasilnya menjual kambing kalau masa panen itu sisanya untuk kita. Walaupun kambingnya tidak banyak cuma 12 ekor tapi itu beranak pinak” (Yati, 2023)

Hal serupa turut disampaikan oleh Pak Huda yang mengurus ternak kambing, beliau menyampaikan:

“Ternak kambing itu dibangun pihak desa tahun 2022 dan yang disuruh mengurus warga dek. Saya salah satu yang dipercaya buat melihara jadi selama ini ada 4 orang buat ngurusin sama ngasih makan, nanti kita dapat bagian saat waktu panen menjelang idul adha banyak yang mencari buat qurban” (Huda, 2023)

**Gambar 5.9** Peternakan kambing Desa Meteseh



Sumber: Dokumentasi pendamping lokal desa 2023

#### **b. Kampoeng Lawas**

Kampoeng lawas merupakan cafe yang mengusung konsep tradisional yang terletak di Dusun Krajan Timur dan mulai aktif pada 8 agustus 2021, di kampoeng lawas menyediakan makanan rumahan kuliner pedesaan dan menyediakan live music setiap hari untuk menemani para pengunjung menyantap makanan. Selain itu, di kampoeng lawas dapat di sewa untuk acara pernikahan, pertemuan, edukasi dan wisata alam. Kampoeng lawas saat sabtu dan minggu buka mulai pukul 10.00-22.00 WIB dan hari biasa kecuali (hari kamis libur) mulai buka pukul 15.00-22.00 WIB.

Untuk pendirian wisata kampoeng lawas mendapatkan anggaran dari pemerintah desa sebesar Rp. 13.163.000 untuk pengembangan pariwisata tingkat desa. Sedangkan hasil pendapatan kampoeng lawas selama 1 tahun sebanyak Rp. 75.000.000 untuk menambah PAD (pendapatan asli desa) yang masuk ke desa sebesar Rp. 20.000.000. Objek wisata ini dianggap dapat meningkatkan UMKM masyarakat meteseh karena bagi masyarakat khusus desa meteseh diperbolehkan berjualan di tempat ini untuk menjual barang dagangannya dengan syarat yang dijual harus makanan tradisional. Para penjual memperoleh pendapatan selama berjualan di area kampoeng lawas berkisar Rp.1.500.000 sampai Rp. 2.600.000 setiap bulannya. Kampoeng lawas memiliki akun instagram yang sangat aktif setiap hari mengunggah berbagai informasi dan sudah diikuti sebanyak 3.720 pengikut serta memiliki postingan sebanyak 699 postingan untuk menarik perhatian pengunjung.

Gambar 5.10 Instagram kampoeng lawas



Sumber: Instagram kampoeng lawas 2023

Peneliti melakukan wawancara dengan Mas Bara selaku ketua karang taruna dusun rowosari yang mengelola wisata kampoeng lawas, beliau menyampaikan:

“Lahan kampoeng lawas ini tanah bengkok sewa ke pemerintah desa kak, istilahnya kita numpang sama desa. Tapi kita dikasih sumur bor sama pemdes. Kita minta perizinan ke perangkat desa juga. Selain yang mengelola karang taruna sama ada sumbangsi dari pokdarwis juga. Kampoeng lawas mulai aktif buka 8 agustus 2021, bisa menjadi lahan mata pencaharian warga meteseh sampai sekarang karena disini ada ibu-ibu yang ikut jualan kak. Terus yang menjadi pekerja waiter itu rata-rata rekrut remaja meteseh. Warga sini boleh ikut jualan asalkan asli warga meteseh” (Bara, 2023)

Sehubungan dengan itu Bu Erna sebagai warga meteseh yang berjualan di kampoeng lawas memberi pernyataan:

“Aku jualan gethuk disana hampir setahun dek, jadi sistemnya bagi hasil sama karang tarunanya tiap bulan kita hitung-hitungan berapa dagangan yang laku gitu, alhamdulillah kalau buat kehidupan sehari-hari cukup dek” (Erna, 2023)

Hal tersebut turut disampaikan oleh Bu Dewi penjual di kampoeng lawas:

“Ramenya itu setiap hari libur sabtu dan minggu. Kampoeng lawas ini udah berdiri cukup lama tapi pengunjungnya masih lumayan banyak” (Dewi, 2023)

Analisis yang peneliti lakukan terhadap 2 pembangunan antara Peternakan Kambing dan Kampoeng Lawas di dalam bidang ekonomi dianggap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa meteseh. Karena dengan memelihara kambing akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing. Sedangkan dalam pengelolaan wisata kampoeng lawas dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat sebagai ladang menjual berbagai makanan tradisional, akibatnya dapat menarik minat pengunjung dari berbagai daerah disekitar desa meteseh serta diluar kecamatan boja untuk datang berkunjung. Dengan keberadaan kampoeng lawas maka nama Desa Meteseh lebih dikenal oleh banyak kalangan, karena kampoeng lawas cukup sering diunggah di media sosial baik instagram maupun youtube.

#### **4. Pembangunan Bidang Kesehatan**

##### **a. PKD (Pos Kesehatan Desa)**

Pos kesehatan desa adalah suatu unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat desa atau kelurahan. PKD dibentuk oleh dan untuk masyarakat desa dari hasil kesepakatan saat musyawarah. Tujuan dibentuknya PKD untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar atau tindakan pencegahan kepada masyarakat di tingkat desa. Pos kesehatan desa dibangun pada tahun 2020. Pelayanan kesehatan yang ada di desa meteseh yaitu pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pengobatan penyakit ringan dan penyuluhan kesehatan. Di pos kesehatan desa meteseh menyediakan pelayanan pemeriksaan awal untuk mendiagnosis penyakit ringan seperti sakit gatal, pusing, batuk ringan, pilek ringan dan memberikan pengobatan sederhana. Jika pasien memiliki penyakit serius, maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. PKD di desa meteseh memiliki 1 dokter dan 1 perawat untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tanpa harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke kecamatan boja. Selain itu, PKD meteseh juga dijadikan sebagai kegiatan penyuluhan mengenai KB, cara mencegah sakit demam berdarah dan penyuluhan menjaga pola hidup bersih & sehat.

Menurut pemaparan Bu Weni selaku masyarakat dusun krajan tengah, menyampaikan:

“Desa meteseh hanya ada posyandu dan pos kesehatan mbak, kalau puskesmas tidak ada karena ikutnya kecamatan boja jadinya ya

puskesmas boja itu. Kalo desa meteseh tidak ada puskesmas” (Weni, 2023)

Mengulik dari narasumber lain bernama Pak Kasno selaku RW, turut menyampaikan:

“Mulai beberapa bulan yang lalu di pos kesehatan sudah ada dokter sama perawat mbak, jadi sekarang kalau mau periksa tidak perlu keluar desa karena disini bisa melayani kesehatan orang dewasa” (Kasno, 2023)

Terkait pelayanan di pos kesehatan, peneliti ingin menilik kegiatan yang sering dilakukan:

“Biasanya di pos kesehatan menerima pengobatan ringan saja seperti batuk pilek, terus kegiatan yang sering dilakukan penyuluhan KB sama cara meningkatkan gizi anak mbak” (Sugiyarto, 2023).

Kondisi pembangunan infrastruktur saat ini bidang kesehatan yang sudah terealisasi dari tahun 2020-2023 yaitu PKD (pos kesehatan desa). Analisis dari peneliti bahwa dalam pembangunan kesehatan di bidang infrastruktur belum banyak yang dapat dibangun, karena untuk posyandu hanya bertempat di rumah RT/RW. Hal lainnya desa meteseh tidak memiliki puskesmas karena untuk puskesmas sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Boja dan hanya berpusat di Desa Boja.

#### **b. Realisasi Anggaran Untuk Kesehatan**

Karena pada bidang kesehatan tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi mengenai pembangunan manusia juga lebih penting maka perlunya mengetahui anggaran yang di alokasikan dalam bidang kesehatan di desa meteseh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Anggaran yang diperoleh untuk bidang kesehatan mulai tahun 2020 untuk operasional posyandu Rp. 8.620.000 seperti membeli peralatan posyandu, PMT (pemberian makanan tambahan) untuk lansia dan balita Rp. 20.000.000, Kelas ibu hamil Rp. 3.000.000. Tahun 2021 alokasi anggaran untuk pemeliharaan pos kesehatan desa Rp. 5.000.000 dan penyelenggaraan posyandu Rp. 1.500.000. Tahun 2022 anggaran untuk penyelenggaraan posyandu sebesar Rp. 36.948.000, pelatihan bidang kesehatan Rp. 6.600.000, bina keluarga balita Rp. 4.800.000, pengadaan peralatan posyandu Rp. 4.160.000, pembinaan PMR tingkat desa Rp. 3.766.000. Tahun 2023 mengalami kenaikan anggaran drastis untuk alokasi penyelenggaraan posyandu sebanyak Rp. 55.657.000 untuk makan tambahan, kelas

bumil & lansia, pelatihan kesehatan tenaga medis Rp. 7.875.000 dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp. 5.750.000.

Mengenai realisasi anggaran dalam bidang kesehatan termasuk ke dalam pembangunan non fisik yang terealisasi di desa meteseh mulai tahun 2022 terlaksana pembagian PMT bagi balita yang disalurkan oleh kader posyandu kepada 20 ibu dan 20 bayi. Dengan dana posyandu yang didapatkan sebanyak Rp. 55.657.000 diharapkan dapat mengurangi jumlah anak terkena stunting dan dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak dan balita. Melihat kenaikan anggaran yang terjadi disetiap tahunnya dari 2020 sampai 2023 menandakan alokasi anggaran di desa meteseh untuk bidang kesehatan mengalami perkembangan yang baik dan sangat diperhatikan oleh pihak pemerintah desa. Sehingga terlihat dampak positif dari demokrasi deliberatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses deliberasi dengan mengedepankan kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran desa, menjadikan tingkat kesehatan balita, lansia dan masyarakat berangsur lebih baik pertahunnya dan meningkat di desa meteseh.

**Tabel 5.6 Indikator kesehatan desa meteseh**

URAIAN	2020	2021	2022	2023
Penolong balita tenaga kesehatan	100	100	100	100
Angka kematian bayi (IMR)	1	2	1	1
Angka kematian ibu melahirkan (MMR)	0	0	1	0
Cakupan imunisasi	1.015	1.285	674	990
Balita gizi buruk	10	8	7	5

Sumber: Kantor balai desa 2023, diolah peneliti

**Gambar 5.11 Penyaluran PMT balita & kegiatan posyandu**



Sumber: Instagram Desa Meteseh 2023

### **Analisis**

Dampak dari demokrasi deliberatif menghasilkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses musyawarah, adanya indikasi partisipasi publik telah terlaksana di desa meteseh. Sehingga telah terealisasi pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dapat terwujud karena masyarakat desa meteseh secara aktif menyumbangkan ide dan pendapat yang digunakan pemerintah desa sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dimanifestasikan dalam proyek pembangunan sehingga kegiatan pembangunan dilakukan dengan bertahap yang mengdepankan pembangunan keberlanjutan. Demokrasi deliberatif memiliki dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur desa meteseh, hal ini terwujud dengan menekankan pada partisipasi aktif, diskusi terbuka dan pengambilan keputusan kolektif, yang dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang diinginkan seluruh masyarakat. Sehingga proses deliberatif menunjukkan bahwa pemahaman demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur di desa meteseh dapat menghasilkan sebuah peningkatan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, adanya praktik deliberatif dalam pembangunan infrastruktur desa meteseh tahun 2020-2023 diwujudkan adanya ruang publik terbuka di desa meteseh terkait proses pembangunan. Mulai tahap perencanaan melibatkan seluruh elemen masyarakat diwujudkan adanya forum deliberatif berupa musyawarah dari tingkat dusun hingga tingkat desa untuk menyampaikan aspirasi, menyalurkan pendapat dan menampung usulan masyarakat terkait perencanaan pembangunan, serta terdapat rencana anggaran desa meteseh untuk direalisasikan program pembangunan, kemudian adanya pengambilan keputusan deliberatif yang dihasilkan melalui konsensus dengan masyarakat, pembangunan ini dilakukan mengikuti skala prioritas dan SDGs. Dalam tahap pelaksanaan melibatkan masyarakat desa meteseh sebagai pengamat dan sebagai sumbangsi tenaga diwujudkan melalui ruang publik publisitas menggunakan media massa dan media sosial agar masyarakat dapat mengamati pelaksanaan pembangunan dengan mudah, kemudian adanya monitoring masyarakat dilibatkan untuk memberi masukan, pengaduan publik dan monitoring partisipatif kepada pemerintah desa meteseh. Dalam tahap evaluasi masyarakat memberikan umpan balik kepada pemerintah desa dan dapat melakukan pengaduan publik melalui layanan pengaduan desa meteseh.

Dampak dari demokrasi deliberatif dalam pembangunan infrastruktur selama tahun 2020-2023 menjadikan masyarakat desa meteseh lebih aktif berpartisipasi dalam proses musyawarah maupun kegiatan pembangunan, dengan aktif menyumbangkan ide-ide dan pendapatnya melalui kegiatan, hal ini menunjukkan terlaksananya partisipasi publik di desa meteseh. Hasilnya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa meteseh yaitu terealisasi pembangunan jalan, pembangunan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Demokrasi deliberatif sangat penting untuk diadopsi dalam demokrasi di tingkat desa karena pengaruh kontribusi masyarakat untuk kemajuan desa sangat besar. Desa meteseh melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bebas menyampaikan aspirasi, bebas berpendapat dan saling berdeliberasi untuk mencapai konsensus yang diselenggarakan melalui ruang publik.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat desa meteseh untuk kedepannya agar lebih memiliki kesadaran terkait program pembangunan di desanya dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan forum diskusi bersama pemerintah desa
2. Bagi pemerintah desa meteseh untuk lebih meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terkait mengatur masyarakat dalam hal bersosialisasi. Sehingga demokrasi di tingkat desa kedepannya menjadi lebih baik
3. Bagi pihak yang berkepentingan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi serta pembelajaran terhadap terlaksananya praktik demokrasi deliberatif dalam pembangunan desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia, dalam <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jawa Tengah dalam Angka*.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Gusti Norsatyo Malik, G. N. M. (2019). *Biografi Dari Pemikiran Politik : Demokrasi Deliberatif Menurut Jurgen Habermas*
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere (Translated Massachusetts Institute of Technology)*. Massachusetts: The MIT Press.
- Habermas, J. (2006). *Teori tindakan komunikatif buku I: Rasio dan rasionalisasi masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardiman, F. B. (2009). *Tentang Demokrasi deliberatif*. PT Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. 2009. "Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Hubermas". Yogyakarta : PT Kanisius
- Hendrawan, A., & Erowati, D. (2022). *Demokrasi Deliberatif Pada Open Government (Studi Kasus Di Kota Semarang Tahun 2018-2019)*. *Jurnal Wacana Politik*, 7(1).
- Humaira Annisa, 2021. *Konsep Negara Demokrasi*, (Universitas Eka Sakti).
- Jabpar, A. (2009). *Gagasan pada demokrasi deliberatif: Sebuah telaah mengenai filsafat politik Jurgen Habermas* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Jafar, Marwan. 2015. "SDM Jadi Kunci Sukses Pengelolaan Dana Desa".
- Mansbridge, Jane (1980). *Beyond Adversary Democracy*. New York, NY: Basic Books

- Mufakat, M. G. M. (2012). Musyawarah dan mufakat: gagasan serta tradisi genial demokrasi deliberatif di Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2), 21-30.
- Moleong J. Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.PT. RemajaRosdakarya.
- Morrell, M. E. (2005). Deliberation, Democratic Decision-Making and Internal Political Efficacy. *Political Behavior*, 27(1), 49– 69. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/4500184>
- Muthhar, M. A. A. (2016). Membaca Terkait Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas di dalam Dinamika Politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(1), 123-139.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi yang rasional: Melacak pemikiran dari jürgen habermas mengenai ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185.
- Pratiwi, P. (2020). Publik Mencari Ruang Publik: Demokrasi Deliberatif serta Manifestasi Terhadap Penyaluran Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 45-57.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
- R. Eep Saefullah Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1993.
- Subagyo, R. A. Kesadaran Kritis dan Demokrasi Deliberatif.
- Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Model Praktik Demokrasi Konsensus di Indonesia. *Communitarian: Jurnal Jurusan Ilmu Politik*, 3(2).

Wiranggani, Panjalu. 2017. *Demokrasi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media

### **Buku**

Hardiman, F. Budi. 2009. “Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus J urgen Hubermas”. Yogyakarta : PT Kanisius

Jurgen Habermas Ruang publik

### **Website**

<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/525/1/luas-kecamatan-boja-menurut-desa.html>

<https://meteseh.desa.id/>

[https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public\\_dashbord/detail\\_desa/RUFSV1dQVtEVzdpMjNOek8xMnZZZz09](https://dokar.kendalkab.go.id/dashbord/public_dashbord/detail_desa/RUFSV1dQVtEVzdpMjNOek8xMnZZZz09)

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3146/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2023 28 November 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Kepala Desa Meteseh  
Di tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Demokrasi Deliberatif Tingkat Desa (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Meteseh)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Lailla Az Zahra Baedi  
NIM : 2006016049  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Kendal, 20 Mei 2002  
CP/e-mail : laillaazzahraedi@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Baedi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Brayu Timur RT02/RW03, Desa Kertosari

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



Surat permohonan izin penelitian kepada Kepala Desa Meteseh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3358/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2023 19 Desember 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Data Penelitian

Yth.  
Perangkat Desa Meteseh  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Demokrasi Deliberatif Tingkat Desa (Studi Praktik Demokrasi Deliberatif Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Meteseh Tahun 2020-2023)**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Lailla Az Zahra Baedi  
NIM : 2006016049  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Kendal, 20 Mei 2002  
CP/e-mail : laillaazzahraBaedi@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Baedi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Brayu Timur RT 02/RW 03 Desa Kertosari

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



## Surat permohonan izin penelitian kepada Perangkat Desa Meteseh



Wawancara dengan Pak Sisyanto S.Sos Kepala Desa Meteseh, tanggal 20 desember  
2023



Wawancara dengan Pak Tris anggota kelompok tani, tanggal 20 desember 2023



Wawancara dengan Pak Rohani Sekretaris Desa Meteseh, tanggal 20 desember 2023



Wawancara dengan Perangkat Desa Meteseh, tanggal 21 desember 2023



Wawancara dengan Kader PKK Desa Meteseh, tanggal 21 desember 2023



Wawancara dengan Pak Kadus, tanggal 21 desember 2023



Wawancara dengan Bu Uswatun Kasi Pemerintahan, tanggal 21 desember 2023



Wawancara dengan Pak Tumijan BPD, tanggal 21 desember 2023



Wawancara dengan Mas Bara Ketua Karang Taruna Desa Meteseh, tanggal 22 desember 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN BOJA  
DESA METESEH**

No : 005 /1058/ Mts Meteseh, 10 Agustus 2020  
Hal : Undangan

Kepada Yth.  
1. Forkompimcam Boja  
2. BPD Desa Meteseh  
3. Ketua RT / RW / LPMD / KPMD  
4. PKK Desa Meteseh/Posyandu Desa  
5. Karang Taruna / Pokdarwis  
6. Tokoh Masyarakat / Agama  
7. Pendamping Lokal Desa  
8. Kelompok Buruh  
9. Kelompok Tani (Gakota)  
Bapak / Ibu .....  
Di Tempat.

Dengan hormat,  
Sesuai dengan Surat Camat Boja tentang Jadwal Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes dan Agenda Kerja Desa Meteseh Tahun 2020.  
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu, besok pada :

Hari : **Minggu, 15 Agustus 2020**  
Waktu : **09.00 WIB s/d selesai**  
Tempat : **GSG Desa Meteseh**  
Acara : **Musyawah Rencana Pembangunan Desa TA 2020  
Penyusunan RKP Desa Tahun 2021 dan DU RKP Desa  
Tahun 2021**

Kemudian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.



Dokumentasi undangan musyawarah desa meteseh

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Jam : 19.30 WIB  
 Tempat : Balai Desa Meteseh  
 Jumlah Peserta : 75 Orang  
 Laki-laki 57 Orang, Perempuan 18 Orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Heri Gondro	L	PELAMET	RUMAH	1.
2.	JANBENG.P	L	PEKUMHUNG	RUMAH	2.
3.	Jamala	L	Jarak	RUMAH	3.
4.	Mulyono	L	TESBET	RT 01	4.
5.	ISWADI	L	tesh	RT 02	5.
6.	Iman Bener	L	tesh	RT 02	6.
7.	SUPRAYITNO	L	KRJAAN TIMUR	RT	7.
8.	CHUMAIDI	L	KRJAAN TIMUR	RT	8.
9.	NURMANTO	L	K. Timur	RT	9.
10.	Kuswanto	L	KRJAAN TIMUR	RT	10.
11.	Ahmad F.	L	KRJAAN TIMUR	RT	11.
12.	Suroto	L	Agung	RT 4	12.
13.	AGUNG.S	L	Agung	RT 8	13.
14.	Janalekha	L	TESBET	RT 7	14.
15.	Kohari	L	tesh	RT 9	15.
16.	ARDY Djunardi	L	KRJAAN TIMUR	RUMAH 07	16.
17.	Bernard A	A	PELAMET	RUMAH	17.
18.	Dwi. Kapti H	P	PELAMET	PER	18.
19.	SUKTNO	L	TESBET	RT	19.
20.	ANP Drajat	L	DUMAS	KADUS	20.
21.	Solihin	L	TESBET	RT	21.
22.	SUTRISNO	L	tesh	KADUS	22.
23.	PURAD	P	dund	PER	23.

Dokumentasi daftar hadir musyawarah meteseh tahun 2023

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANG DESA)**  
**PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023**

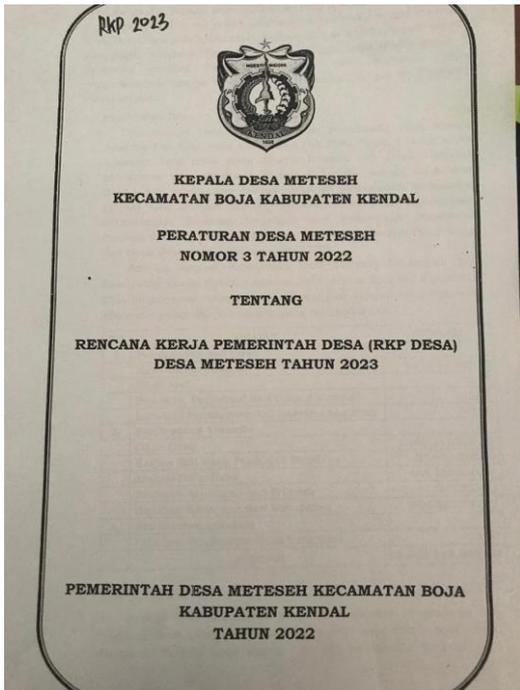
Hari, Tanggal : Senin, 5 September 2022  
 Jam : 19.30 WIB  
 Tempat : Balai Desa Metesch  
 Jumlah peserta : 60 orang  
 Laki-laki 40 orang, Perempuan 20 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Indra	L	Kr. Tim	RKAD	1.
2.	Plamet	L	Plamet	RW	2.
3.	SUTRISNO	L	KR. TENGAH	BPD	3.
4.	Bambang		Kr. Tengah	KPMO	4.
5.	Nonang	L	Kr. Barat	RT	5.
6.	RITZ	P	Tengah	PKK	6.
7.	Imroatun	P	ROWASARI	PKK	7.
8.	Adi Nugroho	L	Kr. Barat	RT	8.
9.	Jampuk	L	Jasak	RW	9.
10.	Benu Nur		Plamet	BPD	10.
11.	NUR FAIZW	L	KR. BARAT	BPD	11.
12.	ARY DIMASW	L	dan. Selay	Kudus	12.
13.	Sulain		rowasari	RT	13.
14.	SURWANTO	L	TOWONGRI	RW	14.
15.	Bayu	L	Sigumung	BPD	15.
16.	Tumijan	L	Kr. Timur	BPD	16.
17.	Aji S	L	Jasak	Buruh	17.
18.	Aswanto	L	Kr. Barat	RW	18.
19.	Suparmi	P	Kr. Tengah	Bpd	19.
20.	Rahay	P	Kr. Timur	PKK	20.
21.	Kuswati	P	Kr. Tengah	PKK	21.
22.	Peparni	P	Kr. Tengah	PKK	22.

Dokumentasi daftar hadir musyawarah tahun 2022

23.	NURWADI	L	Kr Timur	Ka umum	23.	
24.	Ziyanah		Kr. Bari	Kode	24.	
25.	SUTADJI	L	Kr. Tengah	Kadus II	25.	
26.	KHAFI Rini	L	Kij. Baras	KADUS I	26.	
27.	WAGIRI	L	Krajasinur	KADUS	27.	
28.	SUTISNO	L	TESEH	Kadus	28.	
29.	SUDI		Tekeh	ni:olay	29.	
30.	BOESRI. S.		Teseh	Rw:olay	30.	
31.	Elok Irma	P.	Baras	PLD	31.	
32.	SUWARDI.	L	KR. TENGAH	RW	32.	
33.	POLIKHIN	L	Kr. Tengah	KADUS	33.	
34.	ABUNG. S	L	SEBAMUNG	RT	34.	
35.	SUPRIYMO	L	Sebaminur	Baras	35.	
36.	KUH TAROM	L	KR. TENGAH	RT	36.	
37.	PULMIN	L	KONTOARI	RT	37.	
38.	JUMARNO	L	PASAK.	RT	38.	
39.	SALİYAH	L	TESEH	RT	39.	
40.	DWIATI	P	Planet.	PICK	40.	
41.	NUR HATI	P	Sebaminur	PKN	41.	
42.	TIK. DWIATI	P	Sebaminur	Planet	42.	
43.	SALIKIN	L	Tekeh.	RT	43.	
44.	Kamaludin	L	Tekeh.	RT	44.	
45.	TUTIK.	P	SAPAK.	PICK	45.	
46.	YULI	P	Kr. Timur	PICK	46.	
47.	MURWATI	P	Kr. Barat	PICK	47.	
48.	SWATIYAH	P	Kr. Baras	KADUS	48.	
49.	KUHARIZMI	L	PASAK	Baras	49.	
50.	SUPRIYMO	L	Krajasinur	Baras	50.	
51.	ZAMRANI	L	Kr. .	Baras	51.	
52.	SUKAMTO	L	Krajasinur	Baras	52.	
53.	JUMARNO	L	PASAK.	RT.	53.	

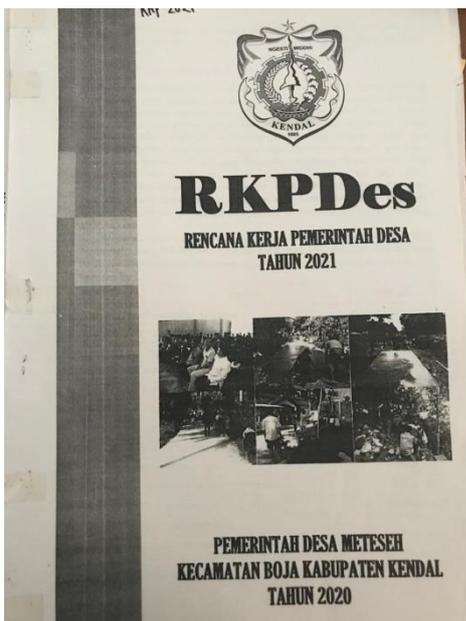
Daftar hadir masyarakat desa meteseh



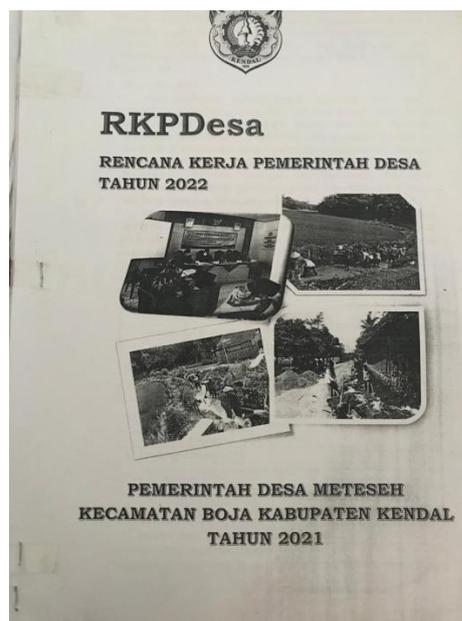
RKPDdes tahun 2023



RKPDdes tahun 2020



RKPDdes tahun 2021



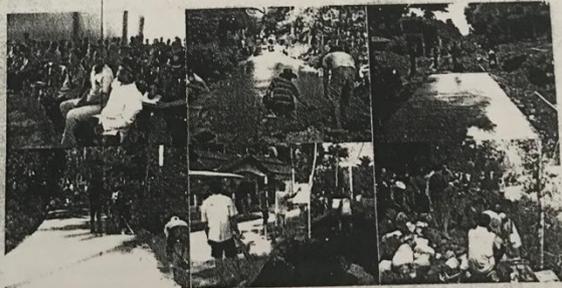
RKPDdes tahun 2022

RPJMDes  
2020-2026.



# RPJMDes

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020-2026



PEMERINTAH DESA METESEH  
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

RPJMDes tahun 2020-2026

FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN  
DUSUN SLAMET - SEGRUMUNG DESA METESEH  
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL  
0%



40%



80%



Pembangunan infrastruktur desa meteseh



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Laila Az Zahra Baedi
2. NIM : 2006016049
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 20 Mei 2002
4. Alamat : Brayu Timur Kertosari, Kec. Singorojo, Kab. Kendal
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. No. Hp : 085225492814
8. Email : [lailaazzahraedi@gmail.com](mailto:lailaazzahraedi@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK PGRI	(2008-2009)
SD N 2 Kertosari	(2009-2014)
SMP N 1 Singorojo	(2014-2017)
SMA N 1 Boja	(2017-2020)

### C. Riwayat Magang

Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum  
(KPU) Kabupaten Kendal (Tahun 2023)